

**LAPORAN**  
**STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**TAHUN 2006**



**Data : Januari – Desember 2006**  
**Diterbitkan : Pebruari 2007**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**

# LAPORAN

## STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2006



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat : Jln. Mohd Syafei No. 10 Pariaman  
Telp : (0751) 91501  
Fax : (0751) 91195



## ABSTRAK

### POTRET WILAYAH

Kabupaten Padang Pariaman memiliki letak yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat. Daerah ini berada di pesisir Barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai 60,5 km dan membentang hingga wilayah pergunungan Bukit Barisan. Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman terletak pada  $0^{\circ} 11' - 0^{\circ} 49'$  Lintang Selatan dan  $98^{\circ} 36' - 100^{\circ} 28'$  Bujur Timur, keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi angin darat dan curah hujan mencapai rata-rata 442,80 mm/bulan serta suhu udara berkisar antara  $26^{\circ} \text{C}$  sampai  $31^{\circ} \text{C}$  dengan ketinggian sekitar 0 – 1000 meter dari permukaan laut.

Secara administratif pemerintahan, saat ini Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan, 46 Nagari dan 363 korong, dengan luas wilayah 1.328,79  $\text{Km}^2$  ini setara dengan 3,15 wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung memiliki wilayah paling luas yaitu 228,70  $\text{Km}^2$ , sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang merupakan wilayah terkecil yakni 25,56  $\text{Km}^2$ . Kabupaten Padang Pariaman berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, serta sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Iklim Wilayah Kabupaten Padang Pariaman termasuk iklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Suhu udara berkisar antara  $24,4^{\circ} \text{C} - 25,7^{\circ} \text{C}$ . Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata 86.75 % dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam. Sedangkan rata-rata suhu maksimum  $31.08^{\circ} \text{C}$  dan rata-rata suhu minimum yaitu  $21.34^{\circ} \text{C}$  dengan curah hujan tercatat rata-rata 290.12 mm/tahun.

Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan pada daratan Pulau Sumatera dan 6 pulau-pulau kecil, dengan 40 % daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut, serta 60 % daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat disebelah timur dengan ketinggian 10 – 1000 meter di atas permukaan laut.



Kabupaten Padang Pariaman dilalui oleh 11 buah sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Batang Mangau sepanjang 46 Km dan Sungai Batang Anai dengan panjang 46 km. Sungai yang memiliki panjang terkecil dibandingkan dengan sungai-sungai lainnya di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Batang Kamumuan dan Batang Piaman dengan panjang sungai yaitu 12 km. Secara ekonomis sungai-sungai ini merupakan pendukung bagi kegiatan irigasi dan untuk budidaya ikan yang diusahakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Luas Kabupaten Padang Pariaman adalah 132.879 Ha, yang secara keseluruhan ini meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan/permukiman dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan yaitu 28,49 %, kemudian perkebunan sebanyak 26,40 % dan sawah seluas 21,38 % dari luas Kabupaten Padang Pariaman.

## **Ringkasan Bab II**

Arah kebijakan pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman adalah mewujudkan koordinasi pembangunan dan pengawasan pembangunan yang efektif untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Strategi yang ditetapkan yaitu secara internal melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur dalam bidang pengelolaan lingkungan dan melakukan aliansi strategis dengan unit kerja terkait. Strategi eksternal melalui pembuatan produk hukum daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan yang terkait dengan dampak lingkungan, membuat kerangka pembinaan kegiatan berwawasan lingkungan dan penelitian serta kajian dampak lingkungan, serta menjamin kemitraan dengan pihak LSM dan masyarakat.

Arah Kebijakan pembangunan Tata Ruang adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam perencanaan tata ruang, perijinan dan pengawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang serta menjadikan tata ruang sebagai alat kendali pembangunan wilayah yang efektif. Penataan ruang merupakan usaha untuk menata aktifitas daerah berdasarkan kesesuaian lokasi dan lahan sehingga pembangunan fisik yang dilakukan dapat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial kota. Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik wilayah dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang menjadi alat yang penting untuk mengarahkan pembangunan pada sentra-sentra pengembangan dan mengendalikan pembangunan pada kawasan-kawasan yang sensitif terhadap dampak negatif lingkungan.



### Ringkasan Bab III

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dinamika masyarakat, otomatis telah menjadikan semakin besarnya tekanan terhadap lingkungan dan dkuatirkan akan melewati daya dukungnya. Hal ini tentu akan memunculkan berbagai permasalahan / isu lingkungan di daerah ini. Isu-isu utama yang menghendaki perhatian oleh pengambil kebijakan di daerah ini, *yaitu isu lahan kritis dan alih fungsi lahan, pembalakan liar di kawasan lindung, banjir dan longsor, pencemaran udara dan perairan, eksploitasi penambangan yang tak terkendali pada daerah aliran sungai, sampah padat, gempa dan tsunami, kerusakan ekosistem pesisir pantai serta masalah sosekbudkesmas seperti penyakit masyarakat (pekat), pertambahan penduduk, kemiskinan, kesehatan masyarakat dan masalah sosial lainnya.*

Hal ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh para *stake holders*, baik Pemkab. Padang Pariaman, masyarakat maupun dunia usaha. Sebagai antisipasi agar tidak terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap alam dan lingkungan, diperlukan pertimbangan ekologi dalam setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, adanya konsistensi dalam penegakan hukum lingkungan, perlu kesamaan persepsi dan komitmen yang tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, sehingga lingkungan tetap terjaga dan lestari.

Kompleknya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman menuntut solusi secara multi dimensi dan *komprehensif*. Salah satu faktor penentu berhasil tidaknya upaya pemecahan masalah adalah peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya hal ini masih menghadapi persoalan yang cukup rumit dan sensitif, sehingga keterlibatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemantauan relatif rendah, sehingga upaya-upaya penanganan yang dilakukan tidak tepat waktu dan sasaran. Peran serta ini tidak didukung oleh kemampuan dan kepedulian yang memadai dalam menyikapi persoalan mengenai lingkungan hidup.

Untuk menanggulangi permasalahan dan kondisi lingkungan akibat tekanan dampak, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta masyarakat dan seluruh *stakeholder* telah merespon hal tersebut dengan melakukan langkah-langkah perbaikan baik secara preventif maupun kuratif. Tanpa adanya kerjasama yang baik maka perbaikan yang berkelanjutan (*inquiry improvement*) tidak akan mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Untuk itu kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup perlu disusun dengan perencanaan yang baik berdasarkan data lingkungan yang akurat serta bersifat mengembangkan potensi dari pihak-pihak terkait. Keterlibatan pihak terkait diharapkan dapat lebih terkoordinasi dengan baik, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Isu Utama Lingkungan Tahun 2006

Dasar dari kebijakan pembangunan nasional yang telah diterapkan selama ini adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pola pembangunan tersebut mengandung makna mengusahakan hasil yang sebaik-baiknya dari sumber alam yang tersedia seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dengan cara memelihara keberlanjutan kualitas dan potensi sumberdaya alam itu sepanjang masa. Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan harus diwaspadai, tidak hanya oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi setiap kita –sebagai *stake holder*- juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan untuk diwariskan kepada anak cucu kita.

Pembangunan segala aspek di era globalisasi dan otonomi daerah berkembang sangat pesat dan cepat, namun hal itu tidak saja memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk, tapi juga dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek pelestarian lingkungan hidup. Keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup perlu diakomodasikan ke dalam suatu kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global. Dalam hal ini daerah pun tidak dapat terlepas orientasi kebijakan tersebut., karena pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara nasional tidak dapat berlangsung secara baik , bila tidak ada kebijakan yang jelas dan terarah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum kebijakan pembangunan yang dilaksanakan terutama di daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspek pelestarian lingkungan. Pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral, sehingga tidak ada korelasi dan keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan pembangunan yang lain sehingga menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dampak dari kegiatan pembangunan tersebut dapat meluas menjadi isu lingkungan yang bersifat kompleks dan global. Setiap kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak semata hanya dilihat dari pertimbangan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan, tetapi juga harus mengedepankan pertimbangan nilai sosial budaya yang ditopang oleh kondisi lingkungan yang sehat, ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan.



Berkembangnya budaya modern cenderung menyebabkan timbulnya berbagai kesalahan cara pandang dalam hubungan antara manusia dengan alamnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang membahayakan keberlanjutannya serta rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu kearifan lokal sebagai sumber inspirasi bagi pengelolaan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup semakin terpinggirkan, disamping masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan di masa lalu cenderung lebih mengutamakan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan kaidah, norma dan etika pengelolaan sumberdaya alam berkeadilan dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan eksploitasi sumberdaya alam itu dilakukan tidak efisien dan efektif serta berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, sehingga terjadinya pengurasan sumberdaya alam melebihi daya dukungnya.

Lemahnya kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan masalah krusial yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menikmatinya menjadi sangat terbatas dan justru menimbulkan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memiliki perspektif lingkungan hidup. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan di suatu daerah dari waktu ke waktu cenderung makin bertambah dan beragam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa penanganan masalah lingkungan hidup masih belum dilihat sepenuh hati oleh pengambil keputusan dalam bentuk program pembangunan. Hal ini semakin terlihat dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan lingkungan masih jauh lebih sedikit dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor lain.

Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan memiliki luas 132.879 Ha, terdiri dari perpaduan wilayah dataran, daerah perbukitan dan daerah aliran sungai yang berjumlah 11 buah dan 2 diantaranya merupakan sungai besar. Setiap tahunnya Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan kegiatan industri, pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi dan jumlah penduduk. Sementara ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sangat ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk yang tinggi, dan struktur usia penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang kebanyakan berusia muda sehingga terkonsentrasi pada usia kerja, hal ini akan menuntut ketersediaan lapangan kerja, tersedianya lahan, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dinamika masyarakatnya tersebut otomatis telah memunculkan permasalahan lingkungan di daerah ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan menjadi





salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Informasi tentang lingkungan hidup di daerah perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik untuk ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diperhatikan daya dukungnya.

Hal ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akan tetapi setiap warga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan sumber daya alam dan lingkungan. Adanya peningkatan sumberdaya manusia, pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta sebab akibatnya merupakan hal yang penting dalam memelihara keutuhan fungsi sumberdaya alam dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai masalah seperti :

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman
- b. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan.
- c. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Padang Pariaman yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
- d. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas.

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, berbagai kendala dalam pengendalian lingkungan di daerah ini masih saja terjadi. Berbagai isu lingkungan yang pernah diungkapkan melalui laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2005 masih menjadi isu yang mengemuka untuk Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini. Kondisi seperti ini sesungguhnya kurang menggembirakan bila dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyikapi permasalahan lingkungan di daerah ini. Diantara isu lingkungan yang masih menjadi sorotan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

#### **A. Banjir, Abrasi Pantai dan Tanah Longsor**

Sebagai kota yang merupakan dataran rendah, permasalahan banjir patut untuk diwaspadai. Kabupaten Padang Pariaman dialiri oleh 11 buah sungai dimana diantaranya terdapat 2 sungai besar yaitu Batang Anai dan Batang Mangau. Bencana banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Padang Pariaman, terutama pada saat curah hujan tinggi. Permasalahan banjir ini ternyata masih belum mampu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun telah dibenahi berbagai sarana untuk pengendalian banjir.



Penyebab dari permasalahan banjir di Kabupaten Padang Pariaman ini tak lepas dari berbagai faktor, di samping faktor curah hujan dan fluktuasi gelombang laut adalah seperti pembukaan lahan pada hulu sungai yang menyebabkan erosi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai. Hal tersebut mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kurangnya kapasitas tampung sungai yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya banjir di daerah ini. Faktor adanya pembuangan dan penumpukan sampah pada sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena hal ini akan memperlambat dan menyumbat aliran air. Peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada 2006 ini cenderung meningkat dan semakin meluas. Hal ini tentu bakal menimbulkan berbagai macam kerugian di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan instansi terkait sebagai pembuat kebijakan serta seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

## **B. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Pencemaran air di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2006 masih didominasi oleh pencemaran akibat kegiatan industri, lingkungan pemukiman, pasar dan berbagai kegiatan lain yang menghasilkan limbah. Masih terdapatnya sejumlah industri, pabrik pada beberapa ruas sungai dan di tepi pantai dapat mengakibatkan pencemaran, hal ini terjadi karena aktifitas untuk menjaga lingkungan dari dunia industri di Kabupaten Padang Pariaman juga masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa sungai di daerah ini telah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan industri tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Keadaan ini terungkap dari beberapa kali pemeriksaan mendadak (sidak) yang di lakukan oleh pihak pengambil kebijakan lingkungan bersama instansi teknis terkait. Faktor lainnya adalah pantai dan sungai juga masih dijadikan tempat pembuangan berbagai limbah domestik yang berasal dari masyarakat yang belum mengerti akan arti penting dari kebersihan lingkungan. Semua kegiatan-kegiatan ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga masalah pencemaran lingkungan masih menjadi isu lingkungan selama tahun 2006.

Bentuk pencemaran lain yang menjadi masalah utama di Kabupaten Padang Pariaman adalah pencemaran udara akibat kegiatan industri dan meningkatnya jumlah kendaraan. Sumber utama dari sektor industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah berasal dari kegiatan operasional pabrik PT. Bumi Sarimas Kelapa Indonesia dan Inti Sawit. Disamping itu meningkatnya jumlah kendaraan seiring dengan tingginya berbagai aktivitas di Kabupaten Padang Pariaman juga akan berakibat meningkatnya tingkat pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan tersebut. Dampak pencemaran udara akan menyebar luas sesuai dengan perilaku iklim dan arah angin. Dan penyebaran pencemaran ini tidak mengenal batas administratif.



Permasalahan pencemaran akibat dari pembuangan sampah di Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya peralatan dan armada yang ada serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke pantai, sungai, selokan, dan parit. Hal ini tentu menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan tersumbatnya aliran air. Disamping itu dampak pencemaran sampah tersebut akan menjadi sumber yang dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan.

Pencemaran akibat sampah masih menjadi masalah utama yang harus diperhatikan dan diwaspadai. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan kebijakannya bersama masyarakat diharapkan dapat melakukan peningkatan baik dari segi penanganan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting kebersihan dan kesehatan dan kelestarian lingkungan.

### C. Lahan Kritis dan Alih Fungsi Lahan

Permasalahan lingkungan yang terus dan semakin menjadi perhatian serius yang dapat kita cermati secara bersama adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah, hal ini akan menambah lahan kritis di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan segala kebijakannya, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab segenap unsur masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuatu yang dikhawatirkan dimasa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya, Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (*catchment area*) Kabupaten Padang Pariaman yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.



Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan masih cenderung untuk terus bertambah di Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut diatas jelas akan menjadikan timbulnya tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan. Keadaan ini sudah sepatasnya untuk diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, pola perubahan ini harus dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.

Faktor penyebab timbulnya permasalahan perekonomian tersebut adalah dimasa mendatang dengan meningkatnya kepadatan penduduk yang mengakibatkan tingginya tingkat persaingan hidup, kecilnya kesempatan kerja dan berusaha. Seiring dengan makin tingginya faktor kebutuhan kehidupan penduduk Kabupaten Padang Pariaman tersebut maka akan beragam pula alternatif mata pencaharian yang coba digeluti oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk pemenuhan kebutuhannya. Hal ini akan berakibat kepada terganggunya keberadaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang akan menjadi objek pemanfaatan yang tidak lagi memandang aspek konservasi lingkungan. Kawasan seperti kawasan lindung, kawasan konservasi dan sempadan air tak luput dijadikan sebagai tempat tinggal dan berusaha.

#### **D. Degradasi Ekosistem Pesisir Pantai**

Kawasan hutan mangrove yang terdapat di sepanjang wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bila dikelola dengan baik. Terjadinya konversi kawasan hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti pemukiman, kawasan wisata pantai, tambak serta tumpang tindih dalam pemanfaatannya untuk berbagai kegiatan pembangunan disebabkan belum adanya tata ruang dan rencana pengembangan pantai.

Terjadinya kerusakan biogeofisik sumberdaya pesisir dan laut seperti pada ekosistem mangrove dan terumbu karang ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan terumbu karang pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan yang bersifat *destruktif* seperti penggunaan bahan peledak, racun *potasium* dan *sianida* untuk penangkapan ikan, pembuangan jangkar perahu dan pengambilan batu karang. Terumbu karang merupakan potensi sumberdaya laut yang sangat penting dan strategis, karena mempunyai produktifitas organik yang sangat tinggi dibanding ekosistem lain. Disamping fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemijahan, habitat biota perairan, terumbu karang juga menghasilkan nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis ikan, udang, karang, alga, teripang dan kerang mutiara.

#### **E. Gempa Bumi dan Tsunami**

Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan dan beresiko tertinggi terhadap ancaman gempa dan tsunami, jika dilihat dari letak geografis dan keadaan alam Sumatera Barat yang sebagian besar



kotanya berada di pesisir pantai serta memiliki dua patahan yang berada di daratan dan di lautan yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya gempa bumi dan tsunami. Banyak pakar geofisika yang telah memprediksi bahwa di sepanjang Sesar atau patahan Mentawai, ibarat buah yang hampir masak yang hampir jatuh ke tanah. Begitulah peluang gelombang tsunami yang akan menimpa daerah pesisir pantai Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Walaupun selama tahun 2006, gempa besar yang berpotensi tsunami tidak terjadi, namun isu ini masih relevan berdasarkan *siklus seismik*.

Padang pernah dilanda tsunami pada tahun 1797 dan 1833. Para ilmuwan menyebutkan bahwa pengulangan gempa yang berpotensi tsunami terjadi dalam kurun waktu  $200 \pm 30$  tahun, maka sekarang kita berada pada masa pengulangan tersebut. Tsunami pasti selalu didahului oleh gempa karena tsunami terjadi pergeseran lempeng secara vertikal setelah berbenturan. Benturan inilah menyebabkan gempa dan perubahan posisi lempeng yang menyebabkan perubahan permukaan air laut dan menimbulkan gelombang laut yang disebut tsunami. Tidak semua gempa menyebabkan tsunami. Hanya gempa di laut dangkal dengan kekuatan 6,5 skala Richter lah yang berpotensi menimbulkan tsunami. Sumatera Barat dilalui oleh lempeng Eurasia dan Indo Australia yang semakin mendekat satu sama lainnya, yang jika bertumbukan pasti akan sangat terasa kekuatannya.

Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diprediksi kapan akan terjadi, tapi hanya dapat diketahui lokasi dan skalanya. Bahkan teknologinya pun belum ditemukan. Namun hanya sistem peringatan dini dalam bentuk peringatan lunak dan peringatan keras.

## F. Masalah-Masalah Sosial

- **Tingginya Pertambahan Penduduk dan Tidak Merata Penyebaran Penduduk**

Pesatnya perkembangan Kabupaten Padang Pariaman di berbagai sektor, seiring dengan semakin tingginya angka pertambahan penduduk. Otomatis juga akan berimbas kepada perkembangan kawasan pemukiman yang cenderung semakin mengarah ke daerah pinggiran. Hal ini terlihat dengan semakin tingginya tingkat hunian penduduk ke areal-areal pemukiman khususnya di berbagai perumahan yang dikembangkan pada daerah pinggiran tersebut. Akibatnya akan timbul berbagai masalah seperti pembukaan lahan baru, pencemaran dan masalah sampah, yang nantinya menurunkan kualitas sumberdaya lingkungan. Penyebaran dan kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman terlihat tidak merata antar wilayah kecamatan.

- **Terbatasnya Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari pengembangan sumberdaya manusia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan bangsa yang sehat, sejahtera lahir dan batin. Kebijakan pembangunan kesehatan diprioritaskan kepada upaya



peningkatan pelayanan kesehatan dasar, yang lebih dititik beratkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Jumlah dan penyebaran sarana kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman dinilai telah cukup memadai, walaupun rasionya belum terpenuhi, namun jika ditinjau dari aspek mutu, maka pelayanan yang diberikan, masih perlu terus ditingkatkan. Untuk itu penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan perlu diupayakan dengan memobilisasi peran serta swasta dan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat. Pada saat ini telah diupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dengan berbagai aktivitas pelayanan.

- **Kerawanan dan Kerentanan Sosial**

Berdasarkan data, secara umum ada kecenderungan pada tahun 2006 terjadi penurunan jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban, namun hal tersebut di atas tetap memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat terciptanya keamanan dan ketertiban yang akan menunjang kelancaran roda pembangunan. Disamping itu masih maraknya terjadi penyakit masyarakat seperti prostitusi, narkoba dan miras, walaupun aparat penegak hukum seperti Satpol PP, dan Kepolisian sudah sering melakukan penertiban. Masih lemahnya penegakan hukum dan masih banyaknya persoalan hukum yang belum tertangani telah berdampak kepada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Hal ini lebih jauh berdampak pada munculnya berbagai tindakan maksiat dan lain sebagainya.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan tingginya urbanisasi ke kota merupakan masalah yang rumit dihadapi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta banyak penduduk miskin yang rawan sosial. Penanggulangan masalah penduduk miskin dan rawan sosial telah banyak dilakukan, namun jumlah penduduk yang besar telah mendorong meningkatnya masalah pokok daerah yaitu keamanan dan ketertiban wilayah. Masalah diatas membawa dampak kepada kebijakan daerah lainnya seperti bidang perdagangan dan jasa, sistem transportasi kota serta kenakalan remaja dan narkoba. Disamping itu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat daerah. Kurangnya perhatian masyarakat dalam pembangunan sangat dirasakan terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kota, rendahnya semangat kebersamaan dan gotong royong yang semakin menipis.

Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan pelaksanaan adat budaya Minang Kabau. Hal ini sebagai akibat derasnya arus globalisasi dan arus informasi serta kemajuan teknologi. Penyerapan budaya global akan berdampak pada lemahnya ketahanan budaya dan pengamalan terhadap ajaran agama. Kondisi ini memudahkan nilai solidaritas dan menerobos perubahan nilai etika moral dalam kehidupan masyarakat.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi juga menyebabkan kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum optimalnya pelayanan kesehatan. Masih banyaknya anak putus sekolah, masih



besarnya jumlah siswa yang mengulang, cukup besarnya kualitas guru yang perlu ditingkatkan, masih kurangnya fasilitas yang disediakan sekolah, masih cukup rendahnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni peserta didik. Pelayanan kesehatan terhadap Balita dan ibu hamil masih belum maksimal penanganannya seperti masih rendahnya pelayanan terhadap ibu hamil beresiko tinggi dan pendeteksian perkembangan anak Balita dan pra sekolah serta penanganan terhadap penyakit menular yang belum maksimal.

## 1.2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap dalam kondisi yang bagus dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi saat ini hal tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Pertambahan jumlah penduduk dan terus meningkatnya arus urbanisasi ini mengakibatkan tingginya tingkat persaingan hidup, hal ini merupakan salah satu faktor yang memicu lemahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Tingginya tuntutan hidup dan tekanan ekonomi, telah memicu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Peluang ini semakin dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan pinggir daerah Kabupaten Padang Pariaman yang jauh dari jangkauan pengawasan. Upaya pengrusakan kawasan lindung terlihat semakin bertambah, seiring dengan lemahnya penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

Kompleknya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman menuntut solusi secara *multi dimensi* dan *komprehensif*. Salah satu faktor penentu berhasil tidaknya upaya pemecahan masalah adalah peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya hal ini masih menghadapi persoalan yang cukup rumit dan sensitif, sehingga keterlibatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemantauan relatif rendah, sehingga upaya-upaya penanganan yang dilakukan tidak tepat waktu dan sasaran. Peran serta ini tidak didukung oleh kemampuan dan kepedulian yang memadai dalam menyikapi persoalan mengenai lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang dan kaidah pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan dalam proses pembangunan.
- b. Belum memadainya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara kegiatan atau aktifitas pembangunan dengan lingkungan hidup.



- c. Masih lemahnya penerapan hukum lingkungan yang terlihat dari penyelesaian kasus-kasus lingkungan yang berlarut-larut, sehingga masyarakat apatis terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.
- d. Belum adanya LSM yang *concern* bergerak di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

Jika dicermati salah satu persoalan mendasar dari rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah karena masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang banyak dihadapi masyarakat, namun sulit untuk dikendalikan dan dicarikan solusinya, mengingat hal ini berkaitan dengan kemampuan atau keahlian masyarakat itu sendiri. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh *stakeholders*, mengingat adanya keterkaitan antara kemiskinan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kemiskinan meskipun tidak selalu, sering menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, yang kemudian pada akhirnya yang menanggung dampak dari kerusakan itu adalah masyarakat miskin itu sendiri.

Berkaitan dengan hal diatas, perlu dicarikan solusi yang tepat, bagaimana mengurangi jumlah masyarakat miskin tersebut. Karena salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan yang baik adalah mencari alternatif pendapatan selain dari mengesplotasi sumberdaya alam tanpa mengindahkan kaedah konservasi, sehingga mengurangi tekanan penduduk terhadap pemanfaatan sumberdaya tersebut. Disamping itu rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai sumberdaya secara keseluruhan juga merupakan persoalan tersendiri. Selama ini masyarakat hanya mengenal sumberdaya sebatas pada nilai ekonomisnya saja, padahal dalam sumberdaya tersebut juga terdapat nilai ekologis dan nilai estetika yang sangat penting dalam keberadaan ekosistem. Keberadaan sumberdaya alam hayati selain memberikan nilai ekonomi juga bernilai ekologis. Manfaat ekologi ini sebenarnya jauh lebih besar dari dibandingkan manfaatnya secara ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah cukup banyak melakukan upaya dan kegiatan yang dapat mendorong timbulnya motivasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, namun aktifitas tersebut dirasakan belum memadai, disebabkan adanya keterbatasan dana yang dialokasikan pemerintah serta belum terpadunya mekanisme pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam masalah lingkungan pada umumnya ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengaduan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pelanggaran hukum lingkungan serta keterlibatan / peran serta aktif unsur pers/media massa dalam memberikan informasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat berbagai kegiatan pembangunan.

Koordinasi kelembagaan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang cukup menonjol. Hal ini mempengaruhi upaya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan serta





evaluasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup baik yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tumpang tindih dalam penggunaan sumberdaya alam. Disisi lain terlihat masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan generasi berikutnya. Hal ini disebabkan karena manfaat menjaga lingkungan belum terasa oleh masyarakat dan masyarakat lebih disibukkan oleh kegiatan yang bermotifkan ekonomi, apalagi dalam kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi. Banyaknya program pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan yang harus dilaksanakan tidak dapat direalisasikan karena sangat terbatasnya alokasi anggaran untuk sektor ini. Sementara itu persoalan lingkungan hidup yang harus ditangani semakin beragam dan kompleks.

### 1.3. Aktifitas Menjaga Lingkungan

Aktifitas menjaga lingkungan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh semua pihak secara konsekwen sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun kenyataannya kegiatan menjaga lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman selalu diimbangi oleh kegiatan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang intensitasnya lebih kuat dari menjaga lingkungan. Akibat tidak seimbangnya upaya menjaga lingkungan dengan tindakan pengrusakan lingkungan berdampak pada semakin meningkatnya degradasi lingkungan yang memerlukan pemulihan secepatnya.

Upaya untuk menjaga kualitas lingkungan agar senantiasa terpelihara dengan baik, sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selaku pengambil kebijakan di daerah ini, seyogyanya aktifitas menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat termasuk dunia usaha dan industri. Berdasarkan hasil pencatatan selama tahun 2006, terungkap bahwa aktifitas menjaga lingkungan dari kalangan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih belum terlaksana seperti yang diharapkan. Keadaan ini terungkap dengan masih terjadinya kasus-kasus banjir di beberapa kawasan pada saat curah hujan tinggi. Disamping itu masih banyak terjadinya penggundulan hutan pada hulu daerah tangkapan air (*catchment area*) untuk lokasi peladangan masyarakat dan eksploitasi kayu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Aktifitas menjaga lingkungan dunia usaha dan industri di Kabupaten Padang Pariaman juga masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa sungai di daerah ini – Batang Anai- telah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan industri tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu atau kapasitas IPALnya belum memadai. Hal ini terungkap dari beberapa kali pemeriksaan mendadak (*sidak*) yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman bersama instansi teknis terkait.



Disamping itu adanya laporan masyarakat dan LSM tentang pencemaran Batang Anai akibat limbah cair industri Bumi Sari Mas Kelapa dan Inti Sawit. Permasalahan sosial yang muncul juga banyak diantaranya peningkatan intensitas penyakit masyarakat (pekat) seperti adanya tempat prostitusi liar yang berkedok *Café* dan Pondok Wisata di pantai. Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan –lingkungan alam, lingkungan binaan maupun lingkungan sosial- harus diwaspadai, tidak hanya oleh pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi setiap warga juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan sumber daya alam dan lingkungan untuk diwariskan kepada anak cucu kita.

Kemampuan masyarakat yang terkait dengan aktifitas menjaga lingkungan hidup yang baik dan bertanggung jawab dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan atau jenis pembinaan lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mulai melakukan upaya yang diharapkan mampu memotivasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun kedepan intensitasnya perlu lebih ditingkatkan mengingat semakin kompleks dan beragamnya permasalahan lingkungan.



## **BAB II**

# **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN**

Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah banyak mengalami perkembangan, baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, hukum dan politik maupun yang lainnya. Sebagai suatu kota besar, kota ini mempunyai berbagai konsekuensi atas proses pembangunan yang sedang berjalan. Dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, sumberdaya yang dimanfaatkan berbasis pada kekayaan alam di darat dan di laut yang sampai saat ini belum sepenuhnya termanfaatkan. Tanah yang relatif subur yang menghasilkan berbagai komoditi pertanian, tambang dan bahan galian yang telah memberi kehidupan kepada masyarakat, sungai besar dan kecil, laut, pesisir, pulau-pulau kecil, yang memiliki berbagai kekayaan dan menyimpan potensi kepariwisataan.

Di samping kekuatan tersebut, Kabupaten Padang Pariaman memiliki beberapa kelemahan. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut sangat tergantung kepada investasi, namun sangat terkendala pada sarana dan prasarana lokal yang belum memadai dan keamanan berinvestasi belum sepenuhnya terjamin. Untuk itu pemerintah kota perlu mensinergikan segala sumberdaya tersebut dengan kelemahan yang ada untuk dapat mencapai pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang optimal.

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat kebijakan-kebijakan yang disusun berupa 3 (tiga) dokumen yang menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketiga dokumen tersebut adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006–2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Padang Pariaman 2006-2011, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2006 Kabupaten Padang Pariaman serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006. Ketiga dokumen tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

### **Tema Pembangunan Daerah**

Visi Kabupaten Padang Pariaman sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2006 – 2011 yaitu :

*" Terwujudnya Masyarakat yang Berkeadilan, Berkualitas, Kompetensi, dan Berkesejahteraan Lahir dan Batin Berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Absandi Kitabullah serta bersinergi dengan Pemerintaham yang Sehat dan Baik , Tanggap dan Bersimpatik"*



Dari visi tersebut tampak bahwa Kabupaten Padang Pariaman dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom menuntut nilai-nilai dasar yang berorientasi kepada opini masyarakat dengan prinsip demokratisasi, peran serta aktif masyarakat, pemerataan dan keadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2006 –2011 ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Penegakan keadilan di bidang hukum, politik dan sosial ekonomi, sosial budaya, serta persamaan kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Perwujudan sumberdaya manusia yang bermutu dan memiliki nilai tambah dengan etos kerja yang tinggi serta siap menghadapi persaingan global secara *kompetitif* dan *komparatif*.
3. Penciptaan kesejahteraan ekonomi kerakyatan masyarakat secara lahir dan bathin sebagai syarat kebutuhan terutama kehidupan masyarakat.
4. Pelaksanaan pembangunan yang dilandaskan kepada adat istiadat yang berdasarkan Syarak (syariat agama) dan syarak yang bersumber dari Kitabullah (**Al Qur'anul Karim**), dimana secara tersurat dan tersirat bahwa daerah ini dibangun dan diorientasikan sebagai Kabupaten yang *Sosio-Religius*.
5. Sistem dan Mekanisme roda pemerintahan adalah terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Governement*) yang bertanggung jawab serta akuntabilitas sebagai pemerintah amanah yang menepati janjinya pada masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tampak dengan jelas menekankan tentang pentingnya sumberdaya manusia. Hal ini sungguh tepat mengingat bahwa potensi sumberdaya manusia merupakan penentu kemajuan dan kemandirian wilayah, pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi.

## 2.1 Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) diarahkan kepada usaha pengelolaan SDA agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan generasi penerus, serta menjamin keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Pengelolaan SDA dan LH di Kabupaten Padang Pariaman meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pembinaan, pengelolaan dan pengawasan SDA serta lingkungan hidup. Pemanfaatan SDA haruslah sesuai dengan kaedah pengelolaan sumberdaya yang dikelola seimbang, serasi dan selaras, sehingga untuk masa yang akan datang pengelolaan SDA dan LH Kabupaten Padang Pariaman dapat dipertahankan bagi keberlanjutan pembangunan.



Dengan Visi di bidang pembangunan lingkungan hidup yaitu : **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup**, maka untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai misi sebagai berikut :

- Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana kelembagaan dalam mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

#### TUJUAN

1. Terwujudnya manajemen pengawasan dan pengendalian dan pembangunan berkelanjutan
2. Terwujudnya upaya pelestarian lingkungan hidup secara terpadu
3. Terciptanya Sumberdaya Manusia yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana

#### SASARAN

1. Terimplementasinya Amdal dan UKL-UPL pada setiap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.
2. Tercegahnya lingkungan hidup dari kerusakan yang tidak bertanggungjawab.
3. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
4. Terwujudnya aparatur dan masyarakat dalam keterampilan pengelolaan LH.
5. Tersedianya prasarana dan sarana dalam menunjang kegiatan.

#### ARAH KEBIJAKAN UMUM

##### Arah Kebijakan dan Strategi

- Arah kebijakan pembangunan SDA dan LH Kabupaten Padang Pariaman yaitu: mewujudkan koordinasi pembangunan dan pengawasan pembangunan yang efektif untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup.
- Strategi yang ditetapkan yaitu secara internal melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur dalam bidang pengelolaan lingkungan dan melakukan aliansi strategis dengan unit kerja terkait.



- Strategi eksternal melalui pembuatan produk hukum daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan yang terkait dengan dampak lingkungan, membuat kerangka pembinaan kegiatan berwawasan lingkungan dan penelitian serta kajian dampak lingkungan, serta menjamin kemitraan dengan pihak LSM dan masyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka dibuatlah kebijakan Kantor Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis pengelola lingkungan hidup.

### 1. Kebijakan Publik

- a. Memberikan jasa asistensi dan pengembangan pelaksanaan sistem Amdal dan UKL-UPL kepada pemilik dan pengelola usaha/kegiatan yang wajib mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan.
- b. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap pemberian izin atas usaha/kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Memberikan jasa asistensi tentang prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam terhadap instansi terkait dan *stakeholders*.
- d. Memberikan asistensi tentang fungsi dan peran masyarakat, lembaga, organisasi dan wadah profesi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
- e. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- f. Mewajibkan untuk membuat dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi usaha/kegiatan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. Kebijakan Teknis

- a. Kebijakan pelaksanaan sistem pelaporan Amdal atau UKL-UPL oleh pengusaha/pemilik kegiatan yang diwajibkan memilikinya.
- b. Kebijakan monitoring dan evaluasi pada usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif secara rutin dan berkala.
- c. Kebijakan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- d. Kebijakan untuk menghasilkan Perda tentang pemanfaatan SDA serta pelestariannya, dan penetapan baku mutu lingkungan terhadap pencemaran bagi setiap usaha/kegiatan.

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut diatas, maka prioritas pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam adalah pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah dan mengelola potensi sumberdaya alam secara ekonomis, efektif dan efisien dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan.



## RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH

- ☞ Program Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Pemantauan terhadap usaha/kegiatan industri penghasil limbah.
  - Pemantauan terhadap kegiatan penambangan galian C, seperti obsidian dan pasir pantai.
  - Pemantauan kawasan rawan dampak (rawan longsor, rawan banjir, rawan erosi tebing sungai, rawan abrasi pantai :
    - Luas kawasan rawan dampak longsor 9,62 % dalam luas wilayah kabupaten.
    - Rawan banjir 6 kecamatan di 13 lokasi seluas 861,45 Ha.
    - Erosi tebing sungai 8 sungai, 5 alami dan galian C dan 3 lainnya alami.
    - Abrasi pantai (Kec. Sei. Limau, Bt. Gasan)
  - Identifikasi potensi galian C pada DAS (Daerah Aliran Sungai).
  - Penelitian Limbah B-3, pelumas bekas atau aki bekas.
- ☞ Program Penataan Pengelolaan Lingkungan Pada Setiap Usaha/Kegiatan
- Inventarisasi usaha/kegiatan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.
  - Usaha/kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL.
  - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
- ☞ Program Pelestarian dan Konservasi Tanah/Lahan
- Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna)
  - Pembuatan papan/plang berisi larangan, himbauan, dsb.
  - Pengelolaan lahan kritis/marginal, sempadan sungai (DAS) dan penghijauan pantai.
  - Pengembangan tanaman langka.
  - Perlindungan terhadap sumber-sumber air seperti Lubuk Bonta, sempadan sungai dan pantai.
  - Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  - Penanaman pohon pelindung di kiri-kanan jalan.
- ☞ Program Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
- Sosialisasi peraturan perundangan mengenai pengelolaan LH.
  - Pelatihan teknis pengelolaan LH bagi aparaturnya dan masyarakat.
- ☞ Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- Perda kawasan lindung (sempadan pantai, sungai) dan sumber-sumber air.
  - Perda perlindungan keanekaragaman hayati (flora dan fauna)



- Peraturan Nagari tentang wajib tanam pohon bagi calon pengantin.
- ☞ Program Pengelolaan Pasar Bersih
- Penilaian dan lomba-lomba kebersihan pasar kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

## 2.2 Kebijakan dan Pelaksanaan Tata Ruang

Penataan ruang akan memberikan hasil dan terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Disamping itu pemanfaatan ruang yang berkualitas akan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sesuai dengan perkembangan paradigma baru, penataan ruang merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, memadukan antarsektor dan mensinkronkan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang merupakan usaha untuk menata aktifitas kewilayahan berdasarkan kesesuaian lokasi dan lahan sehingga pembangunan fisik yang dilakukan dapat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial daerah. Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik wilayah dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang menjadi alat yang penting untuk mengarahkan pembangunan pada sentra-sentra pengembangan dan mengendalikan pembangunan pada kawasan-kawasan yang sensitif terhadap dampak negatif lingkungan.

Menata ruang dan meningkatkan sarana dan prasarana melalui pendekatan pembangunan berbasis kawasan ke arah keseimbangan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam konteks pembangunan wilayah. Kegagalan dalam menata ruang akan membuat situasi yang tidak menguntungkan bagi semua pihak sebab investasi pemerintah dalam tata ruang tidak memberika hasil yang menguntungkan. Banyaknya permasalahan di perkotaan pada awalnya disebabkan oleh tidak matangnya rencana penataan ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu adanya ketidak disiplin untuk menjalankan bentuk tata ruang yang telah disepakati. Beberapa bagian ruang dan kawasan perlu dipacu dan diarahkan perkembangannya melalui kebijakan penataan ruang sehingga peruntukan lahan dapat diarahkan dan perubahannya dapat dikendalikan. Kebijakan lain adalah penataan ulang terutama bagian ruang yang mengalami percepatan perkembangan namun tidak didukung oleh ruang, barang dan pelayanan publik.





Tujuan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah mewujudkan tata ruang wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka panjang dengan senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, efisiensi alokasi investasi dan bersinergi dengan kegiatan pembangunan lainnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mendorong pengembangan wilayah diarahkan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata).
2. Meningkatkan sumberdaya manusia menunjang nilai tambah ekonomi kerakyatan.
3. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam menjadi pengolahan sumberdaya alam melalui kegiatan agro industri dan agribisnis dalam memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerah.
4. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah/kawasan untuk mendukung kegiatan pergerakan orang/ penduduk, barang dan jasa bagi kelancaran distribusi, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Peningkatan jaringan utilitas pada lokasi potensial bagi kegiatan ekonomi utama.
6. Peningkatan kualitas lingkungan agar pemanfaatan ekosistemnya dapat lestari dan berkelanjutan.

Untuk itu wilayah Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk dibagi kedalam 3 Wilayah Pengembangan (WP) dan 7 Sub Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai berikut :

1. Wilayah pengembangan A, dengan pusat pengembangan di Lubuk Alung untuk pengembangan wilayah tenggara , yang meliputi 3 sub wilayah pengembangan :
  - a. SWP – A1 dengan sub pusat pengembangan di Lubuk Alung
  - b. SWP – A2 dengan sub pusat pengembangan di Batang Anai
  - c. SWP – A3 dengan sub pengembangan di 2 X 11 Kayu Tanam

Kota Lubuk Alung menjadi pendorong pertumbuhan bagi kecamatan di sekitarnya yaitu: Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, 2 X 11 Kayu Tanam, Sintuk Toboh Gadang, Ulakan, Tapakis, Batang Anai.

2. Wilayah Pengembangan B, dengan pusat pengembangan di VII Koto untuk pengembangan di wilayah tengah, yang meliputi 2 sub wilayah pengembangan :
  - a. SWP – B1 dengan pusat pengembangan di VII Koto
  - b. SWP – B2 dengan pusat pengembangan di Nan Sabaris



Kota VII Koto menjadi pendorong pertumbuhan bagi Kecamatan di sekitarnya yaitu : Kecamatan VII Koto Timur, Padang Sago, Patamuan, Nan Sabaris.

3. Wilayah Pengembangan C, dengan pusat pengembangan di Koto Aur Malintang untuk pengembangan wilayah bagian utara barat laut, yang meliputi 2 sub wilayah pengembangan :
  - a. SWP – C1 dengan pusat pengembangan di Koto Aur Malintang
  - b. SWP – C2 dengan pusat pengembangan di Sungai Limau.

Koto Aur Malintang menjadi pendorong pertumbuhan bagi Kecamatan di sekitarnya yaitu : Kecamatan Sungai Geringging, Batang Gasan, Sungai Limau dan V Koto Kampung Dalam, Nan Sabaris.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam wilayah rawan gempa dan gelombang Tsunami. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah *claim* daerah pantai Barat pulau Sumatera sebagai daerah rawan Tsunami (termasuk Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan). Untuk itu ke depannya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus memperhatikan penataan ruang disepanjang garis pantainya. Upaya-upaya mitigasi gempa secara matang perlu dipersiapkan dan direncanakan.

Rencana Tata Ruang yang telah disusun berazaskan serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pembangunan dan adanya pelanggaran oleh sebagian pelaku pembangunan sehingga secara perlahan telah memberikan andil terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya penebangan liar, penambangan liar dan pencemaran limbah industri dll.

## 2.3 Kebijakan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya

### A. Kebijakan Sosial dan Budaya

Tujuan pembangunan sosial budaya adalah terciptanya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang beriman dan bertaqwa, berpendidikan, berkemampuan tinggi dan ulet, terampil, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat berdasarkan falsafah : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehat jasmani dan rohani. Sedangkan sasaran pembangunan sosial budaya adalah terciptanya peran serta masyarakat secara aktif melalui organisasi formil maupun non formal dalam menentukan arah pembangunan Padang Pariaman di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan semangat otonomi daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka strategi dan kebijakan yang diambil adalah :



1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spritual dalam pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat, sehingga semua kebijakan publik yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Memotivasi masyarakat agar mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengisi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman di masa depan.
4. Melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemberantasan penyakit menular, gizi buruk, peningkatan kesehatan ibu dan anak.
5. Terciptanya tenaga kerja terampil untuk mengisi lapangan kerja dan sanggup berkompetisi di bursa tenaga kerja di dalam maupun luar negeri melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan.
6. Memunculkan simbol-simbol kebudayaan daerah dalam kegiatan pembangunan daerah.
7. Peningkatan peran serta perempuan di segala bidang pembangunan yang berbasis gender.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat.
9. Memberdayakan masyarakat dalam bidang politik.

## B. Kebijakan ekonomi

Pembangunan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman bertujuan untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan stabil yang berkelanjutan. Pembangunan diupayakan dapat menghilangkan ketimpangan antar wilayah, pelaku dan antar golongan pendapatan. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan fundamental yang semakin kokoh dalam menghadapi gejolak eksternal di masa mendatang. Disamping itu pembangunan juga diharapkan memberikan hasil, mamnfaat dan dampak yang makin merata antar golongan dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan, kebijakn harus mengarah kepada perbaikan efisiensi dan perbaikan daya saing kegiatan ekonomi di tingkat lokal dan pada tingkat global. Disamping itu juga diperlukan kebijakan yang mengarah kepada perbaikan distribusi penyediaan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan melibatkan peran serta masyarakat, dimana setiap komponen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh akses ekonomi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :



1. Mengembangkan mekanisme pasar berkeadilan melalui perbaikan akses setiap warga masyarakat terhadap pemilikan faktor produksi dan kegiatan ekonomi yang mendapat dukungan pemerintah dengan prinsip pemberdayaan dan pembangunan kemandirian masyarakat secara terbuka dan demokratis.
2. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan terhadap kegiatan usaha yang mengutamakan pemakaian tenaga kerja, bahan baku dan produk yang dihasilkan masyarakat di daerah.
3. Mengembangkan pelayanan publik kepada setiap warga tanpa diskriminasi sehingga mampu menampilkan pemerintah daerah yang adil sesuai tuntutan rakyat yang bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme.
4. Mendorong pembangunan sektor pertanian secara luas yang berbasis tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif ekonomi masyarakat di daerah dan berorientasi kepada kebutuhan pasar di dalam dan luar daerah serta pada pasar ekspor.

#### AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka dituangkan dalam Agenda Pembangunan Padang Pariaman tahun 2006-2010, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
3. Peningkatan Sarana, Prasarana Dasar dan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.
5. Peningkatan Kehidupan Beragama dan Penghayatan Budaya Lokal
6. Peningkatan Kehidupan Sosial dan Politik
7. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
8. Peningkatan Investasi dan Penanaman Modal Daerah
9. Pengembangan Kepariwisata Daerah.
10. Penukungan Pelaksanaan Sembilan Kawasan Strategis.

Pada prinsipnya untuk mencapai agenda dan prioritas pembangunan maka dirumuskan kebijakan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan dan program ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai Visi dan Misi. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi semua stakeholders dalam merumuskan program dan kegiatan. Kesembilan



Agenda Pembangunan tersebut dituangkan dalam Prioritas pembangunan Padang Pariaman Pada Tahun 2007. Prioritas Pembangunan ini disusun berdasarkan pada : (a) Permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah; (b) Isu strategis perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (c) Prioritas kebutuhan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan.

## 1. AGENDA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

### A. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkanlah Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Rangka Pemenuhan Standar Pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan

Program :

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
- Pendidikan Menengah
- Pendidikan Luar Biasa
- Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Manajemen Pelayan Pendidikan

- b. Pelayanan Bidang Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan daya saing Menghadapi Era Globalisasi

Program :

- Peningkatan sarana dan prasarana serta akses pendidikan
- Peningkatan peran stake holder pendidikan
- Pendidikan non formal
- Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Peningkatan Apresiasi seni dan budaya daerah

### b. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat ditetapkan kebijakan :



- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui pemberdayaan perilaku masyarakat terhadap hidup sehat.

Program :

- Obat dan pembekalan kesehatan
- Upaya Kesehatan Masyarakat
- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Perbaikan gizi masyarakat.
- Lingkungan sehat.

- b. Peningkatan pelayanan terhadap kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar serta rujukan dan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan dan gizi masyarakat

Program :

- Pengawasan obat dan makanan.
- Pengembangan obat asli Indonesia
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, wabah/ KLB.
- Standarisasi pelayanan kesehatan.
- Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
- Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Pengembangan SDM aparatur pelayanan kesehatan.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang

- c. Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Program :

- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringan.
- Perencanaan pembangunan rumah sakit daerah

### **C. Peningkatan Pendataan Penduduk dan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana**

- a. Mendorong Peningkatan Perbaikan Kualitas tingkat Kehidupan Keluarga Miskin dan Keluarga Berencana.



Program :

- Keluarga berencana
- Kesehatan reproduksi remaja
- Pelayanan kontrasepsi
- Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
- Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- Pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR
- Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
- Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Program :

- Pengelolaan administrasi kependudukan
- Peningkatan Kualitas dan Cakupan Data Individu penduduk
- Pelayanan Catatan Sipil.
- Pengentasan kemiskinan keluarga dan pelayanan terhadap keluarga miskin

**D. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja serta Transmigrasi**

a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, pembukaan peluang dan kesempatan kerja

Program :

- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga Kerja
- Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- Pengembangan, rehabilitasi sarana prasarana pelatihan tenaga kerja

b. Peningkatan keterampilan dan pembinaan usaha warga transmigrasi

Program :

- Pembinaan ketransmigrasian

**2. AGENDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



## A. Kesejahteraan Sosial

Dalam Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Sosial maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesetiakawanan, kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan menumbuh kembangkan semangat kebersamaan.

Program :

- Pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial
- Bimbingan anak jalanan dan anak terlantar

- b. Menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan.

Program :

- Pengelolaan areal pemakaman.
- Pengembangan dan pembinaan karang taruna

## B. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Prioritas Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Otonomi Nagari

Program

- Peningkatan keberdayaan masyarakat nagari.
- Pengembangan lembaga ekonomi nagari
- Peningkatan partisipasi masyarakat membangun nagari.
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan nagari.
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari.

- b. Pemberdayaan perempuan dan gender

Program :

- Peningkatan peran perempuan di Nagari
- Keserasian kebijakan peningkatan pualitas anak dan perempuan
- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan perempuan





- Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

### **C. Peningkatan Peranan Generasi Muda dan Olah Raga**

Dalam Prioritas Peningkatan Peranan generasi Muda dan Olah Raga ditetapkan kebijakan :

#### **a. Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga**

Program :

- Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- Peningkatan peran serta kepemudaan
- Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

#### **b. Memasyarakatkan olah raga dan menglahragakan masyarakat.**

Program :

- Pengembangan kebijakan dan manajemen Olah raga
- Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
- Peningkatan prestasi dan prestise olah raga.

## **3. AGENDA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DASAR SERTA LINGKUNGAN HIDUP**

### **A. Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan, pos dan telekomunikasi ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

#### **a. Pengembangan Sarana dan Prasarana perhubungan darat, laut dan udara.**

Program :

- Pembangunan Prasarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor.

#### **b. Pengembangan sektor pos dan telekomunikasi**



Program :

- Peningkatan Pelayanan dibidang Pos dan Telekomunikasi

c. Meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan aksesibilitas pelayanan masyarakat.

Program :

- Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- Program Data Base Jalan dan Jembatan

### **B. Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Air**

Dalam Prioritas Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Air ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan jaringan Irigasi dan Pengelolaan sumber daya air

Program :

- Pembangunan Saluran Drainase
- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Penyediaan dan Pengolahan Air baku
- Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
- Pengendalian banjir.

### **C. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

Dalam Prioritas Pembangunan Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Pengendalian dan Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Program :

- Perencanaan tata ruang
- Pemanfaatan Ruang
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pengembangan Wilayah Perbatasan
- Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



- Perencanaan pengembangan Ibu Kota Kabupaten
  - Perencanaan Pembangunan daerah rawan Bencana
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana fisik lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup

Program :

- Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam
  - Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
  - Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan
- c. Upaya Penegakan Pengendalian Dampak Lingkungan
- Program
- Peningkatan pengendalian Polusi
  - Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir laut
  - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. Peningkatan upaya pengembangan hukum lingkungan dan penegakan secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan.

Program :

- Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan laut dan hutan
- Pengendalian Kebakaran hutan'
- Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan
- Rehabilitasi Hutan dan lahan
- Perlindungan dan konservasi Sumber daya hutan
- Pemanfaatan Kawasan hutan industri
- Pembinaan dan penertiban Industri hasil hutan
- Perencanaan dan pengembangan hutan
- Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
- Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam

#### **D. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman**



Dalam Prioritas Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Rumah (papan) yang layak dan terjangkau sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dengan menitik beratkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program :

- Pengembangan perumahan
- Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Perbaikan Perumahan akibat Bencana alam/Sosial
- Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- b. Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman harmonis dan berkelanjutan.

Program :

- Lingkungan sehat perumahan
- Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

- c. Pemenuhan kebutuhan air bersih/minum bagi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat perdesaan.

Program :

- Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Penyediaan dan Pengelolaan air baku

- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Perdesaan

Program :

Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

#### **4. AGENDA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**

##### **A. Peningkatan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa**

Dalam Peningkatan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, bersih dan berwibawa ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah.

Program :



- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Pendidikan kedinasan.
- b. Peningkatan pelayanan yang efektif
- Fasilitas pindah/purna tugas PNS
  - Pembinaan dan pengembangan aparatur

#### **B. Peningkatan Disiplin dan Hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah**

Dalam Peningkatan Disiplin dan Hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah ditetapkan kebijakan kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan.

Program :

- Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
- Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan
- Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

b. Peningkatan disiplin aparatur.

Program :

- Peningkatan Disiplin dan Etos Kerja Aparatur Pemerintah
- Peningkatan produk hukum daerah
- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

#### **C. Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah**

Dalam Prioritas Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah ditetapkan kebijakan kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Rencana Pemindahan Ibu kota Kabupaten

Program :

- Penetapan Ibu Kota kabupaten
- Pembangunan Ibu Kota Kabupaten



- Pembangunan sarana dan prasarana di ibu kabupaten baru
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.

Program :

- Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana kantor
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

#### **D. Penataan Struktur dan Organisasi Lembaga Daerah**

Dalam Prioritas Pembangunan Penataan Struktur dan Organisasi Lembaga Daerah ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Termasuk Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas.

Program :

- ✓ Rasionalisasi Kelembagaan dan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- ✓ Penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah.

- b. Meningkatkan profesionalisme kinerja perangkat daerah

Program :

- ✓ Kajian terhadap personel yang menduduki struktur organisasi
- ✓ Kajian kebijakan disiplin aparatur
- ✓ Analisis pengembangan profesionalisme aparatur

#### **E. Peningkatan Perencanaan Pembangunan dan Pemerintahan Umum Daerah**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan Perencanaan Pembangunan dan Pemerintahan Umum Daerah ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah

Program :

- ✓ Pengembangan data dan informasi
- ✓ Kerjasama pembangunan
- ✓ Pengembangan wilayah perbatasan
- ✓ Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh



- ✓ Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan kecil
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- ✓ Perencanaan pembangunan daerah
- ✓ Perencanaan pembangunan ekonomi
- ✓ Perencanaan sosial dan budaya
- ✓ Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
- ✓ Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- ✓ Pengembangan data, informasi dan statistik daerah.

b. Peningkatan pemerintahan umum daerah

Program :

- ✓ Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- ✓ Peningkatan pelayanan kedinasan kepala/wakil kepala daerah
- ✓ Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- ✓ Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari
- ✓ Peningkatan sistim pegawai internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- ✓ Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- ✓ Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- ✓ Penataan peraturan perundang-undangan
- ✓ Perbaikan sistim administrasi kearsipan
- ✓ Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

## 5. AGENDA PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PENGHAYATAN BUDAYA LOKAL

### A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan serta Kehidupan Beragama

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan serta Kehidupan Beragama ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Peningkatan peranan mesjid dan surau sebagai sarana kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Program :

- Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.



- Peningkatan kembali kesurau dan mengoptimalkan fungsi tungku tigo sajarangan ditengah-tengah masyarakat.
- Peningkatan prestasi dan kompetensi keagamaan

b. Peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap kehidupan beragama ditengah masyarakat.

Program :

- Peningkatan pendidikan keagamaan
- Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama
- Peningkatan kualitas SDM aparatur dan lembaga –lembaga sosial keagamaan.

**B. Peningkatan dan Penghayatan Budaya Lokal**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Penghayatan Budaya Lokal ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam melestarikan, memanfaatkan dan pengelolaan nilai-nilai budaya daerah.

Program :

- ✓ Pengembangan nilai budaya
- ✓ Pengelolaan kekayaan budaya
- ✓ Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Budaya Minangkabau).

Program :

- ✓ Pengelolaan keragaman budaya
- ✓ Pembinaan seni dan budaya tradisional

**6. AGENDA PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK**

**A. Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban.





Program :

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

b. Peningkatan Pengamanan bencana yang profesional dan berbasis masyarakat

Program :

- Peningkatan sistem dan manajemen penanggulangan bencana

c. Peningkatan komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Program :

- Peningkatan kemampuan kelembagaan politik
- Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- Pengembangan Budaya Politik Lokal sebagai pilar pendukung sistem politik Nasional
- Pembinaan Stabilitas Sosial Politik
- Pengawasan dan fasilitasi Bantuan Keuangan pada partai Politik

## **B. Peningkatan dan Penataan Lembaga Sosial Masyarakat**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Penataan Lembaga Sosial Masyarakat ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Penataan Civil Sosial organisasi

Program :

- Pembinaan dan peningkatan kemampuan ormas dan LSM dalam penataan organisasi
- Keterlibatan CSO dalam pembangunan yang transparansi dan akuntabel

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Program :

- Pembinaan Kesatuan Bangsa
- Kemitraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tertib hukum sebagai landasan dalam pergaulan sehari-hari

Program :

- Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Pemberantasan Narkotika dan Obat-obat berbahaya

## 7. AGENDA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

### A. Peningkatan dan pengembangan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan dan pengembangan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program :

- Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

- b. Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Skala Besar.

Program :

- Peningkatan kapasitas iptek sistim industri
- Pengembangan industri kecil dan menengah
- Peningkatan kemampuan teknologi industri
- Pengembangan sentra-sentra industri potensial

- c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Penguatan Modal

Program :

- Pengembangan Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran KUKM

- d. Pengembangan Perdagangan dan Promosi Daerah yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Program :



- Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Peningkatan dan pengembangan ekspor
- Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Pengembangan Pasar Spesifik Komoditi unggulan
- Promosi, Pemasaran dan Operasi Pasar.
- Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Produk/Komoditi Unggulan.
- Pengembangan dan penataan pasar nagari.

#### **B. Peningkatan Sektor Pertambangan dan Energi**

Dalam Peningkatan Sektor Pertambangan dan Energi ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya bahan galian dan energi.

Program :

- Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

- b. Optimalisasi ketersediaan Kelistrikan dan BBM

Program :

- Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- Optimalisasi jalur distribusi BBM

#### **C. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pertanian dan Perkebunan

Program :

- ✓ Pengembangan kesejahteraan petani
- ✓ Peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan
- ✓ Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan
- ✓ Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan
- ✓ Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan



- ✓ Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

b. Pengembangan Peternakan

Program :

- ✓ Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- ✓ Peningkatan produksi hasil peternakan
- ✓ Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- ✓ Peningkatan penerapan teknologi peternakan

c. Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal.

Program :

- ✓ Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
- ✓ Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
- ✓ Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- ✓ Peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
- ✓ Pengembangan budidaya perikanan
- ✓ Pengembangan perikanan tangkap
- ✓ Pengembangan sistim penyuluhan perikanan
- ✓ Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- ✓ Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

## 8. AGENDA PENINGKATAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

### A. Peningkatan investasi dan Penanaman Modal Daerah

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan investasi dan Penanaman Modal Daerah ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi

Program :

- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi



- Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.
- b. Peningkatan Pelayanan dan Prosedur Perizinan.

Program :

- Pengembangan pelayanan dan perizinan
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

#### **B. Peningkatan Usaha Daerah**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan Usaha Daerah ditetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Pengembangan usaha daerah

Program :

- ✓ Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
- ✓ Pengembangan penanaman modal pemerintah daerah

### **9. AGENDA PENINGKATAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

Dalam Prioritas Pembangunan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Promosi Kepariwisata ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Promosi Pariwisata Daerah

Program :

- ✓ Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- ✓ Pengembangan Destinasi Pariwisata
- ✓ Pengembangan Kemitraan Kepariwisata

### **10. AGENDA PENSUKSESAN PELAKSANAAN SEMBILAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **A. Pengembangan Kawasan Makam Syech Burhanuddin**

Dalam Prioritas Pengembangan Kawasan Makam Syech Burhanuddin ditetapkan kebijakan sebagai berikut

- a. Perumusan Kesepakatan Pola Pengelolaan Kawasan Makam Syech Buhanuddin antara Pemerintah, Nagari dan Swasta



Program :

- ✓ Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- ✓ Pengembangan Nilai Agama dan Budaya

#### **B. Pengembangan *Rest Area* Malibou Anai**

Dalam Prioritas Pengembangan *Rest Area* Malibou Anai ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

##### **b. Regulasi dan Promosi *Rest Area* Malibou Anai**

Program :

- ✓ Pengembangan Wilayah Perbatasan
- ✓ Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- ✓ Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- ✓ Pengembangan Destinasi Pariwisata

#### **C. Pengembangan *Central Business District* (CBD)**

Dalam Prioritas Pengembangan *Central Business District* (CBD) ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Penetapan Regulasi dan kemudahan dalam berinvestasi**

Program :

- ✓ Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- ✓ Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi

#### **D. Pengembangan Embarkasi Haji**

Dalam prioritas pengembangan Embarkasi Haji ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Legalisasi penetapan lokasi embarkasi haji di Kabupaten Padang Pariaman**

Program :

- ✓ Pembangunan Embarkasi Haji

#### **E. Pengembangan Gerbang Bandara**

Dalam Prioritas Pengembangan Gerbang Bandara ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Percepatan Pembangunan *Fly Over* Duku**

Program :



- ✓ Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- ✓ Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

#### **F. Pengembangan Kota Mandiri**

Dalam Prioritas Pengembangan Kota Mandiri ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Masa Depan

Program :

- ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

#### **G. Pengembangan Terminal Bus**

Dalam prioritas Pengembangan Terminal Bus ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penetapan Lokasi Terminal Bus

Program :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.



### BAB III

## ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Analisis Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006, merupakan gambaran lingkungan dalam rangkaian yang utuh meliputi :

- a. Kondisi atau status (*state*) lingkungan baik lingkungan alam, lingkungan buatan maupun lingkungan sosial serta isu-isu lingkungan yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan secara transparan.
- b. Tekanan (*pressure*) yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup beserta analisisnya.
- c. Dampak (*impact*) yang terjadi akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- d. Langkah-Langkah Penanggulangan (*response*) yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh segenap lapisan masyarakat; keberhasilan dan kegagalan yang dialami, upaya penataan dan penegakkan hukum, tantangan, kendala dan hambatan dalam upaya melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan.

Dengan pendekatan ini telah dilakukan analisis secara kausatif yang menjadi penyebab tekanan, sehingga terjadi perubahan terhadap lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan alami, maupun perubahan lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Hasil analisis terhadap perubahan kondisi lingkungan, baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan sebagai akibat adanya tekanan akan menjadi dasar dalam pengambilan tindakan (*respon*) oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun oleh segenap lapisan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan atau tindakan pemulihan lingkungan. Sementara itu tingkat kesadaran masyarakat serta aktifitas masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan melengkapi hasil analisis terhadap perubahan lingkungan.

Analisis ini juga akan mengungkapkan program perencanaan dalam bidang lingkungan hidup yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya mengendalikan perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik. Disamping itu juga akan mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat dan keikut sertaannya melakukan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kebijakan sosial ekonomi dan budaya dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Evaluasi ini juga merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban





publik dalam menjalankan / menentukan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan serta sebagai sarana pendidikan untuk kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, analisis lingkungan dan evaluasi kebijakan akan difokuskan kepada isu lingkungan yang terjadi selama tahun 2006. Analisis lingkungan dan evaluasi kebijakan pembangunan di daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan tahun sebelumnya dan kecenderungannya selama lima tahun terakhir dalam kaitannya terhadap status keberadaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia di Kabupaten Padang Pariaman, seperti yang telah disajikan dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005, RPJP, RPJM, RKPD Kabupaten Padang Pariaman, Matriks Kegiatan Tahunan dan data pendukung lainnya.

### **3.1 Sumberdaya Alam**

#### **A. Banjir, Longsor dan Abrasi Pantai**

Sebagai daerah yang sebagian besar merupakan dataran rendah, permasalahan banjir patut untuk diwaspadai. Kabupaten Padang Pariaman dialiri oleh 11 buah sungai dimana diantaranya terdapat 2 sungai besar. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Batang Anai, dan Batang Mangau. Bencana banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Padang Pariaman, terutama pada saat curah hujan tinggi. Permasalahan banjir ini ternyata masih belum mampu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun telah dibenahi berbagai sarana untuk pengendalian banjir.

Penyebab dari permasalahan banjir di Kabupaten Padang Pariaman ini tak lepas dari berbagai faktor, di samping faktor curah hujan dan fluktuasi gelombang laut adalah seperti pembukaan lahan pada hulu sungai yang menyebabkan erosi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai. Hal tersebut mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kurangnya kapasitas tampung sungai yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya banjir di daerah ini. Faktor adanya pembuangan dan penumpukan sampah pada sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena hal ini akan memperlambat dan menyumbat aliran air.

Peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2006 ini cenderung meningkat dan semakin meluas. Hal ini tentu bakal menimbulkan berbagai macam kerugian. Permasalahan ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan instansi terkait sebagai pembuat kebijakan serta seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.



### 1) Kondisi Lingkungan

Permasalahan banjir merupakan fenomena alam dan termasuk bencana geologi yang tidak dapat di pisahkan dengan masalah lingkungan hidup dan aktifitas manusia. Daerah rawan banjir di Kabupate Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, Batang Gasan, dan 2x11 Enam Lingkung. Lokasi, kondisi dan dampaknya dapat diketahui dari tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1. Lokasi Banjir dan Abrasi di Kabupaten Padang Pariaman**

NO	KECAMATAN	LOKASI	LUAS (HA)
1	Batang Anai	1. Duku 2. Kasang	277,27
2	VII Koto Sungai Sariak	1. Lubuk Puar 2. Tanjung Dama	115,00
3	Nan Sabaris	1. Sunur Barat 2. Batas Kota	7,39 83,39
4	Sungai Limau	1. Paingan 2. Kalampaian 3. Padang Bintungan 4. Kamumuan dan Sungai Sirah	47,72 27,85 19,22 31,56
5	Batang Gasan	1. Piliang 2. Tanjung 3. Manggis 4. Koto Muaro	31,04 116,48 59,38 10,35
6	Koto Aur Malintang	1. Koto Muaro	38,41
Jumlah			861,49

Sumber : *Up Dating Kawasan Rawan Dampak di Propinsi Sumatera Barat*

Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas 132.879 ha, dari luas tersebut 861,49 ha, merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap banjir, sekitar 50% adalah merupakan kawasan pemukiman. Banjir yang mendera Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya terus cenderung meningkat. Hampir sepanjang pantai pada bagian utara Kabupaten Padang Pariaman mengalami gejala abrasi yang sangat kuat, sehingga dapat mengancam pemukiman penduduk yang berdomisili di sekitar kawasan pantai. Bahaya abrasi diketahui berdasarkan hasil pengukuran pada daerah tersebut yaitu terjadinya kemunduran garis pantai lebih kurang 6 meter per tahun.

Daerah rawan longsor dijumpai di daerah-daerah yang memiliki lereng lebih dari 45% dengan tekstur tanah berpasir, galir dan patahan, seperti Kecamatan Sungai Geringging, 2 x 11 Enam Lingkung, Batang Gasan, V Koto Kampung Dalam dan Kecamatan Sungai Limau serta Kec. IV Koto Aur Malintang. Potensi longsor dapat juga disebabkan oleh lapisan kedap air yang dapat menjadi longsoran.



Drainase merupakan salah satu prasarana lingkungan permukiman yang sangat penting, Karena berfungsi sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga ataupun air hujan. Penurunan kualitas lingkungan sering terjadi karena tidak berfungsinya lagi atau tidak adanya drainase yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah ataupun mengaliri air hujan sehingga masih sering ditemukan terjadinya banjir ataupun genangan limbah rumah tangga di pusat-pusat permukiman ataupun di pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar. Panjang saluran drainase yaitu 60.065 meter yang terdiri dari saluran primer 17.000 m dengan kondisi sedang 12.000 meter dan rusak 5.000 meter, sedangkan saluran sekunder berkondisi baik 2.790 meter, kondisi sedang 20.765 dan kondisi rusak 19.510 meter. atau 41 % drainase berkondisi rusak.

## 2) Tekanan dan Dampak

Penyebab dari bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan air sudah mulai rusak, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir.

Banjir sepertinya sudah akrab dengan Kabupaten Padang Pariaman, dan hampir setiap tahun daerah ini dilanda banjir. Daerah yang merupakan langganan banjir di wilayah ini pada umumnya adalah daerah kerendahan, cekungan dan daerah pinggiran sungai. Berdasarkan terminologi banjir, banjir yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dapat dibedakan atas dua jenis yaitu banjir genangan yang disebabkan terjadinya genangan pada suatu areal akibat dari hujan deras, yang tidak dapat mengalir, dan lambat keluar dari areal tersebut dan banjir luapan sungai/kiriman yang berasal dari hujan deras yang turun di bagian hulu DAS yang menggenangi dataran rendah yang telah dimanfaatkan dan semula merupakan dataran banjir (*flood plain*). Pada umumnya banjir di Kabupaten Padang Pariaman tergolong pada banjir genangan. Sebagai contoh adalah lokasi banjir yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan wilayah, pemukiman dan areal usaha memasuki areal dataran banjir yang sebenarnya diperlukan untuk tempat penampungan air banjir sementara sebelum mengalir ke daerah tampungan alami (*Retarding Basin*), atau ke laut. Semakin luas areal dataran banjir ditempati manusia, hal ini menjadikan masalah banjir pun semakin meningkat. Selanjutnya kondisi tersebut di atas lebih di perparah dengan adanya beberapa faktor dibawah ini :

- a. Posisi geografis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di daerah Khatulistiwa yang beriklim tropis basah dengan curah hujan yang tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2005 rata-rata curah



- hujan tahunan mencapai 5.063 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 172. Distribusi curah hujan merata sepanjang tahun dengan jumlah bulan basah lebih dari 10 bulan.
- b. Pengaruh pasang air laut akibat kondisi topografi wilayah pesisir pantai yang kerendahan, mempunyai elevasi min. 0,5 diatas permukaan laut. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya "back water" pada sungai akibat pasang air laut, sehingga bagian muara sungai berpotensi menjadi sasaran luapan sungai terutama pada saat musim penghujan.
  - c. Perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan "surface run off" (erosi permukaan tanah).
  - c. Pendangkalan pada dasar sungai karena sedimentasi dari erosi permukaan, longsoran tebing sungai dan bahan-bahan lepas lainnya. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai akan mengurangi kapasitas tampung sungai.
  - e. Pembuangan sampah secara kurang tertib pada saluran-saluran drainase dan pada sungai, hal ini akan memperlambat gerakan air.

Sedikitnya ada empat faktor utama kondisi lingkungan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap terjadinya banjir di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu : iklim, kondisi sungai, saluran drainase dan peruntukan lahan.

**a. Iklim**

Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman mempunyai curah hujan rata-rata tahunan sangat tinggi. Pada tahun 2006 curah hujan tahunan mencapai 5.063 mm dengan jumlah hari hujan 172. Kondisi curah hujan tersebut jauh melebihi pada tahun 2005 sebesar 3.829 mm dan jumlah hari hujan 119.

**b. Sungai**

Faktor sungai berhubungan dengan kapasitas tampung dan debit aliran. Berdasarkan pada observasi lapangan, kapasitas tampung sungai sangat memprihatinkan terutama pada bagian hilir (*down stream*) sungai Batang Anai telah mengalami pendangkalan dan penyempitan badan sungai akibat tingginya kandungan sedimen, sampah organik dan an organik, serta dipenuhi oleh gulma air pada bagian pinggir sungai. Kondisi ini menyebabkan daya tampung sungai menjadi terbatas dan potensi luapan air sungai meningkat terutama pada kondisi aliran ekstrim.



*c. Saluran Drainase*

Faktor penyebab utama terjadinya genangan air atau banjir adalah ketersediaan saluran drainase yang minim. Sementara kawasan banjir luasnya mencapai 861,49 Ha. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa saluran drainase masih jauh dari yang diharapkan, yakni 20 % dari kebutuhan, sehingga masih banyak kawasan rawan banjir yang belum terbebaskan. Kondisi ini diperparah lagi oleh perilaku manusia, terutama saluran drainase yang melalui pemukiman padat penduduk yang menjadikan saluran drainase tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Di samping itu tidak sinkronnya saluran drainase dari suatu kawasan ke kawasan pemukiman lainnya, yang mengakibatkan air tidak menemukan tempat pembuangan akhir.

*d. Peruntukan Lahan*

Perubahan peruntukan lahan akan berpengaruh terhadap aliran permukaan dan kemampuan resapan air ke dalam tanah. Perubahan peruntukan lahan dari areal bervegetasi menjadi areal terbangun secara nyata akan memperbesar aliran dan genangan permukaan. Perubahan ini cenderung meningkat setiap tahunnya sejalan dengan kebutuhan atau pembangunan kawasan untuk pemukiman dan bangunan Kabupaten Padang Pariaman seluas 132.879 Ha, yang terdiri dari 17 kecamatan. Luas keseluruhan ini meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan/permukiman dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan yaitu 28,49 % dari luas Kabupaten Padang Pariaman, kemudian perkebunan sebanyak 26,40 % dan sawah seluas 21,38 % dari luas Kabupaten Padang Pariaman.

**3) Respons Pemerintah dan Masyarakat**

Pada tahun 2003 Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Propinsi Sumatera Barat melalui Pemerintah Pusat menerima dana bantuan OECF Jepang paket III Proyek Pengendalian Banjir di Kabupaten Padang Pariaman untuk normalisasi sungai Batang Anai dan dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah kecamatan Batang Anai. Upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991, tentang Sungai dan Aspek Pembinaan Sungai. Aspek pembinaan sungai tersebut terdiri dari : perlindungan sungai, pengembangan sungai, penggunaan sungai dan pengendalian sungai. Penanganan banjir luapan/kiriman dengan mengupayakan agar air banjir tidak meluap keluar dari sistim sungai yang bersangkutan yang telah dilengkapi dengan suatu sistem pengendali banjir.

Penanganan banjir genangan/lokal dilakukan dengan komponen utamanya. Meskipun kebijakan pemerintah dalam pengendalian banjir telah dilakukan secara terstruktur, akan tetapi upaya tersebut belum



memberikan hasil yang optimal karena masih banyak kawasan yang belum terbebaskan dari banjir. Hal ini dapat dimaklumi karena komponen utama pengendalian banjir jumlahnya sangat terbatas, terutama sistem drainase, baik drainase primer, sekunder dan tersier.

Respon masyarakat dalam penanggulangan banjir masih saja rendah. Masih banyak warga masyarakat memanfaatkan sungai dan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Upaya pemerintah kabupaten secara persuasif agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengendalian banjir sampai saat ini masih tetap diupayakan mulai dari pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat Nagari.

Upaya penanggulangan bencana alam longsor lahan pada kawasan hutan dapat ditanggulangi dengan memperhatikan dan mempedomani peta analisis bahaya dan resiko longsor lahan. Peta bahaya longsor lahan merupakan peta yang berisikan informasi karakteristik fisik daerah penyebab longsor lahan. Sebagai langkah awal upaya penanggulangan bencana longsor lahan adalah mencegah terjadinya longsor. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan menurunkan nilai harkat yang cukup tinggi dalam tabel analisis tingkat bahaya longsor lahan.

Penanggulangan resiko longsor lahan dapat dilakukan dengan mempedomani peta resiko longsor lahan yang berisikan informasi kemungkinan timbulnya kerugian baik harta benda maupun korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana alam longsor lahan. Adanya bantuan foto udara dalam skala memadai, sedangkan upaya perbaikan daya dukung lahan akan membutuhkan waktu cukup lama, dan kondisi lereng yang cukup curam, disarankan upaya mitigasi yang dilakukan adalah dengan melakukan relokasi warga yang terancam bahaya longsor ke tempat yang lebih aman. Disamping itu pada kawasan dengan lereng yang curam perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap bahaya longsor lahan dan erosi melalui penanaman pohon-pohon pelindung yang mampu mengurangi tingginya faktor *erosivitas* lahan.

## **B. Lahan Kritis dan Alih Fungsi Lahan**

Permasalahan lingkungan yang terus dan semakin menjadi perhatian serius yang dapat kita cermati secara bersama adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah, hal ini akan menambah lahan kritis di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan segala kebijakannya, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab segenap unsur masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti



pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistim ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya,. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (*catchment area*) Kabupaten Padang Pariaman yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan masih cenderung untuk terus bertambah di Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut diatas jelas akan menjadikan timbulnya tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan. Keadaan ini sudah sepatasnya untuk diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, pola perubahan ini harus dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.

### 1) Kondisi Lingkungan

Secara geomorfologis, kondisi alam wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan dataran rendah yang terdiri dari dataran pantai dan dataran aluvial, serta wilayah perbukitan. Daerah perbukitan mempunyai kemiringan lereng yang bervariasi, dan hampir 65% daerah perbukitan tersebut mempunyai kemiringan agak curam. Berdasarkan pada kondisi tanah, wilayah Kabupaten Padang Pariaman terdapat 6 jenis tanah yaitu : Aluvial, Regosol, Organosol, Podsolik, Latosol dan Andosol. Pada dataran rendah terdapat jenis tanah Aluvial, Regosol dan Organosol, sedangkan pada daerah perbukitan didominasi oleh jenis tanah Podsolik, dan Latosol. Seperti diketahui jenis tanah Podsolik dan Latosol ini tergolong peka terhadap erosi. Disamping itu tanah ini juga mempunyai tingkat kesuburan rendah yang dicirikan dengan pH tanah yang asam, kandungan unsur hara dan bahan organik rendah, serta kemampuan tanah untuk meloloskan dan menyimpan air rendah. Pada umumnya lahan kritis di wilayah Kabupaten Padang Pariaman tersebar pada kedua jenis tanah ini.



## 2) Tekanan dan Dampak

Pada umumnya sebaran lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman berada pada areal perbukitan, dimana areal perbukitan tersebut merupakan daerah hulu dari daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dampak dari keberadaan lahan kritis tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis wilayah DAS. Kondisi ini dapat dilihat sepanjang tahun 2006, utama yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Batang Anai, Batang Mangau dan Batang Gasan menunjukkan nilai *koefisien run off* (c) dan Koefisien Region Sungai (KRS) tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan kondisi ketiga DAS tersebut berada pada kondisi buruk

Dampak lain dari keberadaan lahan kritis tersebut dapat dilihat ketika terjadi hujan diatas normal pada wilayah DAS bagian hulu. Pada kondisi ini debit sungai relatif lebih tinggi dan disertai warna air yang keruh oleh bahan-bahan sedimen, yang selanjutnya bahan-bahan sedimen tersebut akan diendapkan di sekitar muara sungai. Kondisi yang ekstrim dapat dilihat pada muara sungai Batang Arau, dimana telah terjadi pendangkalan dan banyak tumpukan bahan-bahan sedimen pada bagian pinggir sungai. Hal ini jelas akan mengurangi kapasitas tampung sungai dan penyempitan badan sungai.

Terjadinya erosi tanah merupakan tahap awal proses degradasi lahan yang selanjutnya akan menjadi lahan kritis. Di samping faktor kecuraman lereng dan kepekaan tanah terhadap erosi (*erodibilitas tanah*), di daerah tropis basah faktor curah hujan (erosivitas lahan) memberikan kontribusi yang nyata terjadinya erosi. Dari data curah hujan menunjukkan bahwa curah hujan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai 5.000 mm per tahun, dengan intensitas hujan yang tinggi maka potensi terjadinya erosi tergolong tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya lahan kritis adalah faktor manusia dalam hal pengelolaan lahan. Praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan pelestarian sumberdaya lahan akan mempercepat terjadinya erosi (*accelerated erosion*) dan penurunan kualitas lahan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya lahan kritis adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Cara ini akan mempercepat *degradasi* lahan karena kerusakan sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
2. Praktek pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga menyebabkan kemerosotan kesuburan tanah secara drastis.
3. Perladangan berpindah yang sampai saat ini masih saja berlangsung. Perladangan berpindah merupakan bentuk kegiatan pertanian yang bersifat tradisional dan termasuk salah satu penyebab timbulnya lahan kritis.





4. Kegiatan pertanian yang menguras unsur hara tanaman tanpa dilakukan pemberian masukan (*input*), seperti pemupukan, baik pupuk organik maupun pupuk an organik.

### 3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Untuk pemulihan lahan kritis tersebut, Pemerintah telah mencanangkan upaya rehabilitasi lahan kritis melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan GNRHL, pemerintah telah menggunakan pendekatan melalui pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah juga telah melakukan penyuluhan dan menetapkan pendamping untuk keberhasilan program GNRHL tersebut. Sebagai salah satu insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi lahan yang dikuasainya, maka disamping jenis kayu-kayuan jenis yang akan ditanam di luar kawasan hutan adalah jenis tanaman serbaguna MPTS (*Multipurpose Tree Species*) atau Tanaman Unggul Lokal (TUL).

### C. Pencemaran Sungai

Yang dimaksud dengan pencemaran sungai dalam hal ini adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sungai, sehingga kualitas air sungai tersebut menjadi turun dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Terjadinya pencemaran air sungai merupakan salah satu efek sampingan dari peningkatan jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan industri serta efek samping dari penggunaan sumber daya alam yang kurang ramah lingkungan.

Peningkatan sektor industri di Kabupaten Padang Pariaman sesungguhnya telah memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun sebaliknya, keberadaan industri-industri tersebut juga memberikan tekanan terhadap lingkungan sungai yang bersepadan dengannya. Berbagai macam hasil sampingan dari industri di atas, seperti limbah padat dan cair akan dapat mencemari air sungai, jika tidak dikelola dengan baik. Disamping itu, berkembangnya industri, juga telah mendorong penggunaan sumberdaya alam (SDA) yang lebih banyak sehingga cadangan SDA yang tersedia cenderung makin berkurang.

Pencemaran terjadi karena kurangnya kesadaran dan kearifan manusia sebagai pelaku dari suatu kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Alokasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam mengendalikan dan mengelola lingkungan masih bersifat *insidental* karena belum dimasukkan dalam struktur anggaran perusahaan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya dan terbatasnya prasarana pengelolaan lingkungan yang tersedia akan dapat mendorong terjadinya pencemaran dalam wilayah sungai dan lingkungan lainnya.



## 1) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan bentuk dan jumlah kegiatan manusia di sempadan sungai / DAS di atas, tampak bahwa pada tahun 2006 ini, Batang Anai masih menunjukkan kondisi pencemaran ringan sampai sedang. Indikator telah terjadinya pencemaran air pada sungai di atas dapat diamati secara fisik dan kimia. Secara fisik tampak dengan adanya *siltasi* (pelumpuran dan sedimentasi) yang ditunjukkan oleh adanya delta-delta kecil (agradasi) serta gulma air dalam badan sungai di beberapa tempat terutama di daerah tengah (mid areas) dan muara sungai. Selanjutnya air sungai sangat mudah keruh pada saat hujan tidak terlalu besar.

Secara kimia tampak dari beberapa parameter seperti nilai Coliform, dan coli tinja, BOD, COD, PO<sub>4</sub>, Amoniak, minyak/lemak, Kandungan bahan padatan tersuspensi (TSS), serta beberapa jenis logam berat terutama oleh Zn dan Cu. Nilai parameter di atas tampak telah berada di atas nilai baku mutu kualitas air, seperti tertuang dalam PP No. 82 tahun 2001 dan SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-31-33 tahun 1996.

Adanya bahan pencemar di atas di dalam badan air yang ada akan dapat menguras kandungan oksigen terlarut, Kondisi ini tentu akan dapat mengganggu berbagai proses kehidupan dalam perairan tersebut dan mengurangi kemampuan air sungai untuk memulihkan dirinya secara alamiah. Oksigen dalam perairan selain dimanfaatkan untuk proses respirasi berbagai biota air secara umum, tetapi secara kimia juga terjadi berbagai proses oksidasi bahan dalam badan perairan tersebut .

## 2) Tekanan dan Dampak

Terjadinya penurunan kualitas air (pencemaran) dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh banyak penyebab/tekanan. Penyebab tersebut bervariasi untuk setiap macam ekosistemnya, seperti untuk pencemaran sungai penyebabnya adalah kegiatan Rumah Tangga / domestik / pertanian / perikanan, pasar, industri, workshop / bengkel, rumah sakit, transportasi laut (kapal/perahu nelayan) serta kerusakan daerah *catchment* / sempadan dan badan sungai. Dari sungai yang ada, tampak sungai Batang Anai menunjukkan kondisi pencemaran yang sedang - berat dengan penyebab yang sangat kompleks. Rincian dari masing kegiatan yang dapat menjadi penyebab pencemaran sungai Batang Anai dan beberapa sungai utama di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

### 1. *Limbah Rumah Tangga/ Domestik dan Pasar*

Hampir sebagian besar sepanjang bantaran sungai dan anak sungai utama di Kabupaten Padang Pariaman terdapat daerah pemukiman. Kondisi pemukiman makin lama tampak terus berkembang sejalan perkembangan teknologi *Real Estat* dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut tampak sebagian ada yang menggunakan sungai sebagai tempat aktivitas



Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) serta tempat membuang sampah. Berdasarkan prediksi kasar beban pencemaran dapat didekati menggunakan standar WHO untuk limbah padat dan pendekatan perhitungan NKLD untuk limbah cair. Berdasarkan standar WHO diatas, kapasitas produksi sampah untuk masyarakat menengah ke bawah adalah 250 kg/orang/tahun untuk limbah padat.

Kondisi serupa untuk tahun 2006 ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk dan kebutuhan akan lahan perumahan, serta didorong oleh sebagian besar rumah mereka berada pada daerah sempadan sungai dengan dapurnya menghadap ke sungai sehingga buangan rumah tangga lebih gampang dibuang ke sungai, serta kurang rasa kesadaran akan kebersihan sungai dan tidak menyadari bahaya yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Indikasi ke arah tersebut secara visual sudah tampak terjadi di muara Batang Anai, karena air sungai tampak sangat kotor (berwarna hitam), banyak tumpukan sampah dan bangkai kapal, serta kadang-kadang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap.

Jika tidak ada penertiban perumahan liar di daerah sempadan sungai dan penyediaan TPS serta mobil pengangkutan sampah yang mencukupi yang mungkin dapat diakses ke lokasi tersebut, atau jika ada frekuensi pengambilan sampahnya sangat terbatas disebabkan kekurangan armada dan tenaga, atau kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kearifan masyarakat tentang kebersihan lingkungan daerah sempadan sungai, maka beban pencemar dari sektor domestik akan sulit diatasi.

## **2. Limbah Pertanian & Perikanan**

Daerah sempadan sungai utama di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besarnya merupakan daerah pertanian baik sawah, ladang, bahkan daerah pemukiman dan kegiatan industri. Daerah sempadan sungai tersebut seharusnya menjadi daerah penyangga sungai, namun saat ini telah banyak berubah fungsi. Hampir 90 % daerah tersebut merupakan daerah sawah dan sekitar 10 % menjadi areal pemukiman (Bapedalda Sumbar 2003). Untuk menunjang kegiatan pertanian seperti sawah air dan kolam baik air tenang dan deras menggunakan air sungai dan anak sungai yang ada, sebagian air sungai tersebut ada yang dibuang kembali ke sungai yang bersangkutan tetapi ada juga ke tempat lain. Untuk meningkat hasil pertaniannya, para petani telah terbiasa menggunakan pupuk dan pestisida. Bahan pupuk dan pestisida, serta sisa makanan ikan tersebut sebagian ada yang terbawa bersama air buangannya ke kanal / irigasi / saluran. Akhirnya masuk kembali ke sungai utama berupa bahan terlarut baik dalam bentuk nitrogen dan fosfat terlarut atau bukan.

Durum (1981) menyatakan bahwa, kurang lebih 10 % N dan 5 % P terdapat dalam limbah cair dari daerah pertanian yang masuk ke sungai melalui badan air terdekat atau air salurannya. Jika kebiasaan petani secara umum untuk setiap kali tanamnya minimal membutuhkan 50 kg N/ha dan 25 kg P/ha dengan masa tanam dua kali pertahun. Jika areal tersebut dalam pengolahannya menggunakan pupuk kimia organik dan



anorganik serta pestisida, dan jika penggunaan bahan tersebut kurang dikelola dengan bijak, maka air buangan dari areal pertanian tersebut akan dapat memicu turunnya kualitas air Batang Anai.

Selain itu, air yang keluar dari areal pertanian kadang-kadang juga membawa bahan tersuspensi seperti lumpur yang dapat mengeruhkan sungai utama. Kondisi ini tentu juga akan dapat meningkat nilai Nitrogen, fosfat dan bahan padatan tersuspensi (TSS) dan bahan padatan terlarut (TDS) dalam sungai, serta mungkin juga terdapat berbagai bentuk bahan organochlor /pestisida (belum ada data) dalam sungai utama dalam Kabupaten Padang Pariaman.

### **3. *Limbah Industri dan Aktivitas Workshop, Transportasi Laut Rumah Sakit dan Hotel***

Pada beberapa lokasi di daerah sempadan Batang Anai terdapat beberapa industri /pabrik seperti pabrik minyak sawit dan pabrik olahan kelapa. Effluent dari kegiatan di atas seharusnya telah melalui proses pengolahan limbah yang baik sebelum dibuang ke lingkungan (baik melalui drainase atau ke sungai). Berdasarkan monitoring Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman (2005) dan data PSDA Sumbar (2005) ternyata tidak semua badan usaha di atas memiliki sistem IPAL yang memenuhi kriteria baik, kadang-kadang IPALnya tidak dioperasikan secara optimal, bahkan ada pula yang tidak memiliki sistem IPAL atau dokumen pengelolaan lingkungan (UKL/UPL, AMDAL atau DPL).

Kondisi ini tentu akan dapat memberikan tekanan terhadap tingginya nilai TSS, TDS, konsentrasi nitrogen terlarut, kandungan coliform dan coli tinja, BOD dan COD dalam sungai yang menerima limbah tersebut. Bahkan pada beberapa usaha tertentu dapat juga berkontribusi logam berat (Zn dan Cu) dan cecekan oli.

### **4. *Kerusakan Daerah Catchment, Sempadan Sungai dan Badan Sungai***

Ketersediaan air sungai utama dalam Kabupaten Padang Pariaman secara kuantitas dan kualitas sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi daerah *catchment* hulu/DAS hulunya. Kondisi daerah hulu tersebut tampak sudah mulai terganggu/ rusak oleh berbagai aktivitas manusia seperti penebangan kayu secara liar, pembukaan hutan untuk ladang, dan pengambilan Galian C, belum termasuk penambangan liar oleh masyarakat. Di samping itu, juga telah terjadi kerusakan pada badan sungai baik pada palung dan tebing sungai akibat pengambilan galian C atau juga tebing sungai rusak terkikis secara alamiah karena banjir di daerah hulu dan daerah tengahnya.

Adanya kerusakan tersebut tentu berakibat pada tingginya konsentrasi TSS di daerah hilirnya. Kontribusi bahan tersuspensi tersebut lebih banyak terjadi pada musim hujan akibat erosi permukaan, sementara pada musim kemarau mungkin berasal dari proses pengambilan sirtukil (bahan galian C) pada tebing dan palung sungai. Berbagai bahan buangan dari aktivitas di atas akan masuk ke sungai, sehingga sungai tersebut tidak lagi mampu memulihkan (*recovery*) dirinya dengan optimal baik secara fisika, kimia dan biologi. Akibatnya, telah terjadi peningkatan konsentrasi bahan pencemar tersebut ke arah hilirnya



sehingga muara sungai menjadi dangkal, berbau tidak sedap dan ada yang berwarna hitam seperti terjadi di muara Batang Anai.

Selain itu, kerusakan daerah tangkapan air di hulu juga dapat menyebabkan jumlah air dalam sungai tampak makin berkurang atau kadang-kadang sungai menjadi kering pada musin kemarau. Kekeringan sungai juga terjadi karena banyaknya kepentingan manusia terhadap penggunaan air sungai ini, sementara tahanan air / cadangan air di daerah hulunya makin berkurang akibat terjadi kerusakan ekosistem *catchment* hulunya. Penggunaan air sungai terutama untuk memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan PDAM

Terjadinya pencemaran air di sungai utama dalam Kabupaten Padang Pariaman oleh berbagai aktivitas manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti seperti berkurangnya keindahan sungai, terbatasnya persediaan sumber air bersih untuk air minum dan mandi, serta tidak nyamannya daerah muara untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi air karena air telah berbau tidak sedap dan berwarna hitam. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah: sumber air PDAM telah terkontaminasi oleh bahan pencemar serta jumlah airnya pada musim kemarau sangat kurang dan di musim hujan mengandung TSS yang tinggi. Akibatnya, proses pengolahan air menjadi makin lama, harga pengolahannya menjadi mahal dan jumlah air yang dapat diproduksi sangat terbatas.

Jika kondisi pencemaran ini lebih meningkat lagi di masa datang, maka akan mungkin dapat terjadi penurunan keragaman hayati dari biota sungai. Beberapa diantara ikan air tawar yang ada yang tidak menyukai kondisi demikian dan terbatasnya jumlah mikroalga air tawar sebagai pakan alami untuk ikan dan biota air lainnya, bahkan dapat juga diantara mikroalga tersebut dapat mempercepat terjadinya *eutrofikasi* sungai bersamaan dengan peningkatan biomasa gulma air. Akibatnya, dapat mempercepat terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan biota dalam sungai tersebut serta timbulnya berbagai faktor penyakit.

### 3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Selama ini upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran air oleh pihak pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap diupayakan. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah keharusan pembuatan Dokumen UKL/ UPL atau AMDAL (Andal, RKL/RPL) kepada setiap akan didirikan pembangunan yang diperkirakan memberikan dampak terhadap lingkungan. Upaya lain adalah melakukan monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan dari setiap kegiatan usaha baik Pabrik, Rumah Sakit, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan parameter kimia effluent yang diperoleh, tampak bahwa ada proses pengolahan limbah perusahaan dan Rumah Sakit yang tergolong relatif baik, namun sebagian besar ada juga yang relatif jelek untuk beberapa parameter. Pada umumnya proses buangan



Perusahaan/ industri yang tergolong jelek mungkin disebabkan oleh kapasitas IPAL yang tidak sesuai dengan produksi limbahnya, sehingga membutuhkan proses pengolahan yang lebih panjang dan lama serta mahal serta mungkin juga belum memiliki IPAL dan dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL atau DPL). Oleh karena itu, optimalisasi pengolahan limbahnya dan penerapan/kewajiban memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL, AMDAL atau DPL) untuk setiap bentuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak pada lingkungan sudah sewajarnya diimplentasikan secara tegas di masa datang.

Upaya diatas tampak masih bersifat persuasif Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman, masih perlu peningkatan dan dilakukan secara intensif. Kegiatan usaha yang sistem IPALnya telah melebihi nilai baku mutu lingkungan masih belum diberlakukan sanksi tegas, apalagi kegiatan yang belum memiliki sistem IPAL/ dokumen pengelolaan lingkungan. Begitu juga terhadap masyarakat penambang sirtukil pada palung sungai yang sebagian tidak memiliki izin namun masih belum dilakukan tindakan tegas, walau pada tempat tersebut telah dipasang papan larangan pengambilan sirtukil. Usaha preventif dan kuratif perlu diberlakukan dengan tegas, untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan pada badan sungai yang ada.

Sementara kepedulian individu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam hal pengendalian pencemaran air masih perlu ditingkatkan. Kepedulian yang relatif tinggi hanya terjadi untuk masyarakat yang tinggal di Komplek Perumahan atau masyarakat yang jauh dari bantaran sungai. Hal ini ditunjang karena sebagian besar masyarakat tersebut telah dapat fasilitas pengangkutan oleh mobil pengangkutan sampah dari Kantor Pasar dan Perparkiran.

Tidak demikian halnya dengan sebagian besar masyarakat di sepanjang sempadan sungai. Belum semua bantaran sungai yang ada dapat diakses oleh mobil pengangkut sampah, sehingga juga menjadi kendala dalam pengelolaan/ sampah dan dapat menambah pencemaran perairan. Dengan telah terbukanya jalan di sepanjang bantaran sungai dalam wilayah kota diharapkan TPS dapat tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar dari daerah pantai ke TPA sampah.

#### **D. Degradasi Ekosistem Laut (Pantai dan Pesisir)**

Kabupaten Padang Pariaman dikategorikan sebagai kota pesisir yang terletak di pantai Barat Sumatera dan berhubungan langsung dengan Samudera Hindia. Mempunyai garis pantai sepanjang 60,5Km. Berdasarkan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 1995, bahwa wilayah pantai atau pesisir merupakan wilayah yang berada di daerah perairan pantai sampai ke daratan sepanjang 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Akan tetapi beberapa pendapat juga menyatakan bahwa daerah pesisir meliputi daerah administratif yang terletak di dekat pantai.



Secara ekologis, daerah ini memiliki keragaman habitat /kawasan. Ada kawasan pemukiman yang dihuni sekitar 85 % oleh masyarakat nelayan, juga ada kawasan hutan bakau, perairan pantai dan kawasan muara sungai (ekosistem estuaria). Hampir sebagian besar kawasan muara sungai di Kabupaten Padang Pariaman, tidak lagi memiliki hutan bakau.

### 1) Kondisi Lingkungan

Ekosistem hutan mangrove ini mengandung berbagai bentuk kehidupan (sumberdaya hayati) baik berupa jenis karang, kerang, ikan rumput laut, lamun dan berbagai jenis tanaman bakau dan jenis epifit dan liana lainnya. Sebagian besar sumberdaya hayati ini masih belum banyak diketahui baik jenis maupun manfaatnya secara ekonomi maupun ekologi untuk menunjang kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Wilayah pesisir adalah identik dengan wilayah nelayan, maka pemenuhan kebutuhan masyarakatnya sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam laut /perairan pantai yang berdampingan dengan tempat tinggalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kabupaten Padang Pariaman yang tampak cenderung meningkat tentu cenderung diikuti dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Pemenuhan tersebut tentu menggunakan sempadan pantai/laut. Berapa banyak dan luas daerah pantai yang telah dimanfaatkan belum diperoleh datanya (termasuk jumlah bangunan yang ada sepanjang pantai). Beberapa diantara rumah/bangunan yang ada tersebut ada yang berada sangat dekat dengan garis pantai. Tata letak bangunan tersebut sangat rentan dapat memicu terjadinya erosi dan pencemaran pantai.

Daerah pantai/pesisir Kabupaten Padang Pariaman saat ini telah berkembang dengan pesatnya sehingga fungsinya tidak hanya sekedar menunjang sumber pangan dan tempat berlindung nelayan, tetapi juga telah terbangun fungsi sosial akibat adanya sarana pemukiman dan wisata. Perkembangan yang menggembirakan ini dilain pihak juga akan dapat melahirkan permasalahan dan tekanan terhadap kelestarian fungsi ekosistem pesisir/daerah pantai Kabupaten Padang Pariaman. Tekanan yang mungkin timbul antara lain: pendangkalan dan sedimentasi muara sungai, pencemaran perairan pantai, dan intrusi air laut (belum ada data) serta terbatasnya kawasan hutan bakau dan berkurangnya jumlah pohon mangrove, terjadinya kerusakan terumbu karang dan hilangnya jenis hewan karang pada daerah tertentu. Peraturan yang mengatur masalah ekosistem pesisir/pantai Kabupaten Padang Pariaman saat ini tampak belum tersedia/agak lemah, atau kurangnya patroli/monitoring terhadap kelestarian fungsi ekosistem pesisir, maka pemanfaatan terhadap sumber daya ekosistem ini akan lebih bebas dan kurang terkendali. Akhirnya akan dapat menurunkan kualitas wilayah pesisir/ pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Indikasi kearah tersebut tampak dari keberadaan hutan bakau dan ekosistem terumbu karang Kabupaten Padang Pariaman yang cenderung berkurang dari tahun ke tahun pengurangan tersebut karena adanya



pemakaian jenis kayu bakau tertentu seperti *Rhizophora apiculata* dan *Ceriops tagal* oleh masyarakat lokal dan pengambilan hewan karang (*Acrophora* spp) dan kerang (*Kima* spp) dan Kerang mutiara (*Pinctada* spp) secara mekanik serta pengambilan ikan karang dan kerapu dan ikan hias dengan menggunakan bahan kimia Hal ini dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal dan atau masyarakat pesisir, serta oleh masyarakat pengunjung. Terumbu Karang di Kabupaten Padang Pariaman hanya terdapat di Pulau Pieh dengan persentase tutupan karang hidup 8,30 dan kondisi sangat jelek.

Wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Padang Pariaman relatif kaya akan potensi estuaria walaupun luasannya sangat kecil dibandingkan kabupaten pesisir pantai Sumatera Barat. Sumberdaya alam pesisir estuaria Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari muara sungai, estuaria dataran pesisir dan estuaria laguna. Pemanfaatan estuaria oleh masyarakat pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman dapat dikatakan masih relatif rendah yaitu merupakan tempat penangkapan kepiting bakau, kerang-kerangan, udangan dan lokasi wisata.

Penurunan kualitas wilayah pantai termasuk perairan pantainya, juga disebabkan oleh adanya masukan bahan pencemar dari muara sungai yang ada. Hal ini tampak dari beberapa parameter telah melampaui nilai ambang baku mutu air laut. Secara visual, warna air laut yang berdampingan dengan pantai telah berubah menjadi keruh. Kekeruhan dan penurunan kualitas tersebut terjadi di sekitar mulut muara sungai yang ada, kemudian menyebar ke perairan laut sekitarnya. Penyebab penurunan kualitas tersebut berasal dari sungai dan berbagai aktivitas manusia di daerah sempadan sepanjang perairan pantai ini

## 2) Tekanan dan Dampak

Kelimpahan jenis plankton di perairan pantai Padang Pariaman seperti *Dinophysis* spp, *Gymnodium* spp *Gonyaulax* spp. saat ini masih tergolong rendah, namun suatu saat dengan kondisi perairan pantai yang kurang baik akan dapat terjadi proses *blooming*. Jika *blooming* plankton ini terjadi, akan dapat membahayakan terhadap biota laut lainnya terutama terumbu karang, ikan dan dapat mengganggu dan merugikan usaha budidaya perikanan di laut. Kondisi *red tide* ini sudah pernah terjadi di Perairan Pulau Pieh dan sekitarnya tahun 1997 yang menyebabkan banyak hewan karang/ekosistem terumbu karang menjadi "*bleaching*" dan mati.

Sebaran hutan mangrove di Kabupaten Padang Pariaman adalah sangat terbatas pada wilayah tertentu. Keberadaannya sedikit mengalami kerusakan dan berkurangnya tegakan pohon-pohonnya. Hal ini akan dapat menyebabkan berkurangnya fungsi hutan mangrove ini sebagai tempat hidupnya biota laut, tempat memijah ikan-ikan kecil, sebagai pelindung pantai dari gelombang pasang dan badai termasuk tsunami.





### 3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Agar penataan daerah pesisir pantai ini dapat berjalan seimbang dan *sustain* (menganut kaidah *sustainable development* dan konservasi), maka diperlukan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut, usaha konservasi serta rehabilitasi/reklamasi habitat yang telah rusak. Pengaturan tata ruang hendaknya dapat mengakomodir antar kebutuhan berbagai bidang terkait seperti pariwisata, perikanan, pertambangan, kawasan lindung (mangrove, pantai dan terumbu karang), pelabuhan dan industri.

Kepedulian individu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pantai dan mengatasi pencemaran perairan pantai perlu ditingkatkan untuk waktu yang akan datang. Hal ini mungkin disebabkan masih kurangnya pengetahuan tentang arti penting ekosistem pesisir/pantai, karena tingginya ketergantungan mereka terhadap sumberdaya yang ada (seperti kayu bakau, hewan karang, dan ikan) untuk memenuhi kebutuhannya, serta belum mampunya mereka untuk membayar retribusi sampah, sehingga mereka sering membuang sampah aktivitasnya ke lingkungan pantai.

Kondisi ini diperkirakan karena masih terbatasnya larangan membuang sampah yang mengganggu ekosistem pesisir, serta kurangnya patroli pada ekosistem ini. Disamping itu, himbuan atau sosialisasi perlu untuk ditingkatkan, atau program pemerintah yang dapat memberikan pendidikan lingkungan atau menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungan pantai/pesisir beserta dengan perairannya. Hal ini diperlukan kesadaran masyarakat yang peduli kebersihan lingkungan khusus bagi masyarakat tinggal di sepanjang sempadan pantai.

### E. Pencemaran Udara

Udara adalah komponen yang membangun atmosfer terdiri dari berbagai macam gas yaitu nitrogen 78 %, oksigen 21 % dan karbondioksida 0,035 % (Bush, 2000). Udara yang masih bersih terdiri dari campuran gas-gas di atas, namun tidak pernah dijumpai udara yang betul bersih, karena di dalamnya terdapat juga benda-benda asing seperti abu gunung berapi, bakteri, spora, serbuk sari tumbuhan, partikel garam, dan debu kosmis. Bahan pengotor tersebut masih bersifat alamiah, akan tetapi dengan adanya aktivitas manusia akan dapat menghasilkan bahan asing yang berbahaya.

Penggunaan bahan bakar untuk keperluan transportasi, industri maupun berbagai kegiatan domestik cenderung memberikan sumbangan terbesar dalam mempengaruhi kualitas udara. Jika produksi gas dan debu dalam udara berada dalam jumlah yang banyak akan dapat mengganggu siklus udara, sehingga udara tidak dapat memulihkan dirinya secara alamiah. Kondisi udara yang terukur jika melebihi dari nilai ambang batas, maka kualitas udara demikian dikatakan sudah tercemar (Sastrawijaya, 1991). Pencemaran udara dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan buangan /emisi baik



berupa gas dan atau debu maupun bahan buangan yang dapat menimbulkan bau. Secara umum bahan buangan ini biasanya dikeluarkan oleh aktivitas pabrik dan transportasi.

### 1) Kondisi Lingkungan

Sebagai konsekuensi pembangunan daerah dan penambahan jumlah penduduk akan dapat mendorong peningkatan kebutuhan akan sarana penunjangnya. Salah satu sarana penunjang yang cukup besar peranannya di Kabupaten Padang Pariaman adalah sarana transportasi. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Padang Pariaman terus bertambah dari tahun ke tahun. Mobilitas kendaraan tersebut secara periodik akan dapat menyebabkan kemacetan pada jalur-jalur utama dan waktu tertentu dalam wilayah kota, sehingga akan dapat mengakibatkan peningkatan partikel dan gas buangnya. Disamping dari sektor transportasi peningkatan partikel dan gas buang dalam udara juga berasal dari sektor industri.

Kondisi kualitas udara pada beberapa lokasi Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kondisi yang beragam. Dari data yang ada yaitu  $\text{NO}_x$  dan  $\text{SO}_x$ , HC, PB CO dan Debu masih berada di bawah nilai ambang berdasarkan Keputusan Menteri LH No. 45/MENKLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan Keputusan Bapedal No. 101/BAPEDAL/11/1997 tentang standar pencemaran udara ambien, PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Berdasarkan data yang ada dan standar di atas, maka dapat dikatakan kondisi udara dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman masih di kategorikan bersih,

### 2) Tekanan dan Dampak

Dilihat dari aktivitas yang terjadi, perbaikan kualitas udara mungkin disebabkan oleh adanya upaya pengelolaan lingkungan yang cukup baik dari pihak industri. Adanya pelebaran jalan ke arah luar kota menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi berkurang. Hal ini juga membantu pemerataan distribusi gas buang dan tidak menjadi terakumulasi pada tempat tertentu sehingga konsentrasinya menjadi rendah dari sumbernya, walau pada tahun 2006 ini terus terjadi peningkatan kendaraan bermotor. Akan tetapi pada beberapa tempat seperti yang disebutkan diatas juga terjadi peningkatan konsentrasi parameter udara seperti  $\text{SO}_x$  dan CO, namun masih dalam terkategori sedang. Peningkatan ini berkaitan dengan frekuensi atau jumlah kendaraan yang melintasi (berlalu lalang) di daerah tersebut juga cukup tinggi .

Terjadinya peningkatan tersebut tentu akan didukung oleh besarnya kontribusi emisi kendaraan yang menyebabkan kadar senyawa pencemar pada kondisi ambien menjadi tinggi pula. Namun dengan ada peningkatan kualitas sarana jalan (pelebaran dan peningkatan mutu jalan) dan pengaturan lalu lintas oleh aparat terkait sudah mulai intensif, maka dapat memperlancar arus transportasi sehingga akumulasi gas buang menjadi berkurang. Oleh karena tidak semua jenis kendaraan yang beroperasi (ke luar masuk atau



lalu lalang) di Kabupaten Padang Pariaman memiliki kondisi kendaraan dengan proses bahan bakarnya yang sempurna, tentu ada yang tidak laik jalan tetapi masih tetap beroperasi dan jumlah sangat terbatas.

Jika terjadi pencemaran udara yang cukup berat akan dapat menimbulkan dampak yang berarti seperti menurunkan / memperpendek jarak pandang dan menurunkan sensitivitas serta meningkatkan jumlah penderita ASMA akibat pencemaran debu dan gas CO. Gas CO merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Setiap 5 liter bensin dapat menghasilkan 1,0-1,5 kg CO. Pada kondisi lalu lintas yang padat kadar CO dapat mencapai 10-15 ppm. Gas ini dapat membentuk senyawa yang stabil dengan *haemoglobin* darah menjadi *karboksihaemoglobin*. Senyawa ini dalam jumlah kecil tidak berbahaya, namun dalam jumlah besar dengan kadar CO 10 ppm di udara adalah sudah cukup dapat menimbulkan penyakit, tetapi bila kadarnya 1.300 ppm dalam 24 jam akan dapat menimbulkan bahaya kematian (Satrawijaya, 1991). Kondisi pencemaran udara pada kategori berbahaya, akan dapat berdampak dan berbahaya pada semua populasi darat dan udara yang terpapar termasuk manusia.

Selanjutnya, jika terjadi pencemaran debu, akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan jarak pandang kepada manusia, dampak lain juga terjadi pada tumbuhan. Sunu (2001) menyatakan bahwa debu yang melekat atau terbentuk lapisan kerak pada permukaan daun tanaman akan dapat menghalangi/mengganggu proses fotosintesis tanaman, karena sinar matahari terhalang masuk dan juga menghambat pertukaran senyawa CO<sub>2</sub> dengan atmosfer. Di samping itu, juga berbahaya pada hewan herbivora yang memakan daun yang mengandung debu tersebut. Gani *et al.* (1995) telah mengamati hewan herbivora seperti kambing yang memakan daun-daunan yang telah terkontaminasi debu semen memperlihatkan saluran pencernaannya yang rusak. Efek lanjut juga mempengaruhi pertumbuhan dan menurunkan laju reproduksi hewan tersebut.

### 3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Saat ini pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan dengan pesatnya. Berbagai sektor pembangunan terutama perbaikan (peningkatan kualitas dan pelebaran jalan di semua tujuan) sudah dan sedang dilaksanakan, begitu juga pembangunan dan pengelolaan lingkungan terus dilaksanakan. Pengendalian pencemaran udara akibat buangan aktivitas industri, transportasi dan pemukiman terus dibenahi dan ditingkatkan. Beberapa upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi pencemaran udara antara lain adalah menggalakan penanaman pohon pelindung pada sebagian besar jalan utama di perbatasan dengan Kota Padang. Selain itu juga telah dilakukan peremajaan beberapa merek dan tahun pakai transportasi /oplet umum yang tidak laik jalan dengan kendaraan umum yang tahun produksinya relatif lebih muda.



Antisipasi kearah tersebut juga menjadi perhatian di masa datang. Untuk itu, perlu dilakukan pembangunan pengukur kualitas udara dengan memasang alat detektor kualitas udara di lokasi-lokasi tertentu dan strategis seperti pasar, industri-industri, jalan raya yang padat lalu lintas, terminal dan lain-lain serta melakukan monitoring secara berkala di tempat di atas. Selain itu, pengendalian pencemaran udara selayaknya juga terus dilakukan uji kelaikan jalan kendaraan (meningkatkan pengawasan uji kendaraan bermotor), regulasi jalur dan melanjutkan pembuatan jalur hijau (penanaman pohon pelindung) di sepanjang koridor jalan yang ada, dan melakukan monitoring dan sanksi tegas kepada pihak industri yang mencemari lingkungan.

## F. Gempa Bumi dan Tsunami

### 1. Kondisi Lingkungan

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan zona gempa paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat, terutama di Daerah Sungai Limau, ke Tiku Utara berbatasan dengan Sungai Geringging bagian barat serta seluruh daerah pesisir Padang Pariaman. Adanya aktivitas gempa tersebut menyebabkan Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan gempa. Hal ini dapat dilihat pada peta zona gempa di Indonesia (Setiadi, 1962 dalam Sampurno), dimana daerah ini merupakan zona gempa dengan skala intensitas menempati zona VII dan VIII dengan episentrum yang relatif dangkal dan sedang.

Banyak pakar geofisika yang telah memprediksi bahwa di sepanjang Sesar atau patahan Mentawai, ibarat buah yang hampir masak yang hampir jatuh ke tanah. Begitulah peluang gelombang tsunami yang akan menimpa daerah pesisir pantai Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Bila kekuatan gempa lebih dari 6 skala Richter sudah merupakan syarat terjadinya tsunami apalagi dengan kedalaman 30 Km dibawah permukaan laut. Melihat dari angka kedalaman masih tergolong dangkal, kenapa tidak terjadi tsunami, secara teori masih ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Biasanya sebelum datang gelombang tsunami, terjadi patahan naik dan turun. Ternyata yang terjadi pada saat itu yang terjadi patahan mendatar (*strike slip*) dan berkemungkinan di sesar mentawai atau sesar batee yang merupakan patahan yang menghubungkan antara patahan mentawai dengan patahan di darat yakni di sepanjang Bukit Barisan.

Gempa dan Tsunami merupakan sebuah fenomena alam yang telah diatur Allah untuk menjaga keseimbangan alam, namun tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Perubahan alam tersebut bisa menjadi bencana bila kita gagal mengantisipasinya. Padang pernah dilanda tsunami pada tahun 1797 dan 1833. Para ilmuwan menyebutkan bahwa pengulangan gempa yang berpotensi tsunami terjadi dalam kurun waktu  $200 \pm 30$  tahun, maka sekarang kita berada pada masa pengulangan tersebut. Tsunami pasti selalu didahului oleh gempa karena tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng secara vertikal setelah



berbenturan. Benturan inilah menyebabkan gempa dan perubahan posisi lempeng yang menyebabkan perubahan permukaan air laut dan menimbulkan gelombang laut yang disebut tsunami. Tidak semua gempa menyebabkan tsunami. Hanya gempa di laut dangkal dengan kekuatan 6,5 skala Richter latau lebih yang berpotensi menimbulkan tsunami. Sumatera Barat dilalui oleh lempeng Eurasia dan Indo Australia yang semakin mendekat satu sama lainnya, jika bertumbukan pasti akan sangat terasa kekuatan gempanya.

Jika tsunami terjadi sekarang ini di Samudera Hindia, maka Kabupaten Padang Pariaman akan menyumbang korban terbesar. Jalan keluar hanya ada dua arah yakni menuju Bukittinggi dan Agam Kondisi geografis seperti ini jelas tidak menguntungkan. Disamping itu pemukiman yang padat dan mobilitas penduduk berlangsung sejajar dengan garis pantai. Saat ini di Kabupaten Padang Pariaman hampir tidak ada lagi ekosistem hutan mangrove yang bisa dijadikan tameng ketika air pasang tinggi, sehingga tingkat kerusakan tidak menjadi parah dan jumlah korban dapat diminimalisir.

## 2. Tekanan dan Dampak

Pada dasarnya pusat gempa di sepanjang pantai Sumatera sumbernya sama yaitu berasal dari lempeng Eurasia dan Indo Australia. Pergerakan lempeng ini setiap tahun mengeluarkan energi sehingga terjadilah gempa. Gempa yang terjadi juga merupakan migrasi (pindahan) dari gempa tektonik besar yang terjadi di NAD yang diikuti oleh gelombang tsunami yang meluluh lantakan Aceh. Ratusan ribu orang menjadi korban dan disertai kerugian material yang tidak sedikit. Pusat gempa Aceh berada di antara Pulau Simeuleu dengan Pulau Sinabang atau sekitar 90 Km dari Pulau Nias. Secara tidak langsung gempa besar di Aceh akan berpengaruh terhadap struktur geologi lain di Sumatera karena satu sama lainnya saling berhubungan. Dari hasil penelitian satu bulan setelah gempa di Aceh terjadi getaran – getaran kecil dalam jumlah besar ke arah utara. Migrasi gempa berikutnya bisa saja terjadi dalam waktu cepat atau lambat dan berkemungkinan ke arah Selatan Sumatera sampai ke Selat Sunda.

Karena merupakan hasil gesekan dari berbagai lempengan, gempa menimbulkan suatu energi. Energi lantas terakumulasi dan dilepaskan dalam bentuk gempa. Tetapi lepasnya energi ini tidak sekali saja, terjadi berurutan. Tentu saja bila sudah mencapai puncaknya yaitu gempa berenergi besar, maka gempa berikutnya akan semakin kecil. Jika titik pusat gempa (*episentrum*) berada di laut, maka bisa menimbulkan tsunami atau gelombang besar, namun jika adanya di darat hanya menimbulkan guncangan.

Terdapat sejumlah faktor yang membuat besar kecilnya pengaruh gempa tektonik dasar laut terhadap kawasan sekitarnya, misalnya kondisi oseanografi serta kondisi dasar laut. Jika lautnya cukup dalam maka gelombang nya lebih rendah, namun jika gempa terjadi dekat daerah pantai yang landai, energi yang keluar pun akan berubah menjadi gelombang yang tinggi. Bentuk rangkaian pesisir juga ikut mempengaruhi,



apalagi kalau pesisir tadi berbentuk teluk maka energi yang terkumpul menjadi terakumulasi dan menghasilkan gelombang tsunami yang lebih besar lagi.

### 3. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Bencana tidak dapat dihindari, tinggal sekarang bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan yang paling utama adalah kesiapan Pemkab. Padang Pariaman dalam mengembangkan *early warning system* (sistem deteksi dini). Kita sudah saatnya memiliki sebuah perangkat pemantauan yang bisa bekerja secara langsung terus menerus (*real-time*) maupun secara periodik, Alat itu nantinya mencatat data pasang surut permukaan air laut dan hubungan dengan gempa yang terintegrasi dengan data gempa di seluruh dunia. Misalnya terjadi gempa di Selat Mentawai, maka bisa dilakukan penghitungan bahwa dalam waktu tertentu gelombang tsunami akan sampai di pantai Sumatera Barat. Hasil perhitungan lalu dihubungkan dengan sistem alarm sehingga upaya penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat.

Kita juga perlu memasang alat seismograf di kawasan yang baru terjadi gempa. Fungsinya untuk mencatat gempa-gempa mikro sehingga bisa diperoleh tendensi kecenderungan turun tidaknya frekuensi gempa. Tak kalah pentingnya adalah dilakukan penyadaran terhadap masyarakat sekitar daerah rawan gempa. Pemerintah perlu mencontoh usaha Jepang yang mengajarkan seluruh lapisan masyarakatnya tentang cara berlindung ketika terjadi gempa. Pengajaran ini diberikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Hasilnya masyarakat tidak lagi panik saat gempa dan jumlah korban dapat diminimalisasi.

Para pakar gempa bumi telah mengembangkan teknologi yang saling berkaitan untuk pemantauan gempa diantaranya adalah :

- Pemasangan GPS (*global positioning system*) yang mempunyai kepekaan tinggi. Alat ini dapat mencatat getaran horizontal maupun vertikal pada lempengan yang bergerak.
- Pengukuran gelombang seismoelektrik atau gelombang listrik yang terjadi menjelang dan sesudah gempa besar. Pada saat gempa terjadi perubahan medan listrik yang cukup signifikan akibat regangan permukaan bumi.
- Penelitian perubahan suhu air tanah yang berasal dari dasar bumi serta melihat retakan tanah dan gas yang dikeluarkan.
- Penelitian terhadap kekuatan gelombang pasang dengan pemasangan pelampung suar (*buoy*) yang berisi radar untuk memantau gelombang, dengan demikian pemerintah bisa melakukan upaya pencegahan dan peringatan dini kepada masyarakat.

Jika gempa besar membuat kita tidak mampu berdiri, merusak struktur bangunan atau sampai merobohkan bangunan serta getarannya lebih dari satu menit, maka lindungi diri sampai gempa reda, segeralah



evakuasi ke daerah ketinggian. Pilihannya bergerak menjauhi pantai sampai ketinggian > 5 m dari permukaan laut atau temukan gedung-gedung tinggi yang strukturnya masih kokoh setelah gempa dan berjarak > 500 m dari pinggir pantai. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit sebelum tsunami mencapai daratan. Tetaplah tenang sambil berzikir, matikan listrik, cabut gas. Bagi yang berkendara, jika terjadi kemacetan segera tinggalkan kendaraan. Evakuasi dengan jalan kaki lebih efektif. Persiapkan logistik yang dibutuhkan seperti minuman dan makanan *instant*.

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah pengamanan diri agar terhindar dari bencana yang tidak diinginkan. Dalam upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan KOGAMI (Komunitas Siaga Tsunami) telah melakukan pendidikan bagi masyarakat yaitu melaksanakan Workshop Sistem Evakuasi Gempa dan Tsunami. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan kedamaian bukan membuat cemas warga. Dengan kegiatan yang dilakukan diharapkan masyarakat dapat mengenali tingkat kerawanan lingkungannya, terbiasa membuat perencanaan strategi evakuasi, memupuk rasa tanggung jawab masyarakat untuk menyelamatkan diri dan keluarga jika terjadi bencana serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Berbagai kebijakan dan aktifitas juga dilakukan Pemkab. Padang Pariaman untuk menyelamatkan warga seperti upaya spritual (doa dan zikir), penyuluhan dan pelatihan evakuasi, pembenahan fisik jalur evakuasi serta pembentukan posko pemantauan gempa dan tsunami.

## 3.2 Sumber Daya Buatan

### A. Lingkungan Pemukiman

Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu *entity* yang memperlihatkan sejarah perkembangan daerah pesisir dengan dinamika masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang. Perkembangan dan perubahan Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika kegiatan sosial ekonomi yang berlangsung. Kondisi ini akan mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan, sementara sumber daya alam yang dapat diolah untuk menunjang perkembangan diatas sangat terbatas. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat terlihat dari tumbuh dan berkembangnya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa maupun industri.

Implementasi konsep dasar Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam pengaturan tata ruang wilayah tampak bahwa pemukiman/perumahan merupakan salah satu dasar membentuk struktur wilayah. Pemukiman/ perumahan merupakan unsur pendukung /penunjang dari pusat pengembangan wilayah yaitu pusat pengembangan industri, pusat kota/inti kota, dan pengembangan pendidikan. tetapi pemukiman juga menjadi struktur wilayah kabupaten itu sendiri. Sektor pemukiman/perumahan yaitu sekitar 6,09% dari total



penggunaan lahan yang ada setelah penggunaan lahan untuk hutan/konservasi dan lahan kosong/pertanian.

### 1) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan data yang diperoleh pada 17 belas kecamatan di seluruh Kabupaten Padang Pariaman terdapat 88.697 Rumah Tangga (Kepala Keluarga) dan jumlah rumah sebanyak 76.873 Unit, Jumlah KK yang belum memiliki rumah yaitu 11.824 KK atau 13,33 % dan rumah tak layak huni sebanyak 17.122 Unit atau 22,27 %, sedangkan rumah layak huni sebesar 77,73 % namun masih banyak belum memenuhi persyaratan rumah sehat misalnya, salah satunya masih banyak belum memiliki prasarana MCK atau WC hal ini barangkali disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan disamping dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat yang masih rendah.

Dari data yang diperoleh tujuh belas kecamatan masih terdapat 22,27 % (17.122 unit) tidak layak huni, Rumah yang tidak layak dimaksud adalah rumah yang lantainya masih tanah, luas ruangan tidak mencukupi untuk jumlah anggota keluarga, fungsi ruangan belum terpenuhi, ventilasi tidak cukup, loteng belum ada dan MCK tidak ada serta masih ada. Rumah tangga yang belum memiliki rumah yaitu sebanyak 11.824 KK atau 13,33 %. Jalan lingkungan yakni jalan yang terdapat dalam lingkungan permukiman. Panjang jalan lingkungan diseluruh Kabupaten Padang Pariaman 425.850 meter, dimana dalam kondisi baik panjangnya 15.900 meter, kondisi sedang 134.050 meter dan kondisi rusak 275.900 meter atau 65 % jalan lingkungan kondisinya masih kurang baik.

Drainase merupakan salah satu prasarana lingkungan pemukiman yang sangat penting, Karena berfungsi sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga ataupun air hujan. Penurunan kualitas lingkungan sering terjadi karena tidak berfungsinya lagi atau tidak adanya drainase yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah ataupun mengaliri air hujan sehingga masih sering ditemukan terjadinya banjir ataupun genangan limbah rumah tangga di pusat-pusat permukiman ataupun di pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar. Panjang saluran drainase yaitu 60.065 meter yang terdiri dari saluran primer 17.000 m dengan kondisi sedang 12.000 meter dan rusak 5.000 meter, sedangkan saluran sekunder berkondisi baik 2.790 meter, kondisi sedang 20.765 meter dan kondisi rusak 19.510 meter atau 41 %.

MCK merupakan salah satu sarana sanitasi dasar permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survey masih banyak masyarakat tidak menyediakan WC di rumah mereka, hal ini barangkali karena disebabkan oleh sulitnya mendapatkan air di rumah, sehingga mereka lebih cenderung menggunakan batang air sebagai MCK atau masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan WC di rumah mereka. Berdasarkan data yang diperoleh di seluruh Nagari, cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi baru mencapai 16 % atau 13.423 KK, sedangkan yang belum mendapatkan





akses sanitasi dasar sebesar 84 % atau 70,470 KK Jumlah Sarana MCK yang telah dibangun oleh Pemerintah di seluruh Kabupaten Padang Pariaman yakni sebanyak 93 Unit, yang berkondisi baik 36 Unit, kondisi sedang 36 Unit dan kondisi rusak 21 Unit atau 72 Unit masih berfungsi dan tidak berfungsi lagi sebanyak 18 Unit, sedangkan jumlah rumah tangga yang dapat dilayani oleh MCK tersebut baru mencapai 3.194 rumah tangga.

Air Bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, jadi sudah seyogyanya Pemerintah memberikan pelayanan dan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Air bersih untuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sebagian dilayani oleh PDAM tapi belum menjangkau seluruh Kecamatan, Jumlah KK yang dilayani oleh PDAM 6621 KK atau 10 % dari Jumlah KK di Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan yang dilayani oleh prasarana air bersih lainnya melalui PSAB antara lain Hydrant Umum, Sumur Dangkal/gali, Sumur Pompa listrik /tangan, PAH(Penampungan Air Hujan) dan Perpipaan adalah 2100 KK atau 3.5 %. Jumlah Hu (Hidran Umum) yang telah dibangun oleh Pemerintah yakni 106 Unit. Selebihnya memanfaatkan Batang Air atau sumber mata air. Sementara prasarana yang ada tersebut sudah banyak pula tidak berfungsi lagi sehingga pelayanan air bersih terhadap masyarakat masih belum optimal. Cakupan masyarakat yang mendapatkan akses air bersih baru sebesar 64 % (242.575 jiwa) yang belum mendapatkan akses air bersih/ air minum 36 % (136.448 jiwa).

## 2) Tekanan dan Dampak

Pembangunan sektor perumahan dan pemukiman di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan oleh pihak swasta, Perum Perumnas, masyarakat dan pemerintah. Salah satu isu sentral mengenai kawasan pemukiman di Kabupaten Padang Pariaman adalah masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Masih banyaknya kawasan perumahan yang terdapat di daerah rawan bencana (longsor dan galodo) yang perlu segera di relokasi. Kondisi lain yang ditemukan adalah banyaknya pembangunan kompleks perumahan pada kawasan resapan air pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman serta pembangunan lingkungan pemukiman di kawasan yang tidak sesuai peruntukan ruang.

Pemukiman yang layak huni dengan sarana dan prasarana yang memadai merupakan dasar untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Berkembangnya berbagai fasilitas pemukiman di sepanjang jalan arteri dan kolektor menunjukkan adanya perkembangan fasilitas kota. Akan tetapi perkembangan tersebut seringkali tidak sesuai dengan konsep lingkungan pemukiman yang seharusnya seluruh fasilitas pemukiman tersebut berkelompok pada pusat-pusat pemukiman sehingga dapat diperoleh efektifitas pemanfaatan lahan dan fasilitas kota yang optimal. Perkembangan *real estate*, kawasan pemukiman, kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk *hot-spot* yang belum efektif pengelolaannya.



Kondisi ini akan berimplementasi pada penyebaran dan produksi hasil sampingan aktivitas diatas terutama limbah padat (sampah) dan limbah yang sulit untuk dikelola secara optimal pula. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan penanganan masalah kebersihan kota yang diakibatkan oleh berkembangnya aktivitas perekonomian kota dan pemukiman. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak disebabkan oleh :

- Penghasilan masyarakat yang masih rendah atau masih banyak hidup dalam kemiskinan.
- Masih rendahnya Anggaran Pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tak layak huni.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyediakan rumah sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk rumah sehat sederhana, misalnya belum dilengkapi dengan sarana sanitasi dasar atau jamban keluarga.
- Masih rendah perhatian dan peran Pemerintah dalam Program Perumahan untuk memberikan akses terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyediaan rumah sehat sederhana dan terjangkau

Hal ini tentu membawa konsekuensi pada hasil samping dari aktivitas pemukiman berupa limbah padat baik dalam bentuk sampah organik dan anorganik. Produksi sampah ini tidak saja berasal dari areal pemukiman juga berasal dari aktivitas pasar sebagai tempat terjadi transaksi/jasa dan keluar masuknya berbagai material diatas. Produksi sampah ini tampaknya terus terjadi setiap saat/setiap hari. Jika produksi sampah dari aktivitas pemukiman dan pasar ini tidak dikelola dengan baik tentu akan menjadi masalah lingkungan yang cukup serius sehingga akan dapat pula mengganggu kelancaran berbagai aktivitas sektor lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini telah mencapai 400 ribu jiwa tentu membutuhkan sarana dan prasarana pemukiman yang lebih banyak dan tersebar hampir seluruh wilayah kabupaten. Jumlah penduduk dan kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tingginya aktivitas tersebut sebanding pula dengan hasil samping yang akan dihasilkannya seperti limbah padat berupa sampah (organik dan anorganik) dan limbah cair serta hasil samping lainnya.

Masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai antara lain disebabkan oleh : (1) pembangunan perumahan oleh pengembang tanpa adanya kewajiban dari pemerintah untuk melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang memadai, (2) pengembangan kawasan pemukiman yang tidak mempunyai konsep yang jelas sehingga banyak fassos dan fasum yang harusnya tersedia menjadi terabaikan, (3) pembangunan kawasan pemukiman dilakukan secara bertahap sehingga sarana dan prasarana yang awalnya tersedia dan mencukupi dengan adanya pengembangan kawasan menjadi tidak berimbang dengan penghuni kawasan yang memanfaatkannya.



Masih terdapatnya kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh (1) perencanaan wilayah yang telah dibuat tidak dilaksanakan sesuai aturan, (2) belum adanya kebijakan, fasilitasi, dan stimulasi dari pemerintah dalam hal penyediaan pemukiman yang layak dan sehat terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, (3) resesi ekonomi dan tingkat inflasi yang jauh meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin menurunnya daya beli masyarakat, (4) kebijakan dari pemerintah yang masih membolehkan pembangunan kompleks perumahan tipe RS dan RSH tanpa harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti drainase yang memadai, jalan beraspal, tempat pembuangan sampah dan sistem pembuangan sampah yang sesuai. Komplek pemukiman dengan kondisi seperti ini biasanya berkembang menjadi pemukiman kumuh.

Kawasan kumuh dengan kondisi pemukiman yang layak huni akan menghambat peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Padang Pariaman. Karena kualitas sumberdaya manusia diukur dari kompetensi dasar yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan wahana pembinaan bermasyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui pembangunan pemukiman sebagai wadah untuk pendidikan keluarga dan persemaian budaya kearah peningkatan insan mandiri dan penunjang kelancaran proses pembelajaran.

Banyaknya kawasan perumahan yang terdapat di daerah rawan bencana yang perlu segera di relokasi. Pada umumnya pemukiman ini terdapat di lereng bukit. Masyarakat tertarik untuk membuat pemukiman di kawasan sejenis ini karena umumnya harga tanah murah sekali atau sama sekali tidak dibeli tetapi didapatkan dengan cara membersihkan lahan dari pepohonan atau semak belukar. Atau pada awalnya lokasi tersebut tidaklah termasuk daerah rawan bencana, tapi dengan semakin banyaknya orang yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut, lambung bukit semakin terbuka sehingga menjadi rawan longsor. Jika pemukiman ini tidak direlokasikan secepatnya, maka kemungkinan terjadinya longsor dan galodo cukup besar. Bencana yang mungkin terjadi tidak hanya mendatangkan kerugian materi tapi juga sangat mengancam keselamatan jiwa orang yang tinggal disana.

Banyaknya pembangunan kompleks perumahan pada kawasan resapan air terjadi karena belum adanya penetapan kawasan yang menjadi kawasan resapan air serta belum adanya perangkat hukum yang melarang masyarakat membangun di kawasan resapan air. Berkurangnya kawasan resapan air akan menyebabkan terhambatnya gerak air larian ke daerah pantai yang pada akhirnya dapat meningkatkan timbulan banjir di Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu berkurangnya jumlah air yang meresap ke dalam tanah tanah di wilayah pesisir akan meningkatkan intrusi air laut. Pembangunan lingkungan pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan, berkembangannya *real estate*, kawasan pemukiman serta kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk *hot spots* secara tidak terarah mengindikasikan belum efektifnya pengelolaan pemanfaatan lahan sebagaimana telah dibuat dalam



Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Padang Pariaman. Kegagalan dalam menata dan mentaati konsep penataan ruang dan kawasan akan menyebabkan kesemrautan wilayah. Ini akan berdampak pada semua kegiatan ekonomi dan sosial yang terkait dengan kebijakan tersebut sehingga dapat terkendala perkembangannya.

Pengelolaan sampah akan dapat berjalan dengan baik, jika semua kendalanya dapat diatasi. Pengelolaan yang baik itu mencakup kepedulian akan sampah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (cukup) serta manajemen pengelolaan yang baik pula. Jika hal ini dapat difasilitasi dengan baik, maka masalah sampah tidak menjadi persoalan lingkungan yang cukup serius di Kabupaten Padang Pariaman. Dampak yang mungkin timbul dari masalah sampah ini adalah timbulnya pencemaran udara akibat bau, pencemaran air dan pantai karena pembuangan sampah oleh masyarakat sempadannya sehingga mengganggu komunitas yang hidup dalam ekosistem tersebut munculnya bermacam penyakit (terutama diare, disentri, demam berdarah serta penyakit lainnya) dan munculnya bermacam vektor penyakit.

### 3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Berdasarkan Kepmen Permukiman & Prasarana Wilayah tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) No: 27/KPTS/M/2002 yang mana intinya menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah yang pertama dalam bidang Perumahan dan Pemukiman adalah pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan kedua adalah mewujudkan masyarakat perumahan dan pemukiman sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Maka berdasarkan hal tersebut maka sudah seyogyanya Pemerintah melaksanakan pembangunan perumahan pemukiman untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta meningkatkan kualitas permukiman agar terciptanya permukiman yang sehat, nyaman, harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, pemerintah kabupaten berusaha meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan. Selain itu akan dilakukan kajian, evaluasi dan revisi tentang pengembangan pemukiman beserta komponen sarana dan prasarananya. Sedangkan respon masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan goro bersama di berbagai kompleks perumahan membersihkan got/parit untuk mencegah banjir di musim hujan. Serta penyediaan fasilitas umum secara swadana dan swadaya oleh masyarakat seperti pengaspalan jalan, bak sampah, TPS, WC umum dan lain-lain.



Untuk mengatasi masih terdapatnya kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, pemerintah kabupaten memprogramkan kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman dan perumahan kumuh, bantuan pengembangan perumahan baru bagi penduduk berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah merencanakan untuk merelokasi semua pemukiman yang terdapat di kawasan rawan bencana. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini pun pada dasarnya berharap untuk dapat segera pindah, tapi berhubung lahan yang dibutuhkan cukup luas sehingga proses pembebasan lahannya membutuhkan waktu.

Dilain pihak, kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang. Sebagian besar masyarakat hanya terbatas pada pengelolaan sampah dilingkungan rumahnya sendiri, tanpa memperdulikan lingkungan lainnya. Kurangnya kepedulian individu dalam mengatasi masalah sampah oleh sebagian besar masyarakat, mungkin disebabkan kemampuan mereka untuk membayar retribusi sampah dan pengetahuan tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, mereka lebih mudah/gampang membuang sampah dari berbagai lingkungan yang ada termasuk ke sungai dan perairan pantai.

Disamping itu, diperlukan adanya himbauan/sosialisasi, atau program pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungannya termasuk juga lingkungan sungai dan perairan pantai. Selain itu, perlu dibudayakan pemberian *reward* kepada individu dan kelompok masyarakat yang peduli kebersihan lingkungannya, maka sosialisasi pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemberian *reward* ini perlu dikembangkan.

## **B. Sektor Industri**

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi sekunder dan tertier yang relevan dan berperan terhadap pembangunan daerah. Industri dipandang sebagai kegiatan ekonomi pendukung perdagangan atau sebagai efek perdagangan dalam bentuk kegiatan ekonomi pendukung perdagangan yang saling terkait dan membentuk kesatuan kegiatan dalam proses produksi dan distribusi serta pengolahan dan manufaktur. Sektor industri dan perdagangan mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja 2 atau 3 kali lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian apabila dikaitkan dengan jam kerja efektif. Selain itu mampu memberikan kepastian pendapatan dibanding sektor pertanian karena ketergantungan kepada faktor alam. Sektor industri dan perdagangan seharusnya menjadi unggulan di perkotaan didukung ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan teknologi disamping pasaran untuk komoditi yang dibutuhkan untuk komunitas lokal. Idealnya serapan pasar lokal untuk produk industri sedikitnya 30 % untuk kelangsungan perkembangannya. Selain itu sektor industri merupakan sektor yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang



Pariaman. Dalam pengembangan sektor industri ini perlu ada upaya yang strategis menyangkut pengembangan SDM pengelola maupun pembinaan industri dari pemerintah kabupaten.

### 1). Kondisi Lingkungan

Usaha industri yang umumnya berkembang di Kabupaten Padang Pariaman ialah industri dengan skala kecil dan menengah. Usaha industri dengan skala kecil dan menengah memperlihatkan trend yang terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,8 % setiap tahunnya. Sumbangan industri kecil dan menengah cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Peningkatan unit usaha ini diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang semakin banyak dimana pada tahun 2005 meningkat menjadi 20.353 orang. Industri skala besar (dengan investasi sebesar Rp. 1 Milyar, di luar tanah dan bangunan) seperti Coca Cola, Bumi Sarimas Kelapa dan Inti Sawit. Industri ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur.

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Padang Pariaman. Keberhasilan pembangunan di sektor industri merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. walaupun sebagian besar industri adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga namun mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata 15,49% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,8% per tahun. Industri kecil dan rumah tangga (UKM) sebagian besar berupa : industri batu bata, industri sepatu, industri bordir, anyaman pandan, industri *virgin coconut oil* (VCO), industri perabot rumah tangga, industri berbagai makanan ringan, industri alat-alat dan mesin pertanian serta beberapa industri kecil lainnya. Industri-industri ini dapat dikelompokkan atas beberapa jenis industri antara lain industri hasil pertanian, industri aneka, industri logam, mesin dan kimia, serta industri kerajinan

### 2). Tekanan dan Dampak

Terdapatnya sejumlah industri dan pabrik pada beberapa ruas sungai yang masih menjadi sumber pencemaran. Hal ini dapat terjadi karena intensitas pengawasan yang kurang oleh instansi pengawas, rendahnya kualitas teknologi yang dimiliki oleh perusahaan, lemahnya internal audit yang dilakukan oleh perusahaan, goodwill untuk menjaga kondisi lingkungan dari pemilik perusahaan yang masih harus dipertanyakan serta minimnya pos anggaran yang dimiliki perusahaan untuk mengelola limbahnya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu air sungai yang mengairi Kabupaten Padang Pariaman dengan dampak ikutan berupa pendangkalan sungai dan pencemaran pantai di daerah muara sungai. Pendangkalan sungai akan berakibat meningkatnya intensitas banjir di daerah hilir sungai terutama pada saat hujan lebat atau air laut pasang naik. Akibat lainnya adalah hilangnya berbagai jenis flora dan fauna air akibat ketidak mampuan beradaptasi dengan pencemaran lingkungan.



Sejumlah industri dan pabrik pada beberapa ruas sungai yang masih menjadi sumber pencemaran. Pencemaran yang terjadi di sepanjang Sungai Batang Anai bersumber dari limbah Bumi Sarimas Kelapa Indonesia dan Inti sawit serta pembuangan olie bekas dan minyak oleh industri yang beroperasi di sepanjang bantaran sungai. Teknologi yang digunakan umumnya masih belum merupakan teknologi ramah lingkungan

Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang dianggap mampu menciptakan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta proses untuk pemerataan perekonomian sekaligus diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadinya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, diharapkan akan mampu mengurangi tekanan laju mobilitas penduduk pindah keluar Kabupaten Padang Pariaman dan bisa sebagai penyangga stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan yang kondusif di Kabupaten Padang Pariaman. Upaya pembinaan and pengembangan industri kecil dan menengah secara bertahap mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga Kabupaten Padang Pariaman.

### 3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk masa mendatang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan membebaskan pajak kepada perusahaan yang membuang limbah cairnya ke badan air. Dengan adanya ketentuan ini maka semua perusahaan yang menjadikan sungai sebagai outlet limbah cairnya akan berusaha melakukan *recycle* dan *reuse* air limbahnya sehingga tidak ada yang perlu dibuang ke badan air dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Selain itu pemerintah kabupaten akan melakukan peningkatan penataan lingkungan industri dan pemanfaatan kawasan industri.

Senafas dengan Agenda 21 Indonesia yang menyelaraskan pembangunan ekonomi dan penjagaan kondisi lingkungan sesuai UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengeluarkan Instruksi Bupati Padang Pariaman tentang Kewajiban Bagi Setiap Usaha/Kegiatan untuk dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa Amdal atau UKL/UPL.

Meningkatnya perhatian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap kualitas lingkungan ditunjang oleh semakin pekanya masyarakat tentang kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan lestari. Pemerintah daerah melalui instansi teknis seringkali mendapat laporan dari masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Laporan ini sangat membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi pencemaran di sekitar industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan sektor industri, dari pihak perusahaan sendiri hal ini menjadi cambuk untuk semakin meningkatkan



kinerjanya dalam mengelola lingkungan. Selain mewaspadaikan disinsentif yang akan dikenakan jika mereka tak mampu mengelola limbahnya, hal ini juga disebabkan oleh prestise yang diharapkan jika mereka mampu melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, seperti kinerja *proper* yang dihargai dengan predikat emas sampai mendapatkan pengakuan ISO 14000 (sistem manajemen lingkungan).

Pengawasan dan pemantauan yang selama ini dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman terhadap berbagai jenis usaha dan industri telah berimplikasi positif terhadap kemajuan dan mutu limbah yang dihasilkan oleh berbagai jenis usaha dan kegiatan tersebut.

Pembuangan oli bekas dan minyak oleh perusahaan-perusahaan terutama bengkel dan industri yang beroperasi di sepanjang bantaran sungai dan pantai. Limbah rumah sakit juga harus mendapat perhatian yang serius, karena juga berakhir pada aliran sungai.

### C. Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Struktur perkembangan Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada daerah yang mempunyai banyak pusat (*multiplier nucle*) sehingga diharapkan perkembangan wilayah tidak terkonsentrasi pada kawasan pusat pengembangan saja, tetapi merata pada kawasan lain terutama pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai sub-sub pusat pengembangan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan. Salah satu fungsi utama/primer Kabupaten Padang Pariaman untuk 10 tahun ke depan disamping pusat pemerintahan dan kegiatan pariwisata adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa. Fungsi yang satu ini meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, regional and internasional. Dengan pengembangan ketiga fungsi utama tersebut, maka diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor pembangunan di bidang lain seperti pertanian, kelautan, transportasi, pendidikan, industri, perumahan dan pemukiman dan lain-lain.

#### 1). Kondisi Lingkungan

Padang Pariaman mempunyai sejumlah Pasar Nagari/Kecamatan yang tersebar cukup merata diseluruh kecamatan/nagari. Kehadiran pasar ini mempunyai arti yang sangat penting, karena selain mempermudah masyarakat lokal/daerah mendapatkan berbagai kebutuhannya sekaligus media bagi masyarakat sekitar untuk memasarkan hasil produksi mereka. Meskipun skala dan intensitas perdagangan pada pasar ini relatif kecil namun ia mempunyai kelebihan yakni lokasinya yang tersebar dan merata sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain pasar kecamatan/nagari, Padang Pariaman juga mempunyai pasar yang spesifik seperti pasar buah-buahan dan pasar kerajinan. Pasar spesifik dapat berfungsi etalase komoditi unggulan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya menggerakkan sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembangunan dan perbaikan pada beberapa pasar kecamatan/nagari, pasar





buah-buahan, dan pasar kerajinan. Selama periode 2001 – 2004, dari 29 buah pasar yang ada, telah dilakukan pembangunan/rehabilitasi terhadap 12 pasar yang tersebar di 11 kecamatan,

## 2). Tekanan dan Dampak

Kegagalan menata pasar menimbulkan pemusatan yang berlebihan di pasar, sehingga menghambat pengelolaan lingkungan pasar yang seterusnya memacu tumbuh kembangnya mini market yang kurang menguntungkan bagi keuangan pemerintah kabupaten. Disamping itu masih banyak pasar nagari dan pasar kecamatan dalam kondisi rusak baik rusak sedang maupun rusak berat.

## 3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Kebijakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa ditujukan kepada penataan kembali dan melakukan evaluasi sarana dan prasarana yang sudah ada memenuhi persyaratan Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah modern. Kebijakan pembangunan ini sangat terkait dengan berbagai kebijakan lainnya seperti bidang perhubungan dan transportasi kota, keamanan dan ketertiban kota, penataan pasar yang sering menimbulkan masalah sosial yang semuanya adalah merupakan konsekuensi pembangunan.

Perkembangan kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat telah menimbulkan dampak external positif bagi Kabupaten Padang Pariaman. Pengembangan Kota Padang yang cenderung bergerak ke arah perbatasan dengan Padang Pariaman telah menimbulkan wilayah potensi perdagangan baru yang mesti diantisipasi secara tepat. Pengoperasian Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di Kecamatan Batang Anai telah memperkuat dan memperbesar potensi perdagangan di wilayah perbatasan tersebut. Salah satu antisipasi tersebut adalah telah dibangunnya sebuah pasar grosir oleh swasta yang terletak di Kasang Kecamatan Batang Anai serta rencana pembangunan pasar induk pada daerah perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang.

## D. Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Kabupaten Padang Pariaman.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang belum tertangani dengan, khususnya di negara dunia ketiga. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan mempengaruhi timbulan sampah rumah tangga. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin banyak jumlah sampah per kapita yang dibuang. Pelaksanaan pembangunan yang semakin beragam juga akan menghasilkan produk sampingan seperti limbah/sampah dalam bentuk padat, cair, gas maupun kebisingan. Kualitas sampahnya semakin banyak yang bersifat tidak mudah diuraikan oleh alam.

Pengelolaan lingkungan kota juga berkaitan dengan sampah padat rumah tangga yang memerlukan tempat penampungan sementara dan pengolahan air baik di proses secara tradisional maupun modern.



Kegagalan mengelola sampah rumah tangga dapat mendorong perkembangan penyakit yang bersumber dari sampah. Untuk itu penanganan sampah rumah tangga diupayakan secara optimal dari penampungan sementara dalam lingkungan pemukiman sampai pada pengolahan akhir. Penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks, karena itu harus memperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan, perkembangan daerah serta kesehatan masyarakat. Penanganan sampah juga mempunyai potensi yang besar dalam mendukung pengembangan kota, terutama untuk menangani masalah kebersihan wilayah yang diakibatkan oleh aktifitas perekonomian daerah.

### 1). Kondisi Lingkungan

Rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan 810 m<sup>3</sup>/hr, sebagian besar dihasilkan dari rumah tangga, dan kegiatan Pasar. Sedangkan sampah yang dapat dikelola oleh Pemerintah hanya sebagian kecil yakni 12 m<sup>3</sup>/hari, sementara rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan telah mencapai 810 M<sup>3</sup>/hari. Sarana dan Prasarana persampahan yang adapun sangat minim yaitu *Dump Truck* 2 unit dan TPS 20 Unit. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah belum cukup memadai.

Pada awalnya sistem pembuangan sampah yang digunakan adalah *open dumping* yaitu sampah ditumpuk tanpa aturan yang jelas. TPAS yang direncanakan, dibangun dan dikembangkan dengan sistem *sanitary landfill*, ternyata masih melaksanakan sistem *open dumping*. Sampah ditumpuk dan tidak ditimbun sesuai ketentuan yang ada. Kolam tempat penampungan lindi tidak mempunyai konstruksi yang baik, karena hanya berupa kolam biasa tanpa dinding beton sebagaimana perencanaan awal sehingga lumpur dan air lindi masuk ke sungai tanpa melalui bak pengolahan terlebih dahulu. Disamping itu penyemprotan lalat jarang dilakukan.

### 2). Tekanan dan Dampak

Sampah padat yang dibawa ke TPAS bila masuk ke lingkungan perairan mengakibatkan terjadinya kepekatan air, perubahan warna air, terganggunya proses fotosintesa serta berkurangnya oksigen dalam air yang akan berpengaruh terhadap kehidupan organisme dalam air. Dampak lain yang mungkin timbul adalah :

- a. Lumpur dan air lindi masuk ke sungai tanpa melalui bak pengolahan terlebih dahulu. Hal ini akan menurunkan kualitas air tanah dan air permukaan yang dikonsumsi masyarakat yang berada pada lokasi yang lebih rendah dari TPAS.
- b. Kemungkinan terjadinya kebakaran besar dan eksplosif di musim kemarau karena bertumpuknya gas *methane* yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Hal ini dapat terjadi karena saluran gas yang telah ada tidak difungsikan dengan baik.



- c. Anak usia sekolah termotivasi menjadi pemulung di TPAS dan mengabaikan sekolah.
- d. Berkembangnya penyakit yang berkembang melalui media sampah seperti diare dan pes.

### 3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk memperluas jangkauan pelayanan persampahan, maka dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengupayakan penambahan dana, sarana dan prasarana pengangkutan persampahan. Pengelolaan lingkungan akan diupayakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Pengelolaan sampah juga dilakukan secara *composting*.

## D. Perkembangan Pola Usaha Yang Kurang Terarah.

### 1) Kondisi Perekonomian

Kinerja perekonomian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 telah menunjukkan perkembangan berarti. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman menurut harga konstan pada tahun 2005 tumbuh sekitar 9,96 %. Sedangkan dalam tahun yang sama perkembangan ekonomi Propinsi Sumatera Barat naik sekitar 5,53 %. Perkembangan yang cukup signifikan ini didorong oleh hasil-hasil yang dicapai dalam seluruh sektor usaha perekonomian terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa. Pertumbuhan yang sangat pesat ini disebabkan terdapatnya faktor produksi baru di Kabupaten Padang Pariaman yaitu keberadaan Bandara Internasional Minangkabu (BIM) sejak Agustus 2005.

Berdasarkan angka dari BPS, Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2005 telah mencapai Rp. 2.987,16 Milyar, sedangkan menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.971,58 Milyar. Jika dibandingkan dengan PDRB menurut harga konstan ini pada tahun 2004, sebesar Rp. 1.793,02 Milyar, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 rata-rata naik sekitar 9,96 % per tahun.

Struktur perekonomian daerah sampai tahun 2004 dan 2005 masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri dan pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi dari sektor-sektor tersebut melebihi 75 % dari total PDRB, dimana dalam tahun 2005 peranan sektor pertanian 30,69 %, sektor industri dan pengolahan sebesar 12,14 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,86 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 10,84 % dan sektor jasa-jasa sebesar 19,30 %. Perekonomian Padang Pariaman sampai saat ini masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian yang diikuti oleh sektor sekunder yaitu sektor Pertambangan, Penggalian ; sektor industri Pengolahan ; Sektor Listrik, Gas dan Air ; sektor Bangunan dan diikuti oleh sektor Tersier meliputi empat Sektor yaitu sektor Perdagangan,



Hotel, Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi ; sektor Keuangan, sewa dan Jasa Perusahaan ; sektor Jasa – jasa.

Walaupun demikian, terlihat ada kecenderungan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran terjadi penurunan persentase walaupun dari besaran angka rupiah terjadi kenaikan. Begitu juga untuk sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun terjadi penurunan persentase, walaupun dari besaran angka rupiah terjadi peningkatan. Sementara itu untuk sektor lainnya seperti sektor listrik, gas dan air bersih cenderung terjadi peningkatan dari tahun ke tahun baik persentase maupun besaran rupiahnya. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk besaran rupiah terjadi kenaikan pada tahun 2005 ini dibandingkan tahun 2004 yang lalu, kecuali sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa yang mengalami penurunan persentase walaupun dalam besaran rupiah terjadi peningkatan. Untuk gambaran perekonomian Kabupaten Padang Pariaman 5 tahun terakhir dapat dilihat dari perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000,

Meningkatnya nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman juga berdampak pada kenaikan nilai pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman menurut harga berlaku pada tahun 2005 sebesar 7,36 juta rupiah, sedangkan pada tahun sebelumnya pendapatan per kapita penduduk sebesar 5,96 juta rupiah. Sedangkan pendapatan per kapita riil penduduk yang dinilai dari harga konstan tahun 2000 adalah sebesar 4,76 juta rupiah, meningkat dari pendapatan per kapita penduduk tahun 2004 sebesar 4,41 juta.

Pada tahun 2004, secara nominal terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku sebesar Rp. 257,16 milyar, dimana PDRB tahun 2003 sebesar Rp. 2.129,81 naik menjadi Rp. 2.386,97 pada tahun 2004. Kenaikan tersebut belum mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena masih mengandung unsur inflasi. Produktivitas ekonomi Kabupaten Padang Pariaman secara riil bisa dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2004 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,38%

Sebagai daerah yang agraris, struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, yaitu sebesar 29,85 persen, selain sektor pertanian sektor lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor jasa-jasa sebesar 21,02 persen, Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,75 persen tahun 2004., serta sektor industri pengolahan sebesar 14,10 persen tahun 2004. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan adalah sektor bangunan yang naik dari 5,75 persen tahun 2003 menjadi 6,06 persen tahun 2004.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dapat di ukur dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. Dilihat dari PDRB



perkapita Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ketahun memperlihatkan peningkatan. Tahun 2000 PDRB Perkapita sebesar Rp. 4.125.120,00 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 6.316.330,00. Pendapatan Regional Perkapita juga dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2000 Pendapatan Regional Perkapita hanya sebesar Rp. 3.914.600,00 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.973.620,00.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan peranannya dalam pembentukan nilai tambah produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman. Peran sektor pertanian turun dari 30.33 persen tahun 2003 menjadi 29.85 persen tahun 2004. Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sumbangannya turun dari 20.70 persen tahun 2003 menjadi 20.30 persen tahun 2004. Sub. Sektor tanaman perkebunan naik dari 3.22 persen tahun 2003 menjadi 3.24 persen tahun 2004. Sub. Sektor peternakan dan hasil-hasilnya turun dari 2.54 persen tahun 2003 menjadi 2.45 persen tahun 2004. Namun sub. Sektor kehutanan dan sub. Sektor perikanan peranannya yang disumbangkan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman justru mengalami peranan yang sama dengan tahun sebelumnya. Dimana peranan sub, sektor kehutanan baik tahun 2003 dan tahun 2004 adalah sebesar 0.37 persen, sedangkan sub. Sektor perikanan peranannya sebesar 3.49 persen untuk tahun 2003 dan tahun 2004.

Sektor jasa-jasa kontribusinya turun dari 21.09 persen tahun 2003 menjadi 21.02 persen tahun 2004. Penyebab turunnya kontribusi sektor jasa-jasa adalah dengan turunnya kontribusi sektor pemerintahan umum dan pertanahan dari 17.59 persen tahun 2003 menjadi 17.50 persen tahun 2004. Sektor jasa swasta lainnya naik dari 3.50 persen tahun 2003 menjadi 3.51 persen tahun 2004.. Sektor lain yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran disebabkan dengan turun kontribusi sub. Sektor perdagangan besar dan eceran dari 14.49 persen tahun 2003 menjadi 14.40 persen tahun 2004.

Sektor-sektor yang memberikan sumbangan di bawah 5.00 persen terhadap pembentukan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4.79 persen tahun 2003 naik menjadi 4.96 persen tahun 2004. Sektor listrik, gas dan air minum kontribusinya naik dari 1.85 persen tahun 2003 menjadi 1.92 persen tahun 2004. Sektor pengangkutan dan komunikasi kontribusinya naik dari 4.50 persen tahun 2003 menjadi 4.58 persen tahun 2004. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan kontribusinya naik dari 2.68 persen tahun 2003 menjadi 2.76 persen tahun 2004.

## 2) Tekanan dan Dampak

Sektor pertanian di Padang Pariaman mempunyai potensi yang cukup besar. Dari sudut geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki areal pertanian seluas 25.000 Ha. Selain itu dengan dukungan 11



aliran sungai kecil dan besar yang menjadi sumber pengairan akan mampu membuka peluang untuk pengembangan yang lebih besar dimasa depan. Perekonomian Padang Pariaman secara umum masih di nominasi oleh sektor pertanian. Kendati begitu dari sudut pendapatan yang dilihat pada produk domestik regional bruto (PDRB) yang diraih masih terbilang kecil. Rendahnya jumlah PDRB yang di dapat dari sektor pertanian antara lain : masih kurangnya pengetahuan para petani di bidang teknologi pengolahan, baik teknologi hilir maupun teknologi hulu; serta masalah permodalan dan pangsa pasar yang belum stabil sehingga berpengaruh pada hasil penjualan dari produk pertanian yang diterima petani. Dari segi lahan permasalahan yang aktual pada saat ini adalah masih banyaknya lahan yang tidur (belum dimanfaatkan), hal ini disebabkan sebagian pemilik lahan pertanian tidak berada di kampung (di perantauan).

Luas tanam dan produksi tanaman pangan dalam lima tahun terakhir didominasi oleh tanaman padi diikuti oleh jagung, ubi kayu, kedelai dan ubi jalar, namun usaha ini dilakukan masih pada tahap subsistem artinya belum berorientasi pasar, oleh karena itu ke depan tanaman padi dapat menjadi primadona dan prioritas utama tanaman pangan di Padang Pariaman. Produktifitas padi sudah cukup baik yang mencapai 4,98 ton/tahun namun belum optimal karena hanya sebagian para petani yang sudah menggunakan bibit unggul, serta menguasai teknologi, dan masih banyak sawah yang belum mendapat pengairan teknis serta penanganan *pasca* panen yang belum optimal sehingga belum terjamin dengan baik.

Luas lahan perkebunan rakyat rata-rata 45.036.01 ha dengan produksi 29.596.73 ton per tahun. Sejak tahun 2000 sampai 2003 luas lahan mengalami kenaikan sebesar 3.919 ha atau 9.18% dari 42.703.50 Ha pada tahun 2000 menjadi 46. 622.50 ha di tahun 20003, kenaikan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2002 yaitu seluas 5.357.05 ha atau naik 12.54 %, namun kemudian di tahun 2003 mengalami penurunan kembali sebesar 465.05 Ha atau turun 3.05%. Kenaikan luas lahan tersebut berdampak pada peningkatan perproduksi perkebunan.

Besarnya peranan sektor pengangkutan dan komunikasi ini tidak terlepas dari keberadaan Bandara Internasional Minangkabau. Keberadaan BIM berdampak sangat besar pada nilai absolut PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Walaupun faktor produksi yang ada di Bandara tersebut seperti bangunan bandara, pesawat terbang dan faktor produksi lainnya tidak dimiliki oleh penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, faktor tingginya tingkat mobilitas masyarakat Minangkabau ke daerah-atau kota dalam propinsi dan ke daerah atau kota di luar propinsi Sumatera Barat, juga membuat sektor pengangkutan ini akhirnya memiliki kontribusi penting dalam PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Begitu juga dengan sektor perdagangan dan restoran serta sektor industri pengolahan, dimana sektor ini disamping sektor pengangkutan juga menjadi salah satu tradisi yang banyak dikembangkan dalam masyarakatnya, sehingga menjadi wajar kalau akhirnya memiliki kontribusi penting juga dalam PDRB Kabupaten Padang Pariaman tersebut.



Jika dikaitkan dengan kontribusi pembentukan PDRB menurut harga berlaku, struktur perekonomian daerah didominasi oleh 5 sektor yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan rumah tangga, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Sedangkan lainnya seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan relatif lebih rendah. Masalah yang dihadapi dalam 3 tahun terakhir adalah daya serap tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut juga relatif rendah. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian secara nasional yang masih dilandasi krisis dan masih rendahnya produktifitas tenaga kerja pada masing-masing sektor lapangan kerja.

Terjadinya penurunan persentase pada perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasa, pertambangan dan penggalian, sementara sektor-sektor ekonomi lainnya cenderung menunjukkan peningkatan, disatu sisi dapat dilihat sebagai akibat semakin mulai beragamnya alternatif mata pencaharian yang coba digeluti oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Namun disisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa alternatif sektor ekonomi yang digeluti cenderung mulai beralih pada sektor ekonomi yang semakin riil yang mengandalkan sarana prasarana pendukung yang semakin jelas, tahan lama dan bisa di pergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga akhirnya tidak hanya mengandalkan modal dan jasa (tenaga dan service) belaka.

Kecenderungan seperti ini akhirnya berdampak pada ketenaga kerjaan, dimana para pencari kerja yang bisa ditampung akhirnya semakin terbatas. Data pada tahun 2005 menunjukkan bahwa semakin kecilnya pencari kerja yang telah ditempatkan yaitu hanya 820 orang dibandingkan dengan jumlah pencari kerja itu sendiri yang berjumlah 4918 orang. Dari angka-angka pencari kerja dan yang tertampung di lapangan kerja tersebut, persentase perempuan yang tertampung relatif cukup besar yaitu sekitar 495 orang dari 3.078 orang pencari kerja, sementara laki-laki yang bisa ditampung yaitu sebanyak 325 orang yang tertampung dari 1.840 orang pencari kerja).

Hasil yang dicapai pada sektor perekonomian terutama sektor yang menjadi ciri khas kota seperti industri dan perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, karena sektor yang dominan kontribusinya terhadap Kabupaten Padang Pariaman masih mempunyai tingkat produktifitas dan daya serapnya terhadap tenaga kerja yang rendah. Sektor perikanan dan kelautan serta pariwisata daerah yang mempunyai potensi cukup besar dan dapat memberikan harapan ke masa depan masih belum tergarap dan dikelola dengan secara efektif. Masalah yang dihadapi dalam 3 tahun terakhir adalah daya serap tenaga kerja pada masing-masing lapangan usaha relatif rendah. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian secara nasional yang masih dilandasi krisis dan rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja pada masing-masing sektor tersebut.



Disamping itu rendahnya SDM dan penguasaan serta penerapan teknologi yang kurang serta terjadinya peningkatan kompetisi dalam pengelolaan, pengaruh kenaikan BBM, masalah pengaturan perizinan, kerusakan ekosistem, tingginya angka pencurian ikan (*illegal fishing*) dan rendahnya birokrasi pada tingkat pelaksana. Rendahnya tingkat pertumbuhan perkapita penduduk dalam tahun 2006 disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan Kabupaten Padang Pariaman dan meningkatnya fungsi kota sehingga tingginya angka urbanisasi ke Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2007 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian pada tahun 2006. Imbasan kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dirasakan sekali sangat mempengaruhi terhadap perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, khususnya terhadap 9 sektor dalam pembentukan PDRB seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan 2006.

Dalam mengatasi masalah pengangguran dan mengurangi penduduk miskin di bidang ekonomi terdapat berbagai tantangan, antara lain :

- ✓ Implementasi perdagangan bebas menyebabkan persaingan pasar semakin tajam, sehingga pembangunan sektor riil menjadi lamban.
- ✓ Bersamaan dengan kondisi ekonomi nasional, kondisi investasi masih belum kondusif dan para pelaku pasar berhadapan dengan ketidakpastian, sehingga resiko investasi menjadi tinggi.
- ✓ Komoditi yang diperdagangkan masih didominasi produk tradisional yang mempunyai daya saing rendah di tingkat internasional. Produk yang dihasilkan masih setengah jadi dan kualitas rendah serta belum ada *trade mark (brand name)* daerah.
- ✓ Ekspor sangat terbatas pada negara tujuan tertentu dan kebijakan perdagangan luar negeri tergantung kepada negara tersebut seperti Malaysia dan Singapura.

### 3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Kabupaten Padang Pariaman cenderung lebih mengandalkan sektor perdagangan dan pengolahan khususnya makanan, serta sektor pengangkutan sebagai sektor penting dalam peningkatan pendapatan daerahnya. Adanya kecenderungan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dimana terjadi perubahan (peningkatan dan penurunan) pada sektor-sektor ekonomi tersebut cukup direspon oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan baik. Upaya pengembangan ekonomi khususnya sektor perdagangan terus dilakukan dengan adanya upaya membangun beberapa swalayan dan pembenahan beberapa areal untuk pertokoan. Sementara itu pembenahan Kabupaten Padang Pariaman juga dilakukan dalam upaya meningkatkan sektor-sektor lainnya.





Pada tataran masyarakat umum di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, sektor perdagangan juga dianggap sebagai sektor penting dalam peningkatan ekonominya. Oleh sebab itu di tingkat masyarakat umum, upaya peningkatan ekonomi di sektor perdagangan dan pengolahan ini cenderung terus dilakukan. Permasalahannya upaya peningkatan ekonomi melalui sektor perdagangan tersebut khususnya sektor perdagangan kecil (kaki lima), cenderung sering mengalami benturan dengan upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menata kembali wilayahnya.

Melihat kecenderungan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman diatas, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan mengembangkan sektor-sektor usaha kecil dan menengah yang tidak berdampak pada eksploitasi hutan secara berlebihan. Sektor usaha perdagangan dan jasa adalah alternatif yang cukup baik untuk dikembangkan. Akan tetapi karena terbatasnya keterampilan dan modal, maka usaha perdagangan seperti kaki lima dan kios-kios kecil terlihat lebih memungkinkan untuk berkembang. Permasalahannya karena usaha perdagangan kecil seperti ini dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan pasar, maka penataan tempat-tempat usaha dan pelatihan pengembangan usaha perlu dilakukan di kemudian hari. Namun dalam upaya penataan tersebut perlu mempertimbangkan dampak lanjutan terhadap para pedagang itu sendiri, sehingga diharapkan penataan yang dilakukan sekaligus mampu meningkatkan ekonomi para pedagangnya.

Dari perkembangan diatas menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi semakin dominan dan masih tetap menjadi penggerak perekonomian untuk beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu pembangunan kedua sektor ini pada tahun 2007 tetap menjadi prioritas pembangunan dalam kerangka pengembangan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dan diharapkan peningkatan pendapatan penduduk yang sebagian besar masih mengandalkan lapangan kerja pada sektor ini. Sektor industri dan pengolahan dan sektor jasa yang menjadi khas pembangunan daerah yang merupakan penyumbang ketiga dan keempat terbesar dalam pembentukan PDRB akan diupayakan terus peningkatan. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor yang tetap sangat potensial baru memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB sebesar 30,69 %. Kebijakan yang dilakukan adalah tetap menjaga daerah-daerah pertanian produktif yang masih potensial sebagai daerah pertanian dengan membatasi pergeseran penggunaan lahan pertanian.

Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 9,96 % pada tahun 2005 dibutuhkan investasi sebesar Rp. 6.234 Milyar menurut harga konstan tahun 2000, sedangkan untuk merealisasikan pertumbuhan sebesar 6,20 % dibutuhkan investasi sebesar Rp. 7.890 Milyar. Investasi tersebut berasal dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Investasi masyarakat dan dunia usaha akan berperan lebih besar dibandingkan investasi pemerintah. Untuk itu program pemerintah akan diarahkan kepada penyiapan



kerangka kebijakan dan peningkatan pelayanan serta menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendorong aktifitas penanaman modal daerah.

### 3.3 Sumberdaya Manusia.

#### A. Tingginya Pertambahan Penduduk dan Tidak Merata penyebaran Penduduk

##### 1) Kondisi Kependudukan

Pertambahan penduduk ini terjadi di hampir semua daerah kecamatan. Penduduk Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan masih akan mempunyai laju pertumbuhan yang cukup tinggi, baik akibat kelahiran maupun masih relatif besarnya arus migrasi masuk ke Kabupaten Padang Pariaman. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 2000 – 2004 yang tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 1.75% dan terendah pada tahun 2002 yaitu dengan laju pertumbuhan penduduk 0.92%. Sedangkan pada tahun 2003 dan 2004 relatif sama yaitu 1.41% dan 1.40%. Laju pertumbuhan penduduk yang semula bergerak pada angka 2,36 % akan mulai menurun menjadi 2,12 % (menurut perkiraan BPS 2003-2010). Namun dalam periode 2006–2010, laju pertumbuhan penduduk sedikit lebih rendah yaitu 1,98 % rata-rata per tahunnya.

Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 berjumlah 381.792 jiwa dengan jumlah rumah tangga yaitu 84.849 rumah tangga, dengan kepadatan 287,32 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Nan Sabaris dengan 884,96 jiwa per Km<sup>2</sup>, serta Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan 633,84 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk terjarang terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan kepadatan 145,50 jiwa/Km<sup>2</sup>, serta Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dengan kepadatan 104,44 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dilihat perkecamatan, jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Batang Anai yaitu 43.352 jiwa dengan persebaran 11,35% dan Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 39.776 jiwa dengan persebaran 10,42% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Padang Sago sebanyak 8.117 jiwa atau 2,13% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2000 sebanyak 265 orang per Km<sup>2</sup>, dan pada tahun 2004 sebanyak 284 orang per Km<sup>2</sup>, berarti terjadi penambahan 19 orang per Km<sup>2</sup> atau rata-rata 4 orang per Km<sup>2</sup>. Untuk tingkat kecamatan, kepadatan penduduk yang tertinggi adalah di Kecamatan Nan Sabaris dengan tingkat kepadatan 874 orang per Km<sup>2</sup>. dan terendah di Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam yaitu sebesar 104 orang per Km<sup>2</sup>.

Rasio Jenis Kelamin ( Sex Ratio ) sejak tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, dengan rata-rata sex ratio 94, yang artinya jumlah penduduk laki-



laki sebanyak 94 orang untuk setiap 100 penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, diperoleh gambaran bahwa Rasio Jenis kelamin penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2000 sebesar 92. Rasio tersebut secara berturut-turut pada tahun 2003 terus meningkat menjadi 95 dan pada tahun 2003 menjadi 96. Meskipun jumlah penduduk laki-laki terus meningkat namun jumlah penduduk perempuan masih lebih besar.

Jika diamati lebih lanjut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada penduduk laki-laki adalah pada umur 15 tahun keatas. Sedangkan pada umur sampai dengan 14 tahun, sex ratio menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan. Dengan perkataan lain semakin tinggi kelompok umur, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Padang Pariaman menjadi semakin sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini sangat dimungkinkan karena aktivitas penduduk laki-laki dewasa secara umum lebih besar sehingga faktor Resiko kematian atas penduduk laki-laki juga lebih besar dari perempuan. Disamping itu juga turut mempengaruhi adalah budaya merantu yang dilakukan oleh terutama penduduk laki-laki dewasa.

Rasio Ketergantungan Usia (RKU) menggambarkan beban tanggungan ekonomi usia produktif ( 15 – 64 tahun) terhadap usia tidak produktif. Pada tahun 2004 usia penduduk produktif sebanyak 210.141 orang atau 54.29% penduduk usia tidak produktif sebanyak 169.348 orang atau 45.71% dari jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya sebanyak 130.056 orang atau 36.31% adalah penduduk usia dibawah 15 tahun. Rasio Ketergantungan Usia pada tahun 2004 sebesar kurang lebih 84. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Padang Pariaman menanggung beban ekonomi 84 orang dengan 65 orang diantaranya adalah usia dibawah 15 tahun.

## 2) Tekanan dan Dampak

Masalah kependudukan yang meliputi antara lain jumlah dan laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, komposisi dan distribusi, merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan namun dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan. Menjadi potensi atau beban terutama sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya.

Kepadatan penduduk disuatu daerah dapat mencerminkan keadaan tinggi rendahnya permasalahan sosial masyarakat. Dalam artian bahwa, semakin tinggi kepadatan penduduk sangat dimungkinkan semakin tinggi pula kompleksitas permasalahannya antar lain masalah, lapangan kerja, kriminalitas, permukiman, kenakalan remaja, narkoba dan permasalahan sosial lainnya. Laju pertumbuhan penduduk yang kecil akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, sebaliknya pertumbuhan yang cepat dapat mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk terlebih jika tidak diimbangi oleh kenaikan produksi yang lebih tinggi.



Pertumbuhan penduduk apabila disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah dan menjadi tanggungan masyarakat usia produktif.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan perubahan penduduk disuatu daerah. Dengan diketahuinya capaian jumlah dan laju pertumbuhan, akan sangat membantu pemerintah terutama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya.

Tingkat kepadatan penduduk yang ideal disuatu daerah, tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung dari potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di daerah tersebut untuk memanfaatkan potensi yang ada. Tingkat kepadatan yang relatif tinggi didaerah perkotaan pada umumnya sangat rawan terhadap terjadinya konflik sosial yang muncul di masyarakat seperti banyaknya pengangguran dan munculnya lingkungan kumuh. Sebaliknya jika tingkat kepadatan relatif rendah akan menyebabkan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat relatif mahal.

Melihat data yang ada, berarti ada kecenderungan penambahan penduduk semakin tinggi menuju ke daerah pinggiran. Hal ini sangat terkait dengan semakin tingginya tingkat hunian penduduk ke areal-areal pemukiman khususnya di berbagai perumahan yang dikembangkan di kedua daerah tersebut. Artinya ada kecenderungan masyarakat mulai semakin *familiar* untuk mencari dan menempati rumah-rumah yang ada di pinggiran, walaupun ada kecenderungan penurunan jumlah penyediaan perumahan dibandingkan tahun 2004 yang lalu.

Tekanan terhadap lingkungan ini cenderung semakin tinggi, karena nilai-nilai dan perilaku dalam membuang sampah masih mengandalkan cara penumpukan di sembarang tempat. Artinya nilai-nilai dan perilaku "membuang sampah pada tempatnya" relatif belum membudaya secara baik, sehingga tebaran sampah yang ada akan semakin membuat lingkungan pinggiran kota yang menjadi bagian hulu dari sungai-sungai yang ada semakin tercemar.

### 3) Respon Pemerintah dan Masyarakat.

Upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengembangkan wilayahnya kearah pinggiran, disatu sisi telah direspon pemerintah kabupaten dengan memberikan rekomendasi untuk pembangunan berbagai perumahan di pinggiran. Untuk mendukung upaya tersebut, maka beberapa sarana prasarana pendukung juga telah dikembangkan.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman juga mulai menempatkan daerah pinggiran Kabupaten Padang Pariaman bukan lagi sebagai daerah yang jauh dan "terisolir". Ada kecenderungan



perubahan pola pikir inilah yang kemudian menempatkan daerah pinggiran tersebut semakin dipadati oleh penduduk dan ditempatkan sebagai daerah ideal untuk pemukiman. Permasalahannya masih terbatasnya sarana prasarana pendukung seperti transportasi, komunikasi dan sarana pendukung kota lainnya seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) masih relative terbatas. Khusus untuk tempat pembuangan sampah sementara, akibat masih terbatasnya sarana prasarana pendukung akhirnya berdampak pada aktifitas lainnya seperti pendidikan, sehingga tekanan terhadap lingkungan akibat limbah rumah tangga tersebut relatif masih tinggi.

Adanya korelasi antara penyebaran dan kepadatan penduduk dengan semakin tingginya tingkat penumpukan dan pencemaran limbah buangan rumah tangga di daerah pinggiran, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pengadaan sarana prasarana pembuangan sampah baik dari jumlah maupun kontinuitasnya perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah dan kondisi kependudukan yang di daerah-daerah pinggiran tersebut.

Kondisi kependudukan yang sebahagian besar adalah masyarakat Minangkabau cenderung masih menempatkan ruang bagian belakang rumah sebagai daerah yang kotor. Artinya, berkaitan dengan pola pembuangan sampah, persepsi anggota masyarakat tentang bagian depan rumah sebagai *ruang bersih* dan bagian belakang rumah sebagai *ruang kotor* relatif masih kuat di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, maka ketika sungai dan saluran sekunder maupun tersier tersebut berada di bagian belakang rumah, maka perilaku membuang sampah ke sungai ataupun ke saluran sekunder maupun tersier yang ada menjadi hal yang wajar. Sementara apabila sungai atau saluran sekunder dan tersier tersebut berada di depan rumah, maka upaya membuang sampah di tempat tersebut akan jarang ditemui.

## B. Terbatasnya Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

### 1) Kondisi Kesehatan

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2005, kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman relatif semakin membaik bila dibandingkan pada kondisi tahun 2004 sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dengan terjadinya penurunan jumlah penderita beberapa penyakit yang ada dimana pada tahun 2002 tercatat sebanyak 362.302 orang, sementara pada tahun 2003 menurun menjadi 207.377 penderita atau terjadi penurunan sebanyak 25,37%. Adapun jenis penyakit yang banyak diderita masih berkisar pada jenis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang pada tahun 2003 menempati urutan teratas dengan penderita sebanyak 41,35%. Kemudian diikuti dengan jenis penyakit remautik, jaringan bawah kulit dan jaringan gusi (*prodenta*).

Dari sebahagian besar jenis penyakit yang ada, ada kecenderungan terjadi penurunan jumlah penderita. Namun pada sisi lain jenis penyakit lainnya justru mengalami peningkatan. Misalnya jenis penyakit diare



yang umum tahun 2002 banyak diderita oleh masyarakat penduduk Kabupaten Padang Pariaman, pada tahun 2003 ini mengalami penurunan, bahkan untuk jenis penyakit seperti jaringan gusi (prodental) pada tahun 2003 ini mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sekitar 56,70% dari tahun 2002 sebelumnya, diikuti jenis penyakit ISPA (50,08%) dan diare (47,52%). Sementara jenis penyakit alergi kulit mengalami peningkatan jumlah penderita yang cukup tinggi yaitu sekitar 120,62%, diikuti jenis penyakit asma (9,77%) dan reumatik (3,27%)..

Adanya kecenderungan penurunan secara umum penderita beberapa jenis penyakit ini lebih disebabkan karena pada tahun 2005 ada kecenderungan semakin bertambahnya tenaga-tenaga kesehatan yang ada di berbagai sarana kesehatan yang ada dibandingkan tahun 2004 sebelumnya. Artinya dilihat dari data yang ada dari segi sarana kesehatan justru tidak mengalami penambahan unit, namun karena terjadinya penambahan tenaga kesehatan ini membuat kondisi kesehatan masyarakat relatif menurun dari tahun sebelumnya. Untuk tenaga dokter tercatat ada sekitar 700 tenaga dokter di Kabupaten Padang Pariaman, dimana 80 diantaranya tersebar di berbagai puskesmas utama dan puskesmas pembantu di kecamatan yang ada yang ada Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan pendekatan 10 jenis penyakit terbanyak yang diperoleh dari kunjungan ke Puskesmas, telah berhasil dikompilasikan perkembangan jenis penyakit yang diderita pengunjung/pasien yang datang berobat. Selama 5 terakhir ada 25 jenis penyakit yang dikeluhkan oleh pasien yaitu infeksi saluran pernafasan (atas dan bawah), penyakit kulit, gigi, tulang, telinga, mata dan lainnya. Penyakit degeneratif seperti hipertensi dan darah tinggi sebagai penyakit yang cukup banyak diderita pengunjung puskesmas, mulai muncul tahun 2003. Hal ini menunjukkan telah mulai terjadinya pergeseran pola penyakit yang diderita oleh masyarakat, dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan parasit kearah penyakit degeneratif.

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman pada 2005 Puskesmas 23 buah, Puskesmas Pembantu 59 buah, Puskel 22 unit, Polindes 103 unit, Posyandu 651 buah, Balai Pengobatan penyakit paru (BP4) 1 unit, unit pelayanan swasta 23 buah yang terdiri dari 10 rumah bersalin dan 13 balai pengobatan, 1 unit Akper Pemda dan 1 unit gudang Farmasi.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman masalah derajat Kesehatan serta masalah lain yang dihadapi di Kabupaten Padang Pariaman di saat ini adalah :

- 1) Kasus Gizi buruk cenderung meningkat setiap tahunnya dari 0,22 % tahun 2001, 0,24 % tahun 2002, 0,46 % tahun 2003, dan hasil survei tahun 2004 5 % dan untuk tahun 2005 dari hasil penimbangan masal bulan Agustus 2005 berdasarkan indikator berat badan banding umur didapat gizi buruk sebanyak 3,4% dan gizi kurang 13,5% sedangkan berdasarkan tinggi badan banding



umur didapat anak sangat pendek 14,5%, anak pendek 14,7% dan anak normal 70,8%. Berdasarkan berat badan banding tinggi badan, anak yang sangat kurus 620 orang (2,9%) yang perlu ditanggulangi lewat PMT. Pemulihan anak yang kurus 6,9%. Dan berdasarkan ketiga indikator berat badan banding umur, tinggi badan banding umur, berat badan banding tinggi badan anak yang terindikasi *Marasmus* dan *Kwasiokor* 185 orang.

- 2) 30 % penduduk Kabupaten Padang Pariaman hidup di bawah garis kemiskinan
- 3) Angka kematian ibu hamil, ibu bersalin dan bayi dan masih relatif tinggi di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kesehatan belum sepenuhnya menggambarkan keadaan yang seutuhnya karena tercatat hanya kejadian yang dilaporkan oleh Puskesmas
- 4) Masih rendahnya kunjungan Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman ( *Visit rate* ).
- 5) Tenaga Kesehatan sangat terbatas dan tidak merata khusus tenaga dokter, bidan dan perawat

## 2) Tekanan dan Dampak

Terjadinya penurunan secara umum jumlah penderita jenis penyakit yang ada, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat mulai semakin membaik, walaupun berdasarkan jenis-jenis penyakit yang diderita, untuk jenis penyakit tertentu mengalami penurunan jumlah penderita, sementara untuk jenis penyakit lainnya justru mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini pada satu sisi bisa dilihat sebagai dampak dari semakin bertambah dan tersebarnya tenaga-tenaga kesehatan di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini bisa dilihat dari semakin meratanya jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi di berbagai Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang di Kabupaten Padang Pariaman disamping tenaga bidan yang ada sebagai implikasi dari program pengiriman dokter umum dan dokter gigi ke puskesmas-puskesmas yang ada .

Namun masih terbatasnya program pengiriman dokter-dokter spesialis selain dokter gigi ke berbagai puskesmas yang ada ke berbagai kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman ini membuat jenis-jenis penyakit tertentu akhirnya belum mampu ditangani secara baik. Dengan demikian, penduduk yang menderita jenis penyakit yang relatif membutuhkan penanganan serius seperti asma dan rematik harus berobat ke rumah sakit-rumah sakit atau ke dokter-dokter spesialis yang kecenderungannya terkonsentrasi di pusat kota. Sementara faktor ekonomi dan transportasi sebahagian masyarakat yang ada di pinggiran kota relatif masih terbatas sehingga ada kecenderungan untuk jenis-jenis tertentu akhirnya didiamkan dan tidak dibawah ke dokter spesialis yang ada di pusat-pusat kota.



### 3) Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk menanggulangi masalah pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya antara lain dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (askeskin) yang dilaksanakan melalui PT. ASKES (Persero) yang mengacu kepada data rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan No. 56/MENKES/SK/II/2005, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup sehat cenderung semakin tinggi, namun ini sering terkendala dengan faktor ekonomi masyarakat itu sendiri. Kecenderungan data dimana terjadi peningkatan untuk jenis-jenis penyakit tertentu seperti alergi kulit, asma dan reumatik diasumsikan lebih karena faktor ekonomi masyarakatnya. Artinya untuk jenis penyakit-penyakit tertentu yang seharusnya dibawa ke dokter-dokter spesialis, namun karena masih terbatasnya ekonomi masyarakat khususnya di pinggiran kota membuat jenis-jenis penyakit yang ada cenderung dibiarkan saja.

Kecenderungan peningkatan jenis-jenis penyakit yang membutuhkan penanganan serius dari dokter-dokter spesialis ini juga belum direspon oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara maksimal. Upaya dan rencana pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun beberapa tempat kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan swasta cenderung terhambat karena masalah teknis. Akan tetapi upaya pengiriman dan penambahan dokter-dokter spesialis di berbagai puskesmas dan puskesmas pembantu cenderung masih terbatas pada dokter-dokter umum dan dokter-dokter gigi.

Melihat gambaran bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang semakin membaik bukan berarti membuat pihak-pihak terkait akhirnya harus berhenti sedemikian rupa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berangkat dari keberhasilan program pengiriman dan penempatan dokter gigi di berbagai puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman tersebut, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hendaknya dapat menindak lanjuti dengan pengiriman dan penyebaran dokter-dokter spesialis lainnya ke puskesmas-puskesmas tersebut. Artinya program pengiriman dan penempatan dokter spesialis selain spesialis gigi tersebut, tetap mempertimbangkan kecenderungan jumlah penderita penyebaran jenis penyakit di daerah-daerah tersebut, sehingga penempatannya lebih disesuaikan dengan kebutuhan dalam penanganan pengurangan penderita jenis penyakit tertentu.

Pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas cenderung menunjukkan peningkatan dengan semakin meluasnya cakupan kunjungan (*visite rate*) dengan tingkapan kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan kesehatan. Hal ini juga berhubungan dengan informasi yang





diketahui oleh masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun melalui media massa. Selain dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia kesehatan dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Dengan harapan tersedianya sumberdaya yang bermutu dan berkualitas dapat meningkatkan keberhasilan upaya kesehatan, manajemen kesehatan dan perbaikan gizi.

Dari segi fisik, pembangunan sarana kesehatan baik Puskesmas maupun Pustu, cukup merata di setiap pelosok dan dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Namun demikian belum diikuti oleh penyebaran tenaga medis, sehingga mutu pelayanan kesehatan belum sesuai dengan yang diharapkan. Derajat kesehatan masyarakat pencapaiannya masih bervariasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator kesehatan misalnya umur harapan hidup, kematian bayi, kematian balita dan status gizi buruk mengalami peningkatan, sedangkan angka kematian ibu mengalami penurunan.

Disamping itu, melihat kecenderungan mulai semakin meningkatnya jenis-jenis penyakit yang membutuhkan penanganan dokter spesialis tersebut, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hendaknya juga mulai menyiapkan sarana prasarana pendukung kesehatan secara merata dan tersebar di semua wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Artinya pembangunan sarana prasarana kesehatan hendaknya tidak dikonsentrasikan lagi di ibu kota kabupaten, namun juga mulai mempertimbangkan penyebarannya ke pinggiran Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu alternatif yang memungkinkan adalah dengan mengembangkan puskesmas-puskesmas utama yang telah ada sebagai pusat kesehatan dengan sarana prasarana pendukungnya, sehingga mampu tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tetapi sekaligus mampu penanganan jenis penyakit yang ada di masyarakat tersebut tanpa perlu merujuk penderita (pasien) ke rumah sakit yang ada.

### C. Kerawanan dan Kerentanan Sosial

#### 1) Kondisi

Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2004 tercatat sebanyak 340.489 jiwa yang terdiri dari 180.762 laki-laki dan 189.727 perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 278 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Dari jumlah 81.944 keluarga, sebanyak 31.964 keluarga (39,01%) tergolong keluarga miskin, yang tersebar pada 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Keberadaan Kabupaten Padang Pariaman yang terus berkembang juga menunjukkan kecenderungan mulai meningkatnya jumlah penduduk yang rawan sosial. Untuk melihat banyaknya anak usia sekolah yang sedang mengikuti pendidikan pada berbagai tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Disini digunakan 2 indikator pendidikan yang lazim digunakan yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan



angka partisipasi murni (APM). APK menunjukkan daya serap murid terhadap penduduk usia sekolah yaitu SD usia 7-12 tahun, SLTP usia 13-15 tahun dan SLTA usia 16-18 tahun. Sedangkan APM merupakan perbandingan daya serap pada usia tertentu dengan penduduk menurut usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman jika dilihat dari Profil Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman terlihat bahwa dari indikator masukan berupa rasio siswa per guru kondisinya cukup baik dimana untuk tingkat SD rata-rata adalah 1 : 23, untuk SMP 1:12 dan SMA 1:10. Ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang ada cukup untuk melayani siswa baik untuk SD, SMP maupun SMA. Mungkin yang perlu mendapat perhatian disini adalah sebaran guru-guru yang mengajar, baik dari segi tingkat pendidikan yang akan menjadi ukuran kelayakan seorang guru untuk mengajar, ketepatan menempatkan seorang guru pada sekolah-sekolah serta kesesuaian ilmu yang dimiliki oleh seorang guru dengan bidang yang diajarkannya.

Untuk melihat rasio buku-murid biasanya dilihat dari banyaknya buku wajib bagi siswa yang tersedia di perpustakaan. Untuk sekolah-sekolah yang ada di Kab. Padang Pariaman kondisi ini bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Sekolah-sekolah yang ada baik itu SD, SMP dan SMA sepertinya kurang memperhatikan pentingnya kehadiran sebuah perpustakaan bagi siswa, khususnya bagi siswa yang tidak mampu untuk membeli buku wajib yang harus mereka miliki untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dari 400 buah SD yang ada hanya 26 SD yang memiliki perpustakaan, hal ini berarti persentasenya hanya 6,5 persen dari keseluruhan sekolah. Disini belum dapat dilihat rasio dari buku-murid pada sekolah yang memiliki perpustakaan karena tidak adanya data mengenai jumlah buku yang ada di perpustakaan. Sementara untuk SMP kondisinya bahkan lebih memprihatinkan karena tidak ada satupun SMP yang memiliki perpustakaan. Namun pada tingkat SMA kondisinya ternyata jauh lebih baik, dimana dari 19 sekolah yang ada, sebanyak 12 sekolah sudah memiliki perpustakaan, berarti sebesar 63,16 persen dari seluruh sekolah yang ada. Namun disini juga belum dapat ditampilkan rasio buku-murid karena juga tidak ada data mengenai jumlah buku-buku yang ada di perpustakaan.

Melihat pada rasio siswa-perkelas dapat dikatakan bahwa kelas-kelas pada SD, SMP dan SMA tidaklah terlalu padat, sehingga dapat diharapkan murid-murid yang belajar mendapat ruang yang cukup sehingga dapat belajar dengan baik. Rasio siswa-perkelas pada SD-SD yang ada di Kab. Padang Pariaman rata-rata adalah 1:24, untuk SMP adalah 1:36 dan SMA adalah 1:36. Namun yang perlu mendapat perhatian disini adalah ruang kelas yang layak untuk ditempati atau digunakan untuk proses belajar mengajar. Ruang kelas yang baik kurang dari 50 persen untuk SD dan kondisi rusak berat mencapai angka 20,48 persen. Sedangkan untuk SMP+MTs dan SMA+MA bisa dikatakan masih dalam kondisi yang baik dan layak untuk dipakai.



Untuk indikator keluaran dapat dilihat dari angka putus sekolah, tingkat mengulang siswa, nilai akhir siswa, persentase siswa yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta Angka Partisipasi Kasar. Dari angka putus sekolah dapat dilihat bahwa kondisi angka pengulangan siswa SD masih cukup tinggi yaitu rata-rata 9,76 persen. Namun tingkat putus sekolah jauh lebih rendah yaitu rata-rata 0,50 persen. Sementara angka melanjutkan rata-rata 93,26 persen. Angka Penyerapan Kasar rata-rata dari SD-SD yang ada mencapai 95,35 persen. Keadaan ini diharapkan tentunya akan bertambah baik, karena jika tidak, wajib belajar 9 tahun belum akan terealisasi secara baik. Nilai akhir siswa SD rata-rata untuk Kab. Padang Pariaman untuk tahun ajaran 2005/2006 adalah 5,74.

Sementara itu untuk tingkat SMP tingkat mengulang siswa 0,90 persen, angka putus sekolah 1,55 persen dan angka melanjutkan 82,71 persen. Rendahnya angka mengulang siswa ini perlu mendapat perhatian, karena dengan pendidikan yang kurang memadai ini hanya akan membebani siswa, karena ketika tamat SMP seseorang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memasuki pasar kerja. Rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional pada tingkat SMP tahun ajaran 2005/2006 adalah 6,09. Dari angka tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah ditemukan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP adalah 77,86.

Kondisi yang lebih baik terlihat pada tingkat SMA, dengan angka mengulang sebesar 0,68 persen, angka putus sekolah 0,87 persen, dan dengan tingkat kelulusan sebesar 104,12 persen. Tetapi untuk nilai Ujian Akhir Nasional SMA memiliki nilai yang masih rendah yaitu rata-rata 4,53. Disamping itu Tingkat Partisipasi Kasar terendah juga pada tingkat SMA+MA yaitu sebesar 44,67 persen. Dari mutu SDM guru menurut tingkat pendidikan akhir maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SMA+MA yaitu sebesar 90,57 persen. Sedangkan guru yang tidak layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SMP+MTs sebesar 6,84 persen.

Angka partisipasi kasar merupakan salah satu indikator keluaran. Angka partisipasi kasar akan menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk yang berkesesuaian (dalam usia). Berdasarkan perhitungan APK baik untuk tingkat SD+MI, SMP+MTs dan SMA+MA ditemukan bahwa APK tertinggi terdapat ditingkat SD+MI yaitu 115,07. Sedangkan APK untuk SMP+MTs adalah 77,46 dan APK SMA+MA adalah 44,67 (rata-rata di Kabupaten Padang Pariaman).

Secara khusus dapat dikatakan APK lebih dipengaruhi oleh kepadatan penduduk kelompok usia sekolah serta jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan dalam usia sekolah. APK SMA yang rendah disebabkan jumlah siswa SMA+MA yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki usia yang berkesesuaian. Rendahnya jumlah siswa SMA karena jumlah siswa SMP yang melanjutkan ke SMA



lebih rendah dari pada yang melanjutkan dari SD ke SMP. Jumlah siswa SD yang melanjutkan ke SMP mencapai 92,91 persen sementara yang melanjutkan dari SMP ke SMA sebesar 76,20 persen.

Jika dilihat secara umum variable-variabel yang secara signifikan mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar antara SD, SMP dan SMA cukup berbeda. Untuk Sekolah Dasar variable yang lebih mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar adalah tingkat pelayanan sekolah, Rasio siswa-persekolah, jumlah desa terpencil dan kelompok usia. Untuk Sekolah Menengah Pertama variable-variabel yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar adalah tingkat pelayanan sekolah, kelompok usia dan tingkat kesulitan sekolah. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas variable yang lebih mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar adalah Rasio siswa-perkelas, Rasio siswa- per sekolah serta kelompok usia.

Angka Partisipasi Kasar ini dapat memperlihatkan pemerataan pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Semakin rendah nilai APK berarti semakin rendah kelompok penduduk pada usia yang setara menikmati pendidikan yang seharusnya. Dari variable-variabel yang dikemukakan diatas maka dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan APK dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi layanan sekolah serta meningkatkan jumlah siswa yang menyambung ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu dari SD ke SMP dan SMP ke SMA.

## 2) Tekanan dan Dampak

Berdasarkan data, memang secara umum ada kecenderungan pada tahun 2005 (periode Januari - Oktober 2005) terjadi penurunan jumlah kasus gangguan keamanan dan pelanggaran ketertiban umum tersebut dibandingkan tahun 2003. Namun pada kasus-kasus tertentu justru terjadi peningkatan seperti dalam kasus penganiayaan berat (anirat) dimana pada tahun 2003 hanya 127 kasus menjadi 168 kasus pada tahun 2004. Begitu juga untuk kasus perjudian dan pemalsuan surat-surat, bahkan mulai bertambahnya kasus pembunuhan. Sementara kasus lain yang pada tahun tahun sebelumnya menggejala seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) cenderung menurun di tahun 2005 ini.

Dari data tersebut juga mengungkapkan bahwa kasus penganiayaan berat (anirat) pada tahun 2004 menduduki rangking ke-7 dari berbagai kasus yang ada, namun pada tahun 2005 tercatat sebagai kasus dengan rangking ke-3 terbanyak. Artinya kasus penganiayaan berat (anirat) mulai menggejala di dalam masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dimana kasus seperti ini cenderung berantai. Dengan demikian, maka terjadinya peningkatan pada kasus-kasus lain seperti pembunuhan, perjudian dan pemalsuan surat berkemungkinan adalah mata rantai penyebab dan akibat dari kasus anirat tersebut. Ketidakjelasan dalam penanganan masalah sosial menyebabkan peningkatan kasus kriminal, pekerja seks komersial, narkoba, anak jalanan dan sebagainya. Berbagai persoalan tersebut telah membentuk citra pemerintah yang negatif dan mempengaruhi minat masyarakat berperan serta.



Dari kondisi secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belum terwujudnya masyarakat mandiri yang berbasis Nagari
2. Keberadaan lembaga-lembaga swadaya di masyarakat belum berkembang, padahal sangat dibutuhkan Pemerintah sebagai mitra dalam pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kehidupan masyarakat.
3. Masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat soal partisipasi masyarakat dalam penggunaan lahan sebagai penunjang pembangunan.
4. Perencanaan tingkat bawah belum mencerminkan aspirasi masyarakat dan kurang akomodatif dengan perencanaan sektoral.
5. Belum semua jajaran aparat Pemerintah yang membawahi pemberdayaan masyarakat memahami tugas dan fungsi arti dan pentingnya pemberdayaan masyarakat.
6. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dimiliki oleh aparat yang membawahi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman

### 3) Respon Pemerintah dan Masyarakat

Adanya kecenderungan peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat, disatu sisi cukup direspon oleh masyarakat dengan baik. Ini terlihat dari semakin gencarnya upaya masyarakat untuk memberantas berbagai perilaku yang berkemungkinan berpotensi untuk menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan karena beberapa fenomena gangguan keamanan dan ketertiban lebih disebabkan karena faktor-faktor yang ditimbulkannya seperti minuman keras dan permasalahan pola hubungan dalam masyarakat.

Respon masyarakat ini, disisi lain juga cukup direspon secara baik oleh pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, rencana pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengucurkan dana untuk memberantas togel misalnya adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang berkembang ditengah masyarakat yang diperkirakan berpotensi untuk menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban. Akan tetapi upaya pemerintah tersebut masih terbatas pada penanganan masalah-masalah yang telah menjadi masalah. Upaya penanganan berbagai aktifitas yang cenderung berpotensi menjadi gangguan keamanan dan ketertiban, cenderung belum diantisipasi secara maksimal.

Melihat kecenderungan data yang ada, maka perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dimana ada kecenderungan untuk tahun-tahun ke depan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang rawan sosial. Karena penduduk rawan sosial ini berpotensi untuk menciptakan kondisi



disharmoni atau gangguan keamanan dan ketertiban, maka upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum perlu menjadi perhatian serius. Ini terlihat dari mulai meningkatnya jumlah kasus penganiayaan berat, bahkan pada kasus pembunuhan.

Krisis ekonomi yang bersifat multi dimensiinal terus berlanjut di era pemerintahan reformasi, peningkatan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan terus bertambah, akibatnya semakin banyak balita yang kekurangan gizi, semakin banyak anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan (semakin banyak anak putus sekolah di tingkat SD sampai SLTA karena alasan ekonomi). Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, baik pemerintah pusat maupun di daerah telah berupaya untuk mencoba berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin meluas. Program PDM-KE, kompensasi subsidi BBM, program Kartu Sehat, RASKIN, Program P2D, dan lain-lain adalah diantara bentuk program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkreasi dan berinovasi untuk menggali potensi yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan terutamanya pada Nagari, yang kesemuanya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tantangan dan pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya warisan berbagai persoalan dan permasalahan yang berkembang dan membelenggu hampir semua daerah saat ini adalah kemiskinan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai program-program pemberdayaan masyarakat (dari tahun 2001-2005) yaitu :

- a) *Revolving fund* Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/Usaha ekonomi masyarakat Simpan Pinjam (UED-SP/UEM-SP), dengan jumlah kelompok sebanyak 23 buah dengan anggota sebanyak 1229 orang.
- b) *Revolving fund* teknoogi tepat guna dengan jumlah kelompok sebanyak 18 buah dan jumlah anggota sebanyak 483 orang.
- c) Pembinaan, Monitoring dan evaluasi *revolving fund* UED/UEM-SP dan TTG
- d) Orientasi dan pembinaan Pokmas UEM-SP dan TTG.
- e) Pembinaan dan evaluasi Peningkatan P2WKSS.
- f) Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah ( PMTAS )
- g) Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.( PAR )
- h) Peningkatan SDM bagi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ( LPMN ) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari ( KPMN )
- i) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Nagari ( BBGRMN )
- j) Pembinaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari ( Musrenbang )



Walaupun program tersebut telah berjalan, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan terutama dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang memperoleh program tersebut. Masih banyak terdapat kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program tidak berjalan sesuai tujuan program dimaksud, yang disebabkan oleh :

- a). Karena ketidakmampuan mereka untuk mengelola bantuan yang diberikan untuk menjadi usaha ekonomi yang produktif.
- a) Perilaku kelompok yang menganggap bantuan tersebut sebagai hadiah dari pemerintah.
- b) Kekurang terpaduan koordinasi unit kerja yang menangani.
- c) Terjadinya bencana alam seperti pada pengembangan usaha ikan, produksi batu bata dan kebun cabe.
- d) Pemasaran yang bermusim dan tidak adanya penampungan pemasaran hasil produksi.
- e) Kelompok P2WKSS baru bersifat penguatan kelembagaan dan pemberian keterampilan, sedangkan tindak lanjutnya berupa penguatan modal belum lagi dilaksanakan.
- f) Budaya malas yang masih mengerogoti sebagian besar masyarakat.



## BAB IV

### TINDAK LANJUT

Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengendalikan berbagai perubahan lingkungan selama tahun 2006, secara umum telah memberikan hasil yang cukup berarti dalam mengendalikan perubahan kualitas lingkungan, agar tidak menuju ke arah yang tidak diinginkan. Namun usaha yang telah ada masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama dalam menerapkan berbagai peraturan perundangan lingkungan hidup secara nyata terhadap setiap orang yang telah melakukan perubahan lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, disamping itu tindak lanjut kedepan/diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, analisis isu pokok lingkungan serta evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan tekanan, status dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

#### 4.1. Sumberdaya Alam

##### 4.1.1. Pengendalian Banjir, Abrasi dan Tanah Longsor

Upaya pengendalian banjir (*flood control*) dilihat secara komprehensif, baik secara rekayasa teknik sipil maupun pendekatan sosial termasuk peningkatan peran serta masyarakat. Upaya penanganan masalah banjir memang membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pembangunan fisik. Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan skala prioritas dan selektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pengendalian banjir, abrasi dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman :

1. Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang rawan bencana longsor, sehingga pada lokasi tertentu mau tidak mau harus dijadikan kawasan lindung dan bebas pemukiman.
2. Pembangunan perumahan pada kawasan resapan air perlu dibatasi.
3. Pengendalian banjir luapan lebih mengedepankan aspek pembinaan sungai (perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian), serta penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara menyeluruh mulai dari hulu, tengah dan hilir.
4. Penanganan banjir genangan/lokal melalui sistim drainase. Sistem drainase wilayah perlu adanya "*master plan*" drainase secara jelas, sehingga dapat diketahui kebutuhan drainase dan sistemnya.





5. Pengkajian peruntukan lahan, terutama pada wilayah kawasan rawan banjir melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah (Perda), atau memprioritaskan kawasan rawan banjir sebagai kajian utama dalam revisi RTRW.
6. Pemberian izin untuk pembangunan kawasan, baik kawasan perumahan, industri dan lainnya, perlu rekomendasi kelayakan lingkungan (Studi AMDAL atau UKL/UPL).
7. Harus adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah sampah. Perlu adanya pengaturan yang konsisten dalam pengambilan sampah dari TPS ke TPA. Disamping itu adanya penyuluhan kepada masyarakat akan dampak sistem pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik.
8. Membuat daerah peresapan air hujan (embung) dan memperbanyak daya tampung air hujan oleh tanah di daerah pengaliran sungai (DPS).
9. Melakukan monitoring perkembangan alur pengaliran sungai.
10. Melakukan relokasi penduduk yang berada pada kawasan dengan tingkat kerawanan bahaya longsor yang tinggi.
11. Mitigasi bencana dalam jangka panjang tetap perlu dilakukan dengan upaya penurunan sudut kemiringan, perubahan bentuk lereng menjadi cembung dan reboisasi dengan tanaman pepohonan.

#### 4.1.2. Pemulihan Lahan Kritis

Upaya pemulihan dan perbaikan lahan kritis tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mengedepankan peran dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam mengamankan kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap upaya perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
2. Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk dapat dipergunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan yang produktif.
3. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait dalam pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan peruntukannya terutama lahan untuk konservasi.



4. Perlu alternatif dalam pembangunan pemukiman penduduk, agar tidak memanfaatkan lahan produktif maupun lahan hutan.
5. Menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Tanah dan Larangan Pemanfaatan Lahan Produktif untuk keperluan lain.
6. Melakukan revegetasi dan reboisasi areal atau kawasan yang memiliki penutupan tajuk vegetasi jarang.
7. Perlindungan dan penataan kawasan lindung, terutama penataan tapal batas kawasan lindung.
8. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pelestarian sumberdaya lahan dan hutan.
9. Pemantapan ruang lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan pada *catchment area* terutama menyangkut luas berdasarkan faktor daya dukung lingkungan setempat.
10. Pengawasan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait serta penegakan hukum yang tegas bagi pelaku "*illegal logging*".
11. Melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui program reboisasi dan penghijauan.
12. Melibatkan peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

#### 4.1.3. Pengendalian Pencemaran Sungai

Pencemaran pada air sungai merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi, industri dan pertumbuhan penduduk. Dari berbagai bentuk aktivitas seperti pemukiman, pasar, bengkel (*workshop*), rumah sakit, perhotelan, industri (pabrik), dan pertambangan galian C yang menghasilkan limbah tersebut masuk ke sungai baik langsung, melalui saluran atau melalui drainase. Menghadapi hal tersebut beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan adalah sbb:

- 1) Pemerintah beserta masyarakat melakukan peningkatan upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran air.
- 2) Melakukan monitoring/pengawasan terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan dari setiap kegiatan usaha baik pabrik, rumah sakit, dan kegiatan lainnya.
- 3) Melakukan monitoring/pengawasan dan peneguran terhadap usaha dalam hal pembuangan limbah domestik ke sungai/ badan air.



- 4) Kantor Lingkungan Hidup agar menyediakan fasilitas bak sampah di sekitar pemukiman yang berada di sepanjang pinggir sungai dan pantai.
- 5) Kantor Kehutanan dan Konservasi Lahan perlu menjaga *catchment area* agar air tanah dan air permukaan tetap terjaga/terpenuhi kualitasnya.
- 6) Dinas Pekerjaan Umum untuk dapat membuat kolam atau bak oksidasi pengolah rumah tangga sebagai bentuk fassum pada kompleks perumahan yang akan berdampak positif dalam rangka menekan tingkat pencemaran air sungai.
- 7) Memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat penambang sirtukil pada palung sungai yang tidak memiliki izin.
- 5) Memperketat proses perizinan kepada setiap usaha/kegiatan yang diperkirakan akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.
6. Melakukan penegakan hukum lingkungan kepada siapapun yang melanggar (melakukan pencemaran dan kerusakan) lingkungan.
- 7) Melakukan pembersihan dan rehabilitasi sungai sungai yang telah mengalami pencemaran.
- 8) Melakukan renovasi dan penataan kawasan muara sungai yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan rekreasi, sehingga menjadi bersih dan indah.
- 9) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan khususnya perairan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang limbah ke sungai.
- 10) Melibatkan masyarakat dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran baik yang berasal dari industri maupun domestik.

#### 4.1.4. Pengelolaan Pantai dan Pesisir

Pengelolaan daerah pesisir pantai sangat diperlukan untuk melindungi daerah Kabupaten Padang Pariaman dari bahaya alam seperti badai, abrasi, gelombang pasang, pencemaran dan intrusi air laut. Ironisnya saat ini keadaan sebagian besar daerah pantai di Kabupaten Padang Pariaman saat ini sudah mengalami pencemaran, kerusakan dan tidak asri lagi. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah :



- 1) Menjaga kualitas kawasan pantai/pesisir agar tetap baik, untuk itu perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada program-program pengendalian pembuangan limbah di kawasan pesisir. Pantai.
- 2) Melakukan monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan oleh kegiatan yang ada di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil.
- 2) Melakukan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut, melindungi wilayah tersebut dari bahan pencemar, sampah dan bangunan liar.
- 4) Melakukan usaha konservasi serta rehabilitasi/reklamasi habitat yang telah rusak, dengan merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove yang sudah rusak, sehingga daerah pantai/pesisir tersebut dapat dikembangkan menjadi daerah wisata yang indah, asri, aman dan nyaman.
- 5) Melakukan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan di wilayah pantai/pesisir seperti penambahan jumlah TPS dan memperlancar aksesibilitas pengangkutan sampah dari daerah pantai ke TPA sampah.
- 6) Melakukan penegakkan hukum lingkungan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran (pencemaran dan kerusakan) lingkungan di kawasan pantai pesisir Kabupaten Padang Pariaman.
- 6) Memberikan sanksi/tindakan tegas pada siapapun yang tidak memiliki izin pembangunan di sepanjang pantai serta keharusan pembuatan Dokumen UKL/UPL atau AMDAL pada kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan.
- 8) Melaksanakan peningkatan himbauan atau sosialisasi, serta program pemerintah yang dapat memberikan pendidikan lingkungan atau menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungan pantai/pesisir berserta dengan perairannya.

#### 4.1.5. Pengelolaan Pencemaran Udara

Hal terbesar yang mempengaruhi kualitas udara adalah penggunaan bahan bakar untuk keperluan transportasi, industri maupun berbagai kegiatan domestik. Seiring dengan berkembangnya Kabupaten Padang Pariaman tentu sejalan dengan ikut berkembangnya kawasan perekonomian, industri, perdagangan, transportasi dan pertambahan penduduk. Hal ini jelas akan berdampak pada penurunan kualitas udara di Kabupaten Padang Pariaman. Sejauh ini kualitas Udara Kabupaten Padang Pariaman pada banyak lokasi sudah tercemar oleh debu dan gas CO, namun di masa datang juga tidak tertutup pula



kemungkinan oleh  $SO_x$ ,  $NO_x$ , dan Pb, akibat dari pertumbuhan wilayah dan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, beberapa langkah antisipasi perlu dilakukan dengan kebijakan sbb:

- 1) Melakukan dan memperketat izin kelaikan jalan kendaraan bermotor (meningkatkan pengawasan uji kendaraan bermotor), dan melakukan regulasi jalur dan peremajaan kendaraan tua bila perlu.
- 2) Melakukan pengawasan /monitoring terhadap kondisi udara yang ada, memasang alat detektor kualitas udara di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, industri-industri, jalan raya yang padat lalu lintas, terminal dan lain-lain.
- 3) Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada pihak industri yang mencemari lingkungan.
- 4) Melakukan pengkajian ulang/evaluasi terhadap dokumen UKL/UPL dan AMDAL yang telah ada dengan memperhatikan kondisi rona lingkungan eksisting dan kemajuan teknologi pengelolaan emisi, sehingga emisi yang dibuang ke lingkungan betul-betul aman dan tidak memperparah pencemaran udara Kabupaten Padang Pariaman.
- 5) Meningkatkan kegiatan penanaman pohon pelindung dan peneduh pada sebagian besar jalan utama, pembentukan jalur hijau dengan penataan yang baik pada semua jalan yang ada dalam wilayah dan jalan menuju luar Kabupaten Padang Pariaman.
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penghijauan.
- 7) Sosialisasi pengelolaan lingkungan pada masyarakat melalui *community building* oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga kepedulian lingkungan tertanam oleh setiap orang/warga.
- 8) Monitoring juga dapat dilakukan pada tempat tertentu /lokasi strategis dengan memasang alat detektor otomatis dengan display yang dapat diketahui oleh masyarakat.

#### 4.1.6. Gempa dan Tsunami

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah pengamanan diri agar terhindar dari bencana yang tidak diinginkan. Dalam upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan KOGAMI (Komunitas Siaga Tsunami) telah melakukan pendidikan bagi masyarakat yaitu melaksanakan Workshop Sistem Evakuasi Gempa dan Tsunami. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan kedamaian bukan membuat cemas warga. Dengan kegiatan yang dilakukan diharapkan masyarakat dapat mengenali tingkat kerawanan lingkungannya, terbiasa membuat perencanaan strategi evakuasi, memupuk rasa tanggung jawab masyarakat untuk menyelamatkan diri dan keluarga jika terjadi bencana serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong.



Berbagai kebijakan dan aktifitas juga dilakukan Pemkab. Padang Pariaman untuk menyelamatkan warga seperti upaya spritual (doa dan zikir), penyuluhan dan pelatihan evakuasi, pembenahan fisik jalur evakuasi serta pembentukan posko pemantauan gempa dan tsunami.

Sistem peringatan dini secara menyeluruh sangat diperlukan karena Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana gempa bumi, tsunami dan banjir. Begitu terjadi gempa, masyarakat tak perlu panik bahkan perlu lebih tanggap dan paham apa yang perlu dilakukan dalam menyikapi rawan bencana bila terjadi, selain itu dapat dilihat dari tanda-tanda alam, perilaku hewan dan cuaca. Masyarakat wajib diberi tahu informasi mengenai tanda-tanda gempa dan tsunami secara berkelanjutan, bahkan jika perlu dibudayakan sebagai pedoman hidup. Peringatan ini diperlukan untuk kesiap siagaan, sehingga dapat menjaga lingkungan di daerah rawan bencana. Siaga ini tidak harus melibatkan suatu institusi, bahkan masyarakat pun wajib mengetahui sistem peringatan dini tersebut, sehingga tampak bahwa pemerintah dan masyarakat mempunyai visi dan misi yang sama untuk waspada terhadap bencana.

Tragedi nasional di Aceh dan Sumatera Utara memberikan suatu pelajaran bahwa minimnya pengetahuan masyarakat, lemahnya koordinasi dan belum adanya perencanaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana alam mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Semua usaha tersebut bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat dan pemerintah mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu dan berkesinambungan. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Meneg Ristek, LIPI, Bakornas Penanggulangan Bencana, LSM serta dukungan Lembaga Internasional dalam pelaksanaan Program *Contingency planning and Tsunami Early Warning System (TEWS)* serta *community preparedness* dalam menghadapi kemungkinan terjadinya tsunami di Kabupaten Padang Pariaman.

Perlu adanya tata ruang pesisir pantai karena rusaknya lingkungan akibat tsunami tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan kerusakan lingkungan dan bencana alam tsunami . Gelombang tsunami merupakan aksi alam yang tidak bisa diduga, namun dampak gempa dan tsunami bisa diminimalisasi bila lingkungan pesisir pantai benar-benar dipelihara. Disamping itu alternatif jalan baru juga mesti dibuat yang mengarah ke arah perbukitan. Semakin banyak jalan ke arah bukit proses mobilitas warga semakin ramai. Aktivitas ekonomi juga akan terpengaruh ketika isolasi alamiah dibuka. Disamping itu pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu kepada UU No. 28 Tahun 2002. tentang Bangunan Gedung. Ini bertujuan untuk menghasilkan gedung dengan standar bangunan tahan gempa yang masuk ke dalam aspek keamanan gedung. Struktur gedung harus kuat untuk menjaga keselamatan penghuni gedung dari bahaya gempa.



## 4.2. Sumberdaya Buatan

### 4.2.1. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman

Konsentrasi pertumbuhan kawasan pemukiman di Kabupaten Padang Pariaman tersebar pada daerah-daerah seperti kawasan Daerah Aliran Sungai (Batang Anai), *catchment area*, daerah yang memiliki kelerengan tajam, dan sepanjang garis pantai tanpa memperhatikan aspek lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi rawan bencana berupa banjir, longsor dan pencemaran. Dalam kondisi perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika kegiatan sosial ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman, serta penambahan jumlah penduduk kota akan mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat terlihat dari tumbuh dan berkembangnya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa maupun industri. Dengan makin tingginya aktivitas tersebut akan sebanding pula dengan limbah yang akan dihasilkannya seperti limbah padat berupa sampah (organik dan anorganik) dan limbah cair serta hasil samping lainnya. Hal tersebut jelas berdampak pada penurunan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan lingkungan pemukiman yang layak di masa yang akan datang maka disarankan sebagai berikut:

1. Pengembangan pemukiman berskala besar merupakan pilihan kebijakan yang tepat karena mengoptimalkan fungsi lahan secara vertikal maupun horizontal termasuk fungsi uang dan barang serta pelayanan publik termasuk pengelolaan jaringan utilitas seperti air bersih, listrik, telekomunikasi dan lain-lain. Pemukiman skala kecil agar dapat dikembangkan menjadi berskala sedang dan seterusnya pemukiman skala sedang dikembangkan menjadi berskala besar sebagai kawasan strategis.
2. Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan ketentuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk kompleks pemukiman secara jelas dan pengawasan pembangunan perumahan secara intensif.
3. Pemerintah kabupaten perlu merangsang tumbuh dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Bagi kelompok masyarakat yang secara sukarela melakukan swadaya dan swadana untuk penyediaan fasilitas umum di kompleks pemukimannya, maka diharapkan pemerintah dapat memberikan insentif baik penghargaan berupa benda atau uang maupun pengurangan pajak yang ditanggung oleh kelompok masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk merangsang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum di kompleks perumahan mereka masing-masing.



4. Pemerintah perlu melakukan rehabilitasi pemukiman kampung dengan pengaturan tata letak serta penyediaan sarana dan prasarana publik. Rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan sehingga seluruh ruang wilayah memiliki standar yang sama.
5. Pembangunan perumahan pada kawasan resapan air perlu dibatasi seperti pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman
6. Menghindari pengembangan kawasan pemukiman di daerah rawan longsor, banjir dan bencana lainnya. Pemukiman yang berada pada daerah rawan longsor supaya dipindahkan ke tempat yang aman.
7. Pemerintah perlu memprogramkan peningkatan dan perbaikan lingkungan pemukiman yang kurang layak huni serta bantuan sebagai stimulasi bagi masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana lingkungan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
8. Pengembangan kawasan pemukiman ke arah pinggiran wilayah perlu dilakukan secara terintegrasi satu sama lain, sehingga tidak terpecah-pecah serta memudahkan dalam penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.
9. Meningkatkan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dalam jumlah yang cukup, baik jumlah TPS, mobil dan kualitasnya sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah pantai dan sempadan sungai ke TPA sampah.
10. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sembarang tempat.
11. Melakukan himbauan atau sosialisasi, atau program pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungannya termasuk juga lingkungan sungai dan perairan pantai.
12. Menerapkan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah/limbah rumah tangga dalam skala kecil di lingkungan pemukiman maupun skala besar di TPA sampah.
13. Melakukan patroli kebersihan pada tempat-tempat strategis untuk pengontrolan sampah dan menindak tegas bagi siapapun yang melanggar peraturan tentang pembuangan sampah.





14. Sosialisasi Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pembangunan lingkungan pemukiman masyarakat sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman.
15. Relokasi perumahan nelayan harus memperhatikan jaraknya dengan laut karena nelayan pada dasarnya tidak dapat tinggal jauh dari laut.

#### 4.2.2. Industri dan Dunia Usaha

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mengendalikan dampak lingkungan melalui penegakan aturan pemanfaatan lingkungan dan pengawasan pembangunan serta pembinaan kesadaran lingkungan kepada masyarakat . Untuk mengendalikan dampak lingkungan dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah serta kerjasama antara pemerintah kota dengan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. Untuk menuju usaha dan industri yang ramah lingkungan di masa yang akan datang , maka disarankan :

1. Pembangunan industri dan tempat usaha agar dikembangkan ke arah kawasan yang memang direncanakan sebagai pusat pelayanan industri seperti PIP (Padang Industrial Park) Kasang dan Duku di bagian Selatan. Dengan memfokuskan pembangunan kawasan industri di daerah tersebut diharapkan kerusakan lingkungan dan paparan polutan terhadap warga kota dapat diminimalisasi.
2. Sektor industri di Kabupaten Padang Pariaman belum berkembang sebagai primadona karena keterbatasan input dan pasar bagi industri pengolahan dan manufaktur. Beberapa industri berbasis pertanian umumnya belum menghasilkan produk akhir untuk konsumen lokal seperti industri CPO. Keterbatasan ini akan dapat diatasi jika input dan pasar dapat ditingkatkan melalui jaringan transportasi darat dan laut.
3. Pembuangan olie bekas dan minyak oleh bengkel, perusahaan dan industri yang beroperasi di bantaran sungai dan pantai serta limbah rumah sakit harus mendapatkan perhatian yang serius.
4. Menegur usaha atau industri yang belum mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan serta menutup usaha yang mencemari lingkungan.
5. Pemkab. Padang Pariaman agar mempunyai SOP penyelesaian sengketa lingkungan dan penutupan usaha/ kegiatan serta mensosialisasikan kepada pemilik usaha/kegiatan.
6. Mengaitkan antara pengeluaran izin usaha dengan ketersediaan dokumen kelayakan lingkungan.
7. Tidak memberikan izin bagi usaha/kegiatan yang melanggar tata ruang.



8. Pemkab. Padang Pariaman agar melakukan pemantauan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan agar sesuai dengan dokumen yang dimilikinya.

#### 4.2.3. Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan Pemkab. Padang Pariaman terhadap pengembangan pasar dan pusat perbelanjaan maka disarankan :

1. Peningkatan status pasar nagari dan kecamatan menjadi pasar kawasan atau lokal. Kebijakan tersebut harus didukung oleh pengembangan kawasan pemukiman berskala besar dan pengaturan aliran kendaraan sesuai jenis dan kapasitas baik intra maupun antar kawasan.
2. Kawasan bisnis yang sudah tumbuh, namun belum optimal perkembangannya agar ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk memacu pertumbuhannya sehingga dapat memberi manfaat yang maksimal. Beberapa kawasan pasar nagari dan kecamatan perlu penataan ulang bahkan dibangun kembali sesuai konsep pasar modern yang menyediakan ruang usaha bagi semua strata bisnis termasuk pedagang kaki lima.
3. Pembangunan dan pengembangan pasar serta pusat perbelanjaan agar disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman.
4. Kegiatan pasar modern (mall, plaza, supermarket) dapat saja dikembangkan pada titik-titik tertentu, sejauh tidak mengganggu kegiatan perdagangan tradisional.
5. Untuk mendukung fungsi Kabupaten Padang Pariaman sebagai pusat perdagangan regional perlu dikembangkan perdagangan regional selain yang sudah ada saat ini .
6. Pembangunan swalayan agar diawasi untuk membatasi praktek monopoli.

#### 4.2.4 Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk pengelolaan TPA sampah di masa yang akan datang, maka disarankan :

1. Pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan mulai dari sumber sampah, sehingga dapat dipisahkan sampah organik dan anorganik, sampah yang dapat didaur ulang serta kemungkinan adanya perubahan bentuk sampah. Untuk terwujudnya keadaan ideal sebagaimana tercantum dalam Agenda 21 tentu perlu adanya upaya pemerintah kota untuk memulai langkah ini dengan mensosialisasikan kepada masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan pengelolaan sampah dengan membayar restribusi dan menganggap permasalahan sampah dari RT sampai ke TPA bukan lagi tanggung jawab yang mereka pikirkan.



2. Untuk memperpanjang umur teknis *sanitary landfill* perlu juga dukungan pemerintah kepada industri agar memproduksi kemasan yang dapat dipakai berulang disamping sosialisasi proses daur ulang sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha.
3. Pengelolaan persampahan di masa yang akan datang harus didukung dengan teknologi pengolahan sampah menjadi kompos (*composting*) untuk mendukung pengelolaan pertamanan kota serta pengembangan teknologi pengolahan bahan berupa kertas, plastik dan logam untuk kebutuhan industri rumah tangga.
4. Perlu adanya perhatian pemerintah kota terhadap gangguan kesehatan yang disebabkan dekatnya lokasi penumpukan di TPA SAMPAH dengan pemukiman penduduk.
5. Pengelolaan persampahan harus didukung produk hukum daerah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pemberian sanksi pelanggaran.
6. Perlu adanya koordinasi antar dinas instansi pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman seperti Kantor Sosial dan Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam upaya mengatasi gejala sosial yang terjadi pada masyarakat TPA SAMPAH sehingga tidak terdapat lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
7. Pengelolaan kebersihan dan pertamanan di masa depan perlu didorong untuk melibatkan masyarakat, lembaga dan instansi swasta (*zero cost*).
8. Pengelolaan jalur hijau sepanjang jalan utama dengan memberi stimulus kepada sekolah-sekolah untuk menata pertamanan dapat menjadi contoh pola keterlibatan masyarakat, lembaga dan instansi dalam pengelolaan kebersihan.

#### 4.2.5. Perekonomian dan Pengembangan Usaha

Perkembangan Kabupaten Padang Pariaman di segala bidang mengakibatkan semakin tinggi tingkat persaingan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya kesulitan ekonomi akibat terbatasnya lapangan usaha bermodal kecil dengan keterampilan terbatas dan bersifat mandiri. Sehingga lapangan usaha/pekerjaan masyarakat menjadi beralih ke lapangan usaha baru. Hal ini juga berdampak pada peningkatan permasalahan sosial di masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, untuk dapat mengambil langkah langkah yang dapat melindungi lingkungan sosial adalah dengan beberapa langkah antisipasi seperti yang direkomendasi dibawah ini:



- 1) Mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengembangan sektor-sektor usaha kecil dan menengah yang tidak berdampak pada eksploitasi hutan secara berlebihan.
- 2) Melakukan penataan tempat-tempat usaha agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta ramah lingkungan.
- 3) Melakukan sosialisasi dan memperbanyak bentuk-bentuk pelatihan pengembangan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah.
- 4) Memberikan bantuan dana pengembangan usaha berupa kredit lunak tanpa agunan dan pemberian dana bergulir bagi pengusaha ekonomi lemah.

### **4.3. Sumberdaya Manusia**

#### **4.3.1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Tidak Merata Penyebaran Penduduk**

Pertambahan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman akan menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk. Hal ini berkorelasi dengan permasalahan kemiskinan dan kesehatan masyarakat, di daerah pinggiran Kabupaten Padang Pariaman perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi pemukiman yang tidak layak huni serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan akan berpengaruh terhadap rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Antisipasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengatasi permasalahan penduduk tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan pengadaan sarana prasarana pembuangan sampah baik dari jumlah maupun kontinuitasnya perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah dan kondisi kependudukan yang berada di daerah-daerah pinggiran.
- 2) Menciptakan lingkungan pemukiman yang layak huni dan layak kesehatan, dengan membangun / menambah tempat pembuangan sampah, dan saluran drainase.
- 3) Melakukan rehabilitasi pemukiman kumuh dengan mempertimbangkan tata ruang pemukiman sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.
- 4) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, kebersihan serta bahaya penyakit dan menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat.

#### **4.3.3. Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan**

Sehubungan dengan permasalahan perekonomian, masih terdapatnya kondisi pemukiman yang tidak layak huni serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan akan berpengaruh terhadap rendahnya



kondisi kesehatan lingkungan, hal ini mengakibatkan banyaknya sumber penyakit. Disamping itu masih terbelitnya masyarakat dalam kondisi kemiskinan ini, menjadikan belum mampunya masyarakat untuk berobat ke RSUD atau swasta apalagi sarana kesehatan yang ada jauh dari pemukiman mereka. Antisipasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengatasi permasalahan kesehatan penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menindak lanjuti program pengiriman dan penyebaran dokter-dokter spesialis dengan berbagai bidang lainnya ke puskesmas-puskesmas pada kawasan pinggiran.
- 2) Meningkatkan sarana prasarana pendukung kesehatan secara merata dan tersebar di semua wilayah Kabupaten Padang Pariaman serta memantapkan kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu.
- 2) Meningkatkan mutu kesehatan dengan mengembangkan puskesmas-puskesmas utama yang telah ada sebagai pusat rujukan kesehatan sehingga mampu tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tetapi sekaligus mampu penanganan jenis penyakit yang ada di masyarakat tersebut tanpa perlu merujuk penderita (pasien) ke rumah sakit yang ada di pusat kota.
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan mutu SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- 4) Merubah paradigma masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat pencegahan penyakit.

#### **4.3.3. Penertiban Masalah Kerawanan dan Kerentanan Sosial**

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak-anak terlantar dan mulai menggejalanya fenomena anak jalanan, disatu sisi ikut berdampak pada terjadinya masalah gangguan keamanan dan pelanggaran ketertiban umum. Hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa langkah penertiban agar masalah ini tidak semakin berkembang. Antisipasi untuk mengatasi permasalahan penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan program-program pemberantasan terhadap segala bentuk maksiat yang terjadi di masyarakat.
- 2) Meningkatkan upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, agar tercipta kondisi yang aman dan tertib.
- 2) Melakukan antisipasi terhadap permasalahan anak terlantar agar tidak semakin bertambah.



- 4) Menyediakan kemudahan-kemudahan dalam bentuk bantuan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha kepada masyarakat yang berekonomi lemah.

#### 4.3.4. Pendidikan

Memperhatikan potensi dan permasalahan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman, maka dirasa perlu diberikan rekomendasi kebijakan untuk dijadikan bahwan pertimbangan antara lain :

1. Meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dengan merealisir pelaksanaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
2. Meningkatkan SDM anak-anak putus sekolah, anak yang kurang mampu dan anak yang rawan sosial melalui program pendidikan luar sekolah (SKB, Paket A, B dan C).
3. Menanamkan semangat peduli lingkungan kepada anak usia sekolah secara dini melalui program ekstrakurikuler peduli lingkungan.
4. Berkoordinasi dan bersinergi dengan LSM dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup.

Rekomendasi manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilakukan antara lain :

1. Dimasukkannya pertimbangan ekologi dalam setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, jadi tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja. Dengan adanya pertimbangan ekologi diharapkan mutu pencapaian pembangunan dapat meningkat dan aktifitas pembangunan pada sumberdaya dan proses lingkungan yang lebih luas dapat diperhitungkan.
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mengendalikan dampak lingkungan melalui penegakkan aturan pemanfaatan lingkungan dan pengawasan pembangunan serta pembinaan terhadap kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Untuk mengendalikan dampak lingkungan dibutuhkan koordinasi pembangunan yang baik antar instansi pemerintah serta kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan lingkungan.
3. Meningkatkan pendekatan multidisiplin dalam perencanaan pembangunan. Realita pembangunan adalah realita yang kompleks. Ini tidak berarti spesialisasi dalam pendidikan tidak diperlukan, tetapi dalam perencanaan pembangunan para spesialis harus duduk bersama-sama dan membicarakannya secara terintegrasi.
4. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan di masa mendatang, sangat diperlukan inventarisasi data sumberdaya alam, sehingga penyusunan



dan penetapan program pembangunan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

5. Pengembangan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara berbagai sektor dan lintas Kabupaten/Kota.
6. Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pola kemitraan.
7. Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kepastian hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sedangkan bagi dunia usaha akan memberikan jaminan keamanan terhadap investasinya. Untuk Pemda sendiri kepastian hukum dapat menjamin konsistensi pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dan bertanggung jawab.
8. Pengembangan sistem informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terpadu. Kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup perlu disusun dengan perencanaan yang baik berdasarkan data lingkungan yang akurat serta bersifat mengembangkan potensi dari pihak lain yang terkait. Keterlibatan pihak terkait diharapkan dapat lebih terkoordinasi dengan baik, sehingga semua dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman.
9. Pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan dengan memberi kesempatan dan peran aktif masyarakat serta perluasan akses dan hak kontrol masyarakat/LSM terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat.
10. Perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan yang lebih kontinyu. Untuk diperlukan pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten dan benar-benar menguasai serta memahami persoalan lingkungan hidup.
11. Pihak Pemerintah Daerah perlu memikirkan alternatif pekerjaan sebagai sumber ekonomi/pendapatan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pengurusan sumberdaya alam yang bersifat merusak atau meyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Disamping itu agar lebih ditingkatkan peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup melalui program pemberdayaan masyarakat.



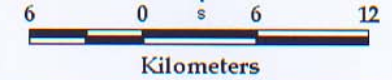
12. Perlunya penyamaan persepsi dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup. Hal ini tidak mudah mengingat keterlibatan berbagai sektor yang mempunyai kepentingan berbeda. Perbedaan ini tentunya dapat disatukan melalui penyadaran bahwa permintaan kita terhadap lingkungan bisa saja tak terhingga, tetapi lingkungan selalu mempunyai keterbatasan. Penyamaan persepsi dapat terwujud melalui koordinasi dan *sharing* informasi.
13. Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu (*upper stream*) dan hilir (*down stream*) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).
14. Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari kawasan lindung, maka langkah pengembangan kawasan budidaya seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung untuk memberikan jasa lingkungan.
15. Dalam pengembangan kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan kita kembangkan.
16. Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah penyangga di kawasan pesisir pantai.
17. Sudah saatnya dilakukan program penghijauan pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau reboisasi pesisir pantai dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, LSM/OLH dan masyarakat setempat.
18. Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat aturan/perangkat hukum berupa peraturan daerah (Perda) sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
19. Pemanfaatan rawa dan kawasan resapan air untuk lokasi pemukiman dan kawasan terbangun harus memperhatikan prinsip hidrogeologi.
20. Pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan.
21. Penyadaran dan sosialisasi pengelolaan lingkungan melalui *community building* sebaiknya terus dilakukan, sehingga kepedulian lingkungan oleh setiap insan yang hidup dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman dapat tumbuh dan menjadi kebutuhannya di masa datang.





22. Visi dan Misi, Renstra serta program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman harus senantiasa dipertajam, disempurnakan dan ditingkatkan guna mengantisipasi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.

# Peta Padang Pariaman Landcover & Kaw. Lindung Tahun 2005



## LEGENDA :

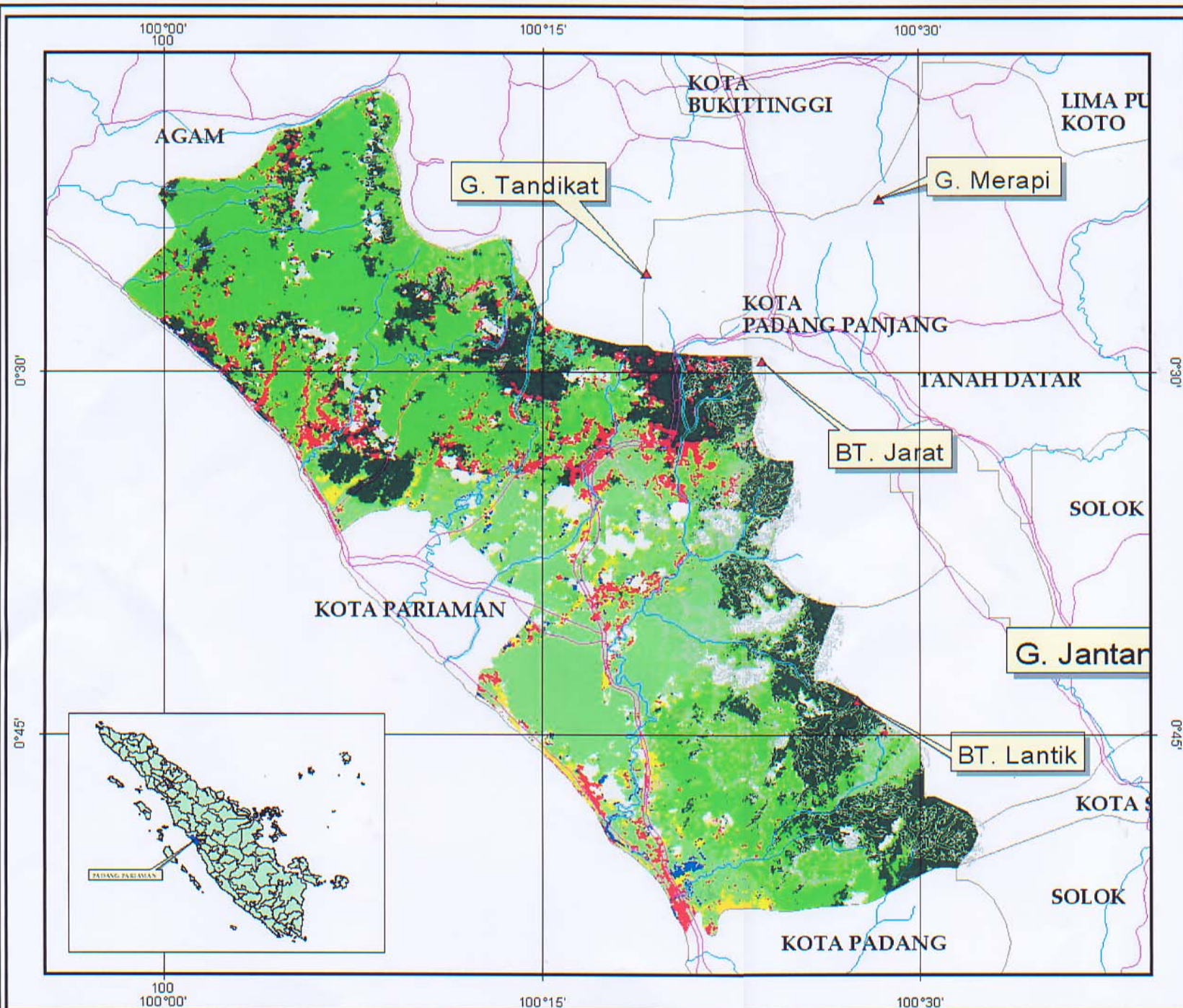
- Gunung
- Jalan
- Sungai
- Kawasan Lindung
- Batas Administrasi Kabupaten

## Landcover :

- Tubuh Air
- Awan
- Hutan Lahan Kering
- Hutan Mangrove
- Hutan Rawa
- Perkebunan Teh
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkebunan Karet
- Perkebunan Lain
- Permukiman
- Pertanian Lahan Kering
- Rawa
- Savanna
- Sawah
- Semak Belukar
- Hutan Alam
- Tambak
- Tanah Terbuka
- Hutan Tanaman
- Danau
- Kebun Campuran
- Bayangan Awan



Kementerian Negara  
Lingkungan Hidup  
Tahun 2006















**PETA WILAYAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Sumber  
Peta Rupabumi, Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal tahun 1983

**Keterangan**

-  : Batas Provinsi
-  : Batas Kabupaten
-  : Jalan Nasional
-  : Jalan Keretapi

-  : Danau
-  : Kota Kabupaten/ADM
-  : Ibukota Provinsi

